



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN NON HOLD HARMLESS
DAN EVALUASI FORMULA DANA ALOKASI UMUM
TERHADAP PEMERATAAN PENDAPATAN PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA**

TESIS

**DESKY WIJAYA
NPM 0606012365**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
DEPOK, JULI 2009**





UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN NON HOLD HARMLESS
DAN EVALUASI FORMULA DANA ALOKASI UMUM
TERHADAP PEMERATAAN PENDAPATAN PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister ekonomi

DESKY WIJAYA
NPM 0606012365

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
DEPOK, JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Desky Wijaya

NPM : 0406012365

Tanda Tangan :

Tanggal : 30 Juni 2009

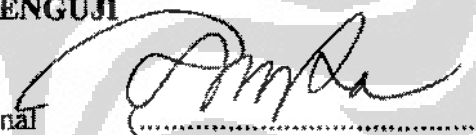
HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh:

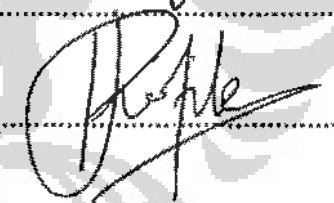
Nama : Desky Wijaya
NPM : 0606012365
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Analisis Dampak Kebijakan Non Hold Harmless dan Evaluasi Formula Dana Alokasi Umum Terhadap Pemerataan Pendapatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Arindra A. Zainal  (.....)

Penguji : Dr. Widyono Soetjipto  (.....)

Pembimbing : Khoirunurofik, MA., MPM  (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 24 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji dan Syukur penulis panjatkan atas Kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan kuliah di MPKP yang ditandai dengan selesainya penulisan tesis ini sebagai tugas akhir pada Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP).

Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Penulis mengajukan Tesis dengan judul **"Analisis Dampak Kebijakan Non Hold Harmless dan Evaluasi Formula Dana Alokasi Umum Terhadap Pemerataan Pendapatan Provinsi dan Kabupaten/Kota"**.

Selama masa perkuliahan serta dalam proses penyusunan tesis, telah banyak pihak yang membantu. Tidak ada yang dapat penulis lakukan untuk membalasnya, kecuali hanya ucapan terimakasih semata. Terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada berbagai pihak berikut:

1. Bp. Khoirunurrofik, MA., MPM selaku pembimbing yang selalu menyediakan waktunya bagi penulis untuk berkonsultasi dan selalu membantu penulis dalam menyelesaikan tesis;
2. Bp. Dr. Arindra A. Zainal selaku Ketua Program MPKP-FEUI dan Ketua Sidang Tesis dan Komprehensif yang telah banyak memberikan masukan demi penyempurnaan tesis selama sidang tesis dan komprehensif;
3. Bp. Dr. Widnyono Soetjipto selaku penguji tesis dan komprehensif yang telah banyak memberikan saran dalam rangka perbaikan tesis hasil sidang;
4. Ibu Hera Susanti, SE, M.Sc selaku dosen moderator pada seminar tesis yang telah memberikan masukan-masukan dan saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan tesis;
5. Bp. Syarif Syahril, SE., MIE selaku dosen ekonometrika yang membantu penulis dalam berkonsultasi dan melakukan analisa terhadap hasil-hasil pengujian kuantitatif dan regresi;

6. Ibu Dra. Wendy Julianti, M.Soc.Sc, Kepala Sub Direktorat Dana Alokasi Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang telah membantu penulis dalam berkonsultasi dan menyediakan data-data terkait dengan Dana Alokasi Umum;
7. Rekan-rekan di Subdit DAU dan Subdit IKD DJPK, Acep Dedi S., Aditya Nuryuslam, dan Dorlan yang juga membantu dalam menyuplai data-data DAU dan data pendapatan daerah;
8. Rekan-rekan di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang juga Alumni MPKP, Prasetyo Indro, Gustaf Kasfin Kasmiri, dan Iwan Richard Butar-butar yang terus memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
9. Ibu Ririn dan rekan-rekan satu ruangan atas pengertian dan dorongannya selama detik-detik terakhir penulisan tesis ini;
10. Semua teman-teman dari Angkatan XV A malam atas persahabatan dan kebersamaan selama menjalani kuliah, sehingga baik di dalam maupun di luar kelas tidak pernah terasa berat dan menjemukan;
11. Mas Dedi dan Mas Haris atas segala bantuannya selama penulis mengikuti perkuliahan di MPKP. Dan tentu saja Mbak Siti dan Mas Triman atas segala bantuan dan keramahannya dalam memberikan informasi
12. Dan terakhir tentu saja, My lovely family: my mom dengan bantuan doanya, tanpa doa mama tidak mungkin saya dapat menyelesaikan ini semua dengan baik; my lovely wife Fitriyani Helmy dengan segala dukungan dan kesabarannya; my lovely daughters Syahel Khansadefi Maritza dan Lubna Khairadefi Dzakira dengan segala keceriaannya. Dan juga Almarhum Papa, yang selama hidupnya terus memberikan dorongan kepada penulis untuk tidak pernah berhenti belajar dan menuntut ilmu kemanapun dan kapanpun. Terima kasih papa atas apa yang telah engkau berikan dan ajarkan kepada penulis selama ini... Thanks a lot and I love you all

Hanya Allah SWT semata yang sanggup memberikan balasan dan ganjaran yang sepatasnya kepada mereka yang telah dengan ikhlas membantu penulis.

Dengan segala kerendahan hati, kepada semua pihak yang belum penulis sebutkan yang telah turut membantu penyelesaian tesis ini, maka penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga Allah selalu memberikan pahala, nikmat dan rahmat yang tiada taranya.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak. Sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan, penulis sangat menyadari akan adanya keterbatasan dalam penulisan tesis ini. Oleh karenanya, segala masukan baik berupa saran maupun kritikan akan dengan senang hati kami terima. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Juli 2009

Penulis,

Desky Wijaya

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desky Wijaya
NPM : 0606012365
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Departemen : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Dampak Kebijakan Non Hold Harmless dan Evaluasi Formula Dana Alokasi Umum Terhadap Pemerataan Pendapatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Juli 2009

Yang menyatakan

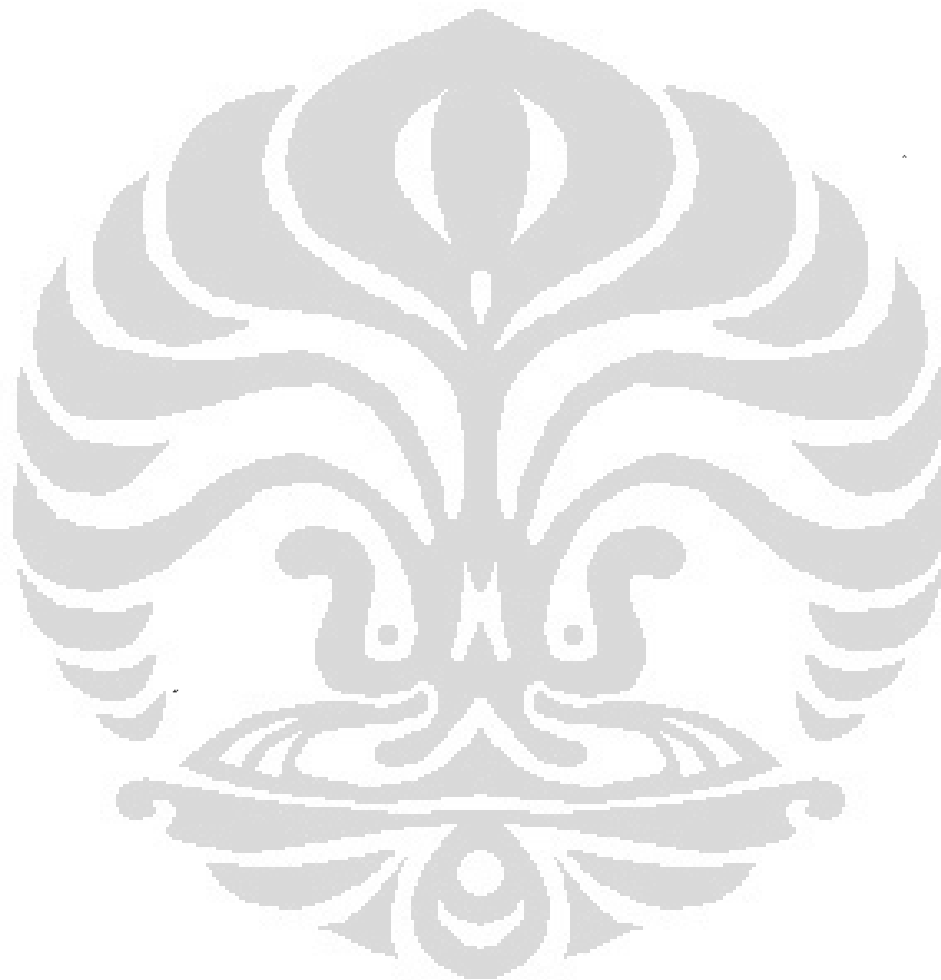

Desky Wijaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	viii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Metodologi Penelitian.....	5
1.5. Hipotesis	5
1.6. Manfaat Penelitian	5
1.7. Kerangka Penelitian.....	6
1.8. Sistematika Penulisan	7
2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Teori dan Pengalaman Internasional Terhadap Sistem Transfer Pusat Kepada Daerah.....	8
2.1.1 Tinjauan Teori Transfer Dari Pusat Ke Daerah.....	12
2.1.2 Pengalaman Internasional Transfer Pusat Kepada Daerah.....	19
2.2 Praktik Transfer Pemerintah Pusat Kepada Daerah di Indonesia.....	22
2.2.1 Kebijakan Pembagian Transfer DAU di Indonesia.....	25
2.2.2 Formulasi DAU di Indonesia.....	25
2.2.3 Kebijakan <i>Non Hold Harmless</i>	40
3. METODOLOGI PENELITIAN	42
3.1. Teknik Analisis	42
3.2. Asumsi Ekonometrika.....	46
3.3. Variabel-variabel dan Sumber Data.....	47
4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1. Kinerja DAU Untuk Pemerataan Kemampuan Fiskal Antar Daerah DAU.....	51
4.2 Analisa Perbandingan Pengaruh Masing-masing Variabel DAU pada DAU Berdasarkan Formula dan DAU Berdasarkan Peraturan Presiden Dengan Regresi Berganda.....	55

4.3	Analisa Perbandingan Pengaruh Masing-masing Variabel DAU pada DAU Berdasarkan Formula dan DAU Berdasarkan Peraturan Presiden Dengan Regresi Berganda Terboboti.....	67
5.	KESIMPULAN DAN SARAN	86
5.1	Kesimpulan	86
5.2.	Saran	89

DAFTAR REFERENSI

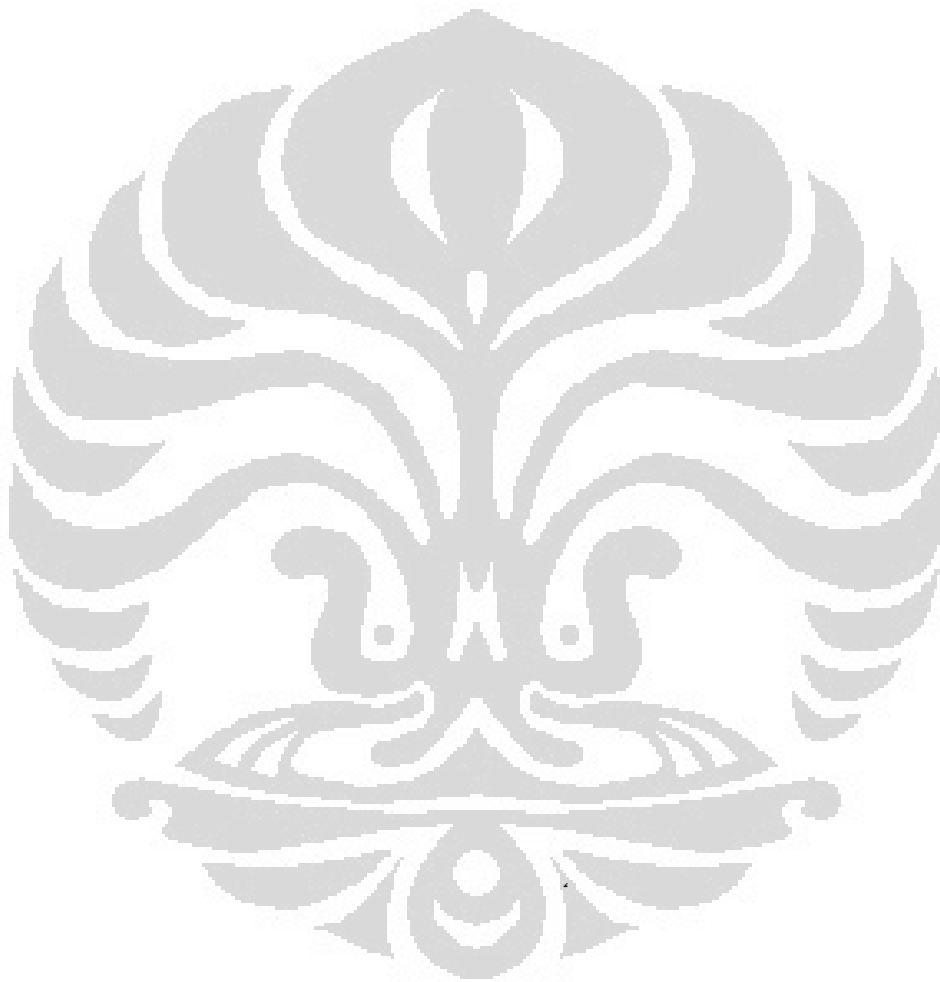


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Matriks Beberapa Substansi Formula	18
Tabel 2.2.	Tujuan, Faktor Penentu Alokasi, dan Praktik di Beberapa Negara.....	21
Tabel 2.3.	Bobot Variabel Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal DAU 2001.....	28
Tabel 2.4.	Perbandingan Komposisi Kebijakan DAU 2001-2005.....	31
Tabel 2.5.	Bobot Variabel Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal DAU 2002-2005.....	33
Tabel 2.6.	Bobot Variabel Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal DAU 2007.....	39
Tabel 4.1	Indeks Williamson Provinsi.....	52
Tabel 4.2.	Indeks Williamson Kabupaten/Kota.....	53
Tabel 4.3	Hasil Uji Heteroscedasticity Regresi Berganda DAU Provinsi.....	58
Tabel 4.4	Koefisien Hasil Regresi Berganda DAU Provinsi.....	59
Tabel 4.5	Perbandingan IPM dengan DAU Perpres dan Formula Tahun 2007.....	61
Tabel 4.6	Hasil Uji Heteroscedasticity Regresi Berganda DAU Kabupaten/Kota.....	64
Tabel 4.7	Koefisien Hasil Regresi Berganda DAU Kabupaten/Kota.....	65
Tabel 4.8	Hasil Uji Heteroscedasticity Regresi Berganda Terboboti DAU Provinsi.....	70
Tabel 4.9	Koefisien Hasil Regresi Berganda Terboboti DAU Provinsi.....	71
Tabel 4.10	Bobot Variabel Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal DAU Provinsi Setelah Rasionalisasi Koefisien.....	73
Tabel 4.11	Koefisien Variabel Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal DAU Provinsi Apabila Gaji Menjadi Unsur Variabel Kebutuhan Fiskal.....	76
Tabel 4.12	Hasil Uji Heteroscedasticity Regresi Berganda Terboboti DAU Kabupaten/Kota.....	78
Tabel 4.13	Koefisien Hasil Regresi Berganda Terboboti DAU Kabupaten/Kota.....	80
Tabel 4.14	Bobot Variabel Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal DAU Kabupaten/Kota Setelah Rasionalisasi Koefisien.....	81
Tabel 4.15	Koefisien Variabel Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal DAU Kabupaten/Kota Apabila Gaji Menjadi Unsur Variabel Kebutuhan Fiskal.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Perkembangan Realisasi Belanja Ke Daerah, 1996/1997 s.d. 2007.....	23
Gambar 2.2.	Formula DAU Berdasarkan Alokasi Dasar dan Celah Fiskal.....	36
Gambar 2.3.	Formula DAU Berdasarkan Celah Fiskal.....	41



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Perhitungan Indeks Williamson DAU TA 2007 dan TA 2008 Kabupaten/Kota
- Lampiran 2 Perhitungan Indeks Williamson DAU TA 2007 dan TA 2008 Provinsi
- Lampiran 3 Hasil Regresi DAU Provinsi Tahun 2006 Berdasarkan Formula
- Lampiran 4 Hasil Regresi DAU Provinsi Tahun 2006 Berdasarkan Peraturan Presiden
- Lampiran 5 Hasil Regresi DAU Provinsi Tahun 2007 Berdasarkan Formula
- Lampiran 6 Hasil Regresi DAU Provinsi Tahun 2007 Berdasarkan Peraturan Presiden
- Lampiran 7 Hasil Regresi DAU Kabupaten/Kota Tahun 2006 Berdasarkan Formula
- Lampiran 8 Hasil Regresi DAU Kabupaten/Kota Tahun 2006 Berdasarkan Peraturan Presiden
- Lampiran 9 Hasil Regresi DAU Kabupaten/Kota Tahun 2007 Berdasarkan Formula
- Lampiran 10 Hasil Regresi DAU Kabupaten/Kota Tahun 2007 Berdasarkan Peraturan Presiden
- Lampiran 11 Hasil Regresi Terboboti DAU Provinsi Tahun 2006 Berdasarkan Formula
- Lampiran 12 Hasil Regresi Terboboti DAU Provinsi Tahun 2006 Berdasarkan Peraturan Presiden
- Lampiran 13 Hasil Regresi Terboboti DAU Provinsi Tahun 2007 Berdasarkan Formula
- Lampiran 14 Hasil Regresi Terboboti DAU Provinsi Tahun 2007 Berdasarkan Peraturan Presiden
- Lampiran 15 Hasil Regresi Terboboti DAU Kabupaten/Kota Tahun 2006 Berdasarkan Formula
- Lampiran 16 Hasil Regresi Terboboti DAU Kabupaten/Kota Tahun 2006 Berdasarkan Peraturan Presiden
- Lampiran 17 Hasil Regresi Terboboti DAU Kabupaten/Kota Tahun 2007 Berdasarkan Formula
- Lampiran 18 Hasil Regresi Terboboti DAU Kabupaten/Kota Tahun 2007 Berdasarkan Peraturan Presiden

ABSTRAK

Nama : Desky Wijaya
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : Analisis Dampak Kebijakan Non Hold Harmless dan Evaluasi
Formula Dana Alokasi Umum Terhadap Pemerataan Pendapatan
Provinsi dan Kabupaten/kota

Tesis ini membahas dampak kebijakan *non hold harmless* Dana Alokasi Umum terhadap pemerataan pendapatan daerah di provinsi dan kabupaten/kota serta sekaligus mengevaluasi formula DAU. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan indeks williamson dan regresi berganda terboboti. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah perlu terus melanjutkan kebijakan *non hold harmless* dalam pengalokasian DAU kepada provinsi dan kabupaten/kota pada tahun-tahun yang akan datang. Selain itu Pemerintah juga diharapkan terus mengembangkan formula DAU dengan meninjau kembali bobot masing-masing variabel yang digunakan dalam penghitungan dan pengalokasian DAU agar DAU lebih dapat berfungsi memeratakan pendapatan provinsi maupun kabupaten/kota.

Kata kunci:

Non hold harmless, bobot variabel, formula, Dana Alokasi Umum

ABSTRACT

Name : Desky Wijaya
Study Program: Magister of Planning and Public Policy
Title : The Analysis of Impact of Non Holdharmless Policy and The Evaluation of Formula on General Allocation Grant Toward Revenue Equalization on Province and Regency/City

The focus of this study is on the impact of non hold harmless policy on general allocation grant toward revenue equalization on province and regency/city and also evaluating the formula. This research is quantitative research with Williamson Index and weighted square regression tools. The researcher suggests that central government have to continue this non hold harmless policy in allocating general allocation grant to province and regency/city. And also central government is expected to extend that general allocation grant formula through evaluating each variable weight that used on calculating and allocating general allocation grant in order that grant could more function as a tools to equalize revenue in province and regency/city.

Kata kunci:

Non hold harmless policy, variable, formula, general allocation grant

BAB I

PEDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengubah secara mendasar hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kewenangan di bidang keuangan, yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan turut pula diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah.

Dalam penerapan desentralisasi fiskal ini, salah satu aspek bahasan yang kerap kali muncul adalah adanya transfer dana dari pemerintah pusat kepada daerah (*intergovernmental fiscal transfer*). Transfer dari pemerintah pusat kepada daerah salah satunya dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan fiskal (*fiscal equalization*), baik secara vertikal (antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah), maupun horizontal (antar pemerintah daerah). Di Indonesia, transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini disebut dengan Dana Perimbangan.

Berdasarkan ketentuan perundangan, transfer dari pusat ke daerah terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu Dana Bagi Hasil, yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam (SDA); Dana Alokasi Umum (DAU); dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana bagi hasil dibagikan kepada daerah menurut persentase tertentu dan didasarkan atas daerah penghasil (*by origin*). Dana Alokasi Umum dibagikan dengan menggunakan formula tertentu. Sedangkan DAK dibagikan untuk tujuan-tujuan tertentu yang sudah digariskan (*specific grant*) sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang signifikan, khususnya untuk daerah kurang potensial dalam SDA dan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini terlihat dari porsi DAU yang relatif lebih besar dibandingkan dengan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya di daerah-

daerah tersebut. Definisi DAU sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Karena pembagian dana bagian daerah melalui bagi hasil (*revenue sharing*) cenderung menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*), maka diharapkan DAU dapat memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah yang akibat pembagian dana bagi hasil tersebut.

DAU yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah tersebut diterapkan melalui suatu formula, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan fiskal daerah (*fiscal need*) dan kapasitas fiskal daerah (*fiscal capacity*)¹. Daerah yang kapasitas fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh DAU kecil. Sebaliknya, daerah yang kapasitas fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh DAU besar.

Kebutuhan fiskal daerah dihitung dari perkalian total belanja daerah rata-rata dengan variabel-variabel indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia, dan indeks PDRB per kapita. Sedangkan kapasitas fiskal dicerminkan dengan variabel pendapatan asli daerah, bagi hasil sumber daya alam, dan bagi hasil pajak. Masing-masing indeks tersebut diberi bobot. Penentuan bobot untuk masing-masing indeks ini dalam pelaksanaannya didasari pada keputusan politis berupa kesepakatan antara Pemerintah dengan panitia anggaran DPR-RI.

Penetapan bobot yang hanya berdasarkan pada keputusan politis antara Pemerintah dengan panitia anggaran DPR-RI mengakibatkan selalu muncul ketidakpuasan dari sejumlah daerah. Daerah-daerah yang merasa tidak puas tersebut umumnya yang menerima DAU relatif kecil dan tidak dapat memenuhi kebutuhan fiskal daerahnya. Indeks yang diberi bobot tinggi, sebesar 30%, adalah indeks jumlah penduduk, dan indeks kemahalan konstruksi. Dengan pemberian

¹ Kapasitas fiskal daerah dihitung dari penjumlahan variabel PAD dan dana bagi hasil.

bobot seperti itu, maka daerah yang diuntungkan adalah daerah yang memiliki jumlah penduduk besar dan daerah yang tingkat kemahalan harga prasarana fisiknya secara relatif tinggi. Sedangkan daerah dengan indeks pembangunan manusia yang cukup tinggi, artinya sudah cukup berhasil melakukan pembangunan dengan paradigma *human centered development*, merasa dirugikan karena diberi bobot yang kecil, yaitu sebesar 10%. Daerah dengan kinerja aspek perekonomian yang cukup tinggi, dicerminkan dengan PDRB per kapita yang cukup tinggi, juga merasa dirugikan karena hanya diberi bobot sebesar 15%. Sehingga dengan demikian perhitungan kebutuhan fiskal dinilai kurang memberikan efek pemerataan dan keadilan.

Upaya mengalokasikan DAU agar semua pihak puas memang sulit dipenuhi. Dalam pelaksanaan pengalokasian DAU dari tahun 2001 hingga sekarang, selalu muncul ketidakpuasan dari sejumlah daerah. Daerah-daerah yang merasa tidak puas tersebut umumnya yang menerima DAU relatif kecil sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan fiskal daerahnya.

Kebijakan *hold harmless* yang menghendaki tidak adanya daerah yang memperoleh DAU lebih kecil daripada DAU yang diterimanya pada tahun sebelumnya, mulai dilaksanakan sejak tahun 2002. Hal ini dilakukan sejalan dengan tuntutan politis agar penerimaan DAU daerah minimal sama dengan penerimaan DAU tahun sebelumnya. Berkaitan dengan itu, dalam APBN 2002 disediakan dana penyeimbang yang dialokasikan secara proporsional kepada daerah-daerah yang seharusnya berdasarkan perhitungan DAU hasil formula murni mengalami penurunan DAU dalam tahun yang bersangkutan. Dengan adanya kebijakan *hold harmless* ini, maka daerah tidak mengalami penurunan dalam penerimaan DAU. Kebijakan *hold harmless* tersebut tidak sejalan dengan tujuan untuk memperkecil ketidakseimbangan antardaerah.

Rencana penerapan formula murni diharapkan dapat lebih mudah untuk dilaksanakan, meskipun tuntutan politis untuk mempertahankan, bahkan terus meningkatkan perolehan DAU bagi seluruh daerah nampaknya masih cukup tinggi. Dengan demikian keberhasilan penerapan formula murni mulai tahun 2008

sangat ditentukan oleh *political will* pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta DPR-RI dalam upaya mengoptimalkan alokasi DAU bagi seluruh daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana dampak/pengaruh pencabutan kebijakan *holdharmless* DAU terhadap kesenjangan fiskal antardaerah dengan memperhitungkan secara relatif terhadap jumlah penduduk
- 2) Seberapa besar pengaruh bobot pada masing-masing variabel formula DAU dalam rangka meningkatkan fungsi DAU sebagai *tools* guna meminimalkan ketimpangan fiskal antar daerah.
- 3) Dalam tesis ini penulis menggunakan 2 (dua) istilah DAU, yaitu DAU formula dan DAU perpres. Dana Alokasi Umum Formula adalah DAU yang dihitung oleh Departemen Keuangan R.I sesuai dengan formula murni berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tahun 2005, sedangkan DAU Perpres adalah alokasi DAU yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden setelah mendapat persetujuan dari DPR RI

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui dampak/pengaruh pencabutan kebijakan *holdharmless* terhadap kesenjangan fiskal antardaerah dengan memperhitungkan secara relatif terhadap jumlah penduduk
- 2) Mengetahui seberapa besar pengaruh bobot pada masing-masing variabel formula DAU dalam rangka meningkatkan fungsi DAU sebagai *tools* guna meminimalkan ketimpangan fiskal antardaerah

1.4. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis adalah sebagai berikut:

- 1) Uji Indeks Williamson yang bertujuan untuk mengetahui dampak pencabutan kebijakan *hold harmless* terhadap kesenjangan fiskal antar daerah dengan memperhitungkan secara relatif terhadap jumlah penduduk.
- 2) Regresi Berganda untuk mengetahui signifikansi masing-masing variabel formula DAU dalam pengalokasian DAU.
- 3) Regresi Berganda Terboboti untuk mengetahui seberapa besar peran masing-masing variabel formula DAU dalam pengalokasian DAU.

1.5. Hipotesis

Hipotesis dalam penulisan tesis ini adalah:

- 1) Akibat penerapan formula murni DAU atau pencabutan kebijakan *hold harmless* akan semakin memperkecil kesenjangan fiskal antardaerah
- 2) Bobot yang selama ini digunakan pada masing-masing variabel dalam formula DAU belum mencerminkan fungsi DAU sebagai alat untuk memperkecil kesenjangan fiskal.

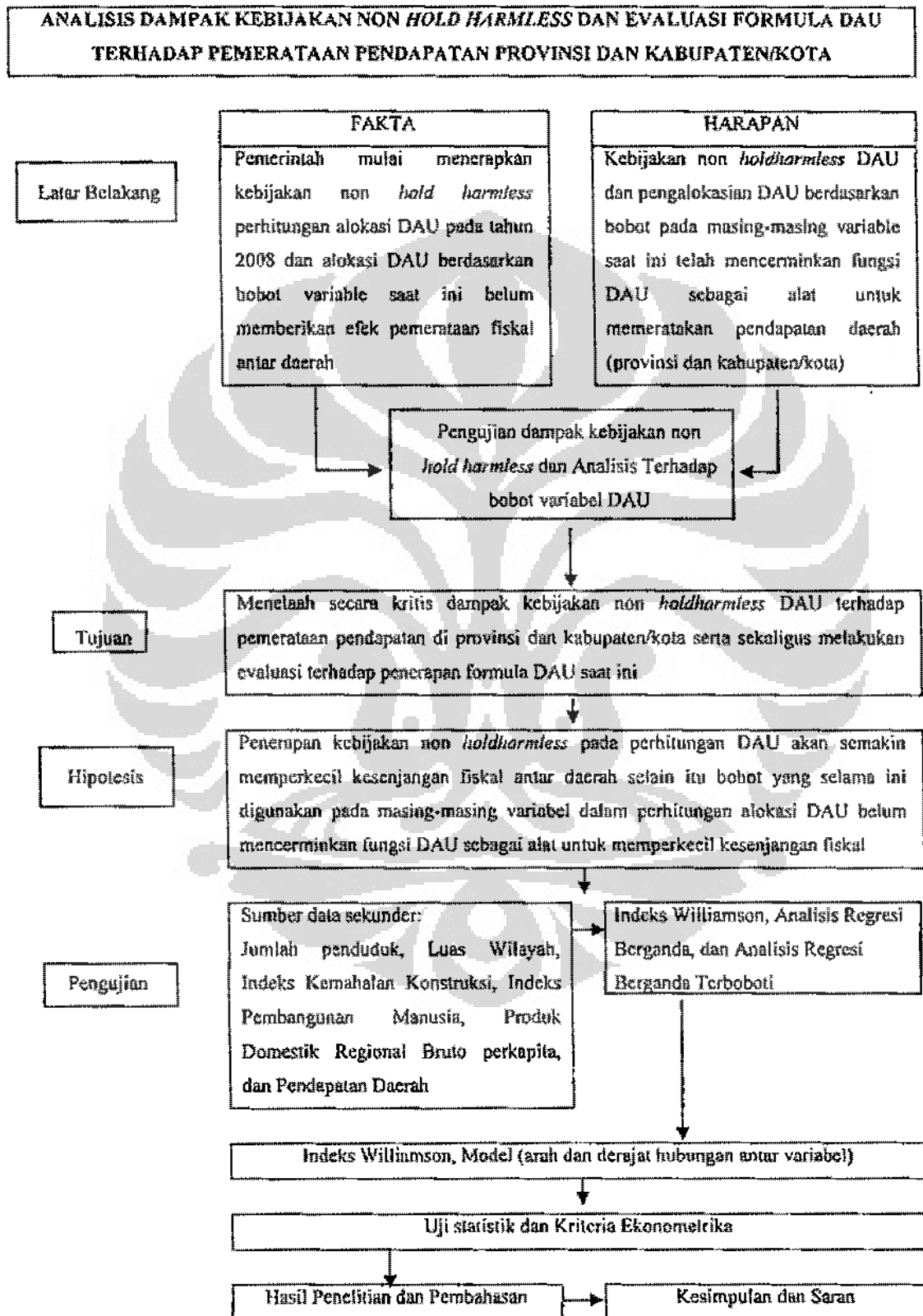
1.6. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini secara umum dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1) Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu kebijakan publik, pengambil kebijakan serta peminat masalah-masalah perekonomian daerah, khususnya yang berkaitan dengan bidang desentralisasi fiskal
- 2) Sebagai bahan referensi penelitian lainnya yang berkaitan dengan bidang desentralisasi fiskal dan kesenjangan ekonomi regional di Indonesia

1.7. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian dalam tesis ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II Tinjauan Pustaka, berisikan tinjauan sistem transfer pusat ke daerah, baik yang bersifat teori maupun studi empirik. Dalam bagian ini juga dijelaskan tentang praktik transfer pemerintah pusat kepada daerah di Indonesia dalam era otonomi daerah

Bab III Metodologi Penelitian, berisikan detail metoda penelitian dan analisis yang digunakan dalam studi ini. Mulai dari jenis dan sumber data, ruang lingkup penelitian, metoda pengukuran kesenjangan fiskal, dan model ekonometri secara detail (beserta uji statistik yang akan dilakukan)

Bab IV Hasil dan Pembahasan, berisikan hasil uji kuantitatif dan hasil estimasi regresi serta analisa dampak pencabutan kebijakan *hold harmless* terhadap pemerataan pendapatan baik di provinsi maupun kabupaten/kota dan juga analisa terhadap hubungan masing-masing variabel DAU dengan pengalokasian DAU di provinsi dan kabupaten/kota.

Bab V Kesimpulan dan saran, berisikan kesimpulan dari hasil penelitian beserta rekomendasi kebijakan, dan keterbatasan studi beserta saran untuk studi lanjutan

Daftar Referensi berupa Daftar Kepustakaan beserta Lampiran. Daftar Kepustakaan berisikan referensi atau publikasi/buku yang dipergunakan sebagai acuan dan rujukan kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan Lampiran terdiri dari lampiran tabel statistik dan hasil perhitungan parameter indeks, beserta penjelasan teknis yang dianggap penting untuk ditampilkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Pengalaman Internasional Terhadap Sistem Transfer Pusat Kepada Daerah

Salah satu fungsi utama pemerintah menurut Musgrave adalah fungsi distribusi (Musgrave 1959). Kekuatan dan mekanisme pasar diyakini tidak akan pernah menghasilkan distribusi pendapatan yang merata. Padahal distribusi pendapatan yang relatif merata merupakan suatu fenomena yang diinginkan oleh masyarakat secara umum. Karenanya tugas pemerintah adalah memastikan bahwa terdapat pembagian pendapatan yang lebih merata diantara kelompok-kelompok masyarakat.

Dalam sistem pemerintahan yang terdiri dari beberapa tingkatan pemerintahan (*multi-level government*), teori awal *fiscal federalism* mengatakan bahwa pemerintah pusat seyogyanya memainkan peranan utama dalam melakukan redistribusi pendapatan (Oates 2005). Sistem *multi-level government* juga biasanya memiliki aktifitas redistribusi yang lain, yaitu pemerataan fiskal (*fiscal equalization*). Prinsip utamanya adalah transfer dari daerah yang lebih kaya kepada daerah yang lebih miskin sedemikian rupa sehingga setiap daerah memiliki kemampuan yang kurang lebih sama untuk menyediakan sejumlah layanan publik. Jumlah dan kualitas layanan publik yang sama di setiap daerah sering menjadi kunci dari konsep pemerataan antar daerah.

Alasan lain mengapa pemerintah perlu melakukan intervensi di perekonomian adalah untuk menyediakan perlindungan sosial. Masyarakat menginginkan adanya perlindungan sosial dari resiko kemiskinan di usia tua, resiko kesehatan, dan resiko pengangguran dalam jangka waktu yang lama. Gramlich (1990) menyatakan bahwa penyediaan skema perlindungan sosial akan lebih efisien dilakukan oleh pemerintah pusat. Apalagi ditambah dengan kemungkinan terjadinya mobilitas orang antar daerah.

Pada sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik, berbagai kebijakan ditentukan secara nasional oleh pusat. Anggaran belanja pemerintah daerah sangat tergantung pada alokasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, termasuk dalam pemanfaatannya. Sistem pemerintahan yang bersifat desentralistik berkembang sejak dua dasawarsa terakhir ini, baik di Negara maju maupun di Negara-negara berkembang. Bagi Negara-negara berkembang, jalan desentralisasi ditempuh untuk melepaskan diri dari perangkat pengelolaan pemerintahan yang tidak efektif dan tidak efisien, ketidakstabilan ekonomi makro, dan tidak memadainya pertumbuhan ekonomi. Dalam pemerintahan yang desentralistik, pemanfaatan alokasi dana yang diberikan oleh pusat lebih banyak ditentukan oleh daerah atau berupa *block grant*.

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyangkut pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu antar tingkatan pemerintah, dan pembagian sumber penerimaan untuk menutupi pengeluaran akibat kegiatan-kegiatan tersebut¹. Dalam hubungan dengan penerapan kebijakan fiskal tersebut, kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah, antara negara yang satu dengan negara lainnya berbeda. Perbedaan bentuk negara, misalnya antara negara federal seperti India dengan negara kesatuan seperti Indonesia, menghasilkan hubungan keuangan pusat dan daerah yang berbeda pula. Di satu sisi ada negara dengan kewenangan fiskal pemerintah daerah yang sangat besar, sementara di sisi lain justru kewenangan pemerintah pusat sangat dominan. Di Amerika Serikat, yang bersistem federal dan ditandai dengan sejumlah tingkatan pemerintahan (federal/pusat, *state*, dan lokal), peran Pemerintah pusat relatif kecil. Peran negara bagian pemerintahan lokal sangat besar dalam penyediaan jasa publik dan dalam meningkatkan pendapatan daerahnya. Hal yang sama juga terjadi dengan Pemerintah Australia. Sedangkan negara kesatuan seperti Inggris dan Perancis, kewenangan pemerintah daerah relatif terbatas atau dibatasi².

¹ Kenneth Davey, 1989, "Hubungan Keuangan Pusat-Daerah di Indonesia". Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, UI Press, Jakarta.

² Robert Simanjuntak, 1999, "Penerapan Fiskal Federalism di Indonesia", Makalah pada Seminar Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan Potensi Daerah, ISEI, Yogyakarta

Bentuk pemerintahan suatu negara, baik itu negara federal maupun negara kesatuan (*unitary*), akan selalu memunculkan persoalan pola hubungan fiskal antar pemerintahan (*fiscal intergovernmental relationships*). Menurut Bird dan Vaillancourt (1998) terdapat dua model hubungan fiskal antara pemerintahan yang berlaku saat ini. Pertama, federalisme fiskal (*fiscal federalism*). Kedua, keuangan federal (*federal finance*).

Dalam model federalisme fiskal, konsentrasi kekuasaan di pusat demikian tinggi. Dalam perspektif ini, kerangka yang sesuai untuk desentralisasi adalah bersifat *top down* dan berpola dekonsentrasi³ atau maksimalnya berpola delegasi⁴, dan kerangka analisis yang sesuai adalah *agency theory*⁵. Implikasi dari hubungan fiskal model federalisme fiskal ini adalah berbagai bentuk transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka untuk menggalakkan ekonomi regional dan untuk memperbaiki infrastruktur lokal, biasanya akan dibelanjakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan pedoman dan sektor-sektor yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Federalisme fiskal maksudnya adalah pemerintah daerah merupakan kepanjangan tangan dari pusat. Atau, di beberapa negara yang berbentuk federal, pemerintahan negara bagian (*state*) bukan merupakan pelaku otonom. Perancis dan Inggris mencerminkan pola ini untuk kelompok negara-negara maju (Benent, 1990), sementara Indonesia (sebelum keluarnya UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999), Maroko, dan Tunisia adalah untuk negara berkembang, serta Cina dan Vietnam adalah contoh negara transisi (Bank Dunia, 1996).

Berbeda dengan model federalisme fiskal, model keuangan federal (*federal finance*) lebih cocok diterapkan untuk beberapa negara, terutama negara-negara

³ Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah.

⁴ Delegasi adalah pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar struktur birokrasi reguler yang dikontrol secara tidak langsung oleh pemerintah pusat. Pendelegasian wewenang ini biasanya diatur dengan ketentuan perundang-undangan. Pihak yang menerima wewenang mempunyai keleluasaan (*discretion*) dalam penyelenggaraan pendelegasian tersebut, walaupun wewenang terakhir tetap pada pihak pemberi wewenang (*sovereign-authority*).

⁵ Menurut teori ini, *principal* (pemerintah pusat) dapat secara sepihak menentukan dan mengubah baik tanggung jawab pengeluaran maupun pendapatan pemerintah daerah dan pengaturan hubungan keuangan antar pemerintahan dalam upaya mengatasi permasalahan-permasalahan informasi yang tidak simetris, serta perbedaan-perbedaan tujuan antara *principal* dan *agent* (pemerintah daerah)

yang memiliki keanekaragaman dalam aspek geografis dan etnis (Bird, 1994 serta Bird dan Chen, 1996). Dalam model keuangan federal, batas-batas resmi, penyerahan fungsi, wewenang, serta pembiayaannya sudah secara umum ditetapkan melalui sebuah undang-undang.

Secara teoretis, negara yang berbentuk federal, pada umumnya menganut model keuangan federal. Contoh yang paling aktual adalah Amerika Serikat dan Kanada. Di Amerika Serikat, model hubungan fiskal yang terjadi adalah hubungan fiskal antara pemerintah federal (pusat) dengan pemerintah negara bagian/provinsi (*state*) dan hubungan fiskal antara pemerintah negara bagian/provinsi (*state*) dengan pemerintah lokal (kabupaten/kota)⁶. Di mana, masing-masing pemerintahan negara bagian memiliki kewenangan (otonomi) yang jelas terhadap wilayah, fungsi, serta pembiayaan sesuai dengan konstitusi federal.

Meski secara teoretis negara yang berbentuk federal akan menerapkan model keuangan federal, tetapi pada praktiknya tidak selalu demikian. Menurut Bank Dunia (1995) negara-negara seperti Pakistan, Argentina, dan Afrika Selatan adalah negara-negara berbentuk federal, namun praktiknya sejauh ini masih sentralisasi fiskal dan federalisme fiskal.

Berbagai negara mempunyai metode dan formula yang berbeda dalam menentukan alokasi anggaran dari pusat ke daerah. Alokasi anggaran dari pusat ke daerah secara garis besar ditentukan oleh 2 (dua) faktor, yaitu kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) dan kebutuhan fiskal (*fiscal need*). Kapasitas fiskal mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk mendanai jasa-jasa pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Pengukuran kapasitas fiskal ini bermanfaat untuk menentukan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik bagi penduduknya. Sedangkan kebutuhan fiskal menunjukkan total pengeluaran yang dibutuhkan suatu daerah untuk melaksanakan aktivitas di daerahnya.

⁶ Di Amerika Serikat (yang berbentuk negara federal), *state* dibagi ke dalam *counties* (wilayah kabupaten), *parishes* (suatu wilayah pemerintahan gereja, seperti Louisiana), atau *townships* (kota). Namun, di Amerika Serikat, *counties* merupakan agen utama pemerintahan regional dari pemerintahan provinsi dan memiliki kewenangan (*authority*) independensi yang signifikan.

Dari sudut pandang ekonomi, ada 3 (tiga) alasan untuk melakukan alokasi (transfer) antar pemerintah tersebut⁷. Pertama, terdapat ketidakseimbangan fiskal vertikal (*vertical fiscal imbalance*). Hal ini terjadi karena di banyak negara, seperti di Indonesia, Pemerintah Pusat menguasai pajak-pajak utama, sehingga sumber pajak yang dikuasai daerah tidak memadai untuk mendanai berbagai pengeluarannya. Kedua, adanya ketidakseimbangan fiskal horisontal (*horizontal fiscal imbalance*), yakni perbedaan kapasitas dan kebutuhan fiskal antar daerah. Ketiga, adanya efek pelimpahan antar daerah (*spill-over effect*), yakni adanya eksternalitas ekonomis dan eksternalitas dis-ekonomis dari suatu kegiatan di suatu daerah pada daerah lainnya.

Persoalan yang sering muncul dalam kaitannya dengan alokasi dana dari pusat adalah formula yang digunakan, khususnya dalam rangka mewujudkan pemerataan antar daerah. Perbedaan sumber daya dan potensi ekonomi mengakibatkan tidak memungkinkannya pengalokasian dana dalam jumlah yang sama antar daerah. Masalah formula alokasi dari pusat ke daerah ini menjadi perdebatan sengit, baik secara akademis maupun praktis.

2.1.1 Tinjauan Teori Transfer Dari Pusat ke Daerah

Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat oleh daerah memerlukan sejumlah pendanaan. Pendanaan tersebut harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Kebijaksanaan untuk menyediakan pendanaan sejalan dengan prinsip *money follows function*. Artinya hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggungjawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.

Salah satu sumber pendanaan yang dapat diberikan kepada daerah adalah dengan memberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*revenue*

⁷ Ma, Jun, 1997, "Intergovernmental Fiskal Transfer: A Comparison of Nine Countries". Paper Prepared for Macroeconomic Management and Policy Division, Economic Development Institute. The World Bank.

assignment). Sumber lainnya untuk menambah penerimaan daerah adalah dengan memberikan bantuan transfer dana (*grant*).

Satu alasan utama mengapa peran dana transfer dari pusat sedemikian pentingnya untuk pemerintah daerah adalah untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri. Perlu diketahui bahwa kondisi keuangan dan ekonomi daerah-daerah di banyak negara di dunia cenderung tidak merata, sehingga perlu peran pemerintah pusat untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah tersebut. Oleh karena itu, desain transfer sangat penting (Simanjutak, 2002).

Pada dasarnya, transfer pusat ke daerah dapat dibedakan atas bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*) dan bantuan (*grants*)⁸. Adapun tujuan dari transfer ini bermacam-macam yaitu:

a. Transfer Pemerataan Vertikal (*Vertical Equalization Transfer*)

Di banyak negara, pemerintah pusat menguasai sebagian besar sumber-sumber penerimaan sedangkan pemerintah daerah hanya menguasai sebagian kecil sumber-sumber penerimaan. Pemerintah daerah hanya berwenang untuk memungut pajak-pajak yang basis pajaknya bersifat lokal dan mobilitas yang rendah dengan karakteristik besaran penerimaannya relatif kurang signifikan. Kondisi ini akhirnya menimbulkan ketimpangan fiskal vertikal (*vertical fiscal imbalance*) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sementara tugas pemerintah daerah relatif lebih banyak daripada pemerintah pusat. Kekurangan sumber penerimaan daerah relatif terhadap kewajibannya ini menyebabkan dibutuhkan transfer dana dari pemerintah pusat.

Dengan demikian, tujuan dari transfer ini adalah untuk mengoreksi kesenjangan fiskal pada setiap level pemerintahan.

b. Transfer Pemerataan Horizontal (*Horizontal Equalization Transfer*)

Keseimbangan antara kebutuhan belanja (*expenditure needs*) dengan kemampuan untuk menghasilkan penerimaan (*revenue capacity*) juga memiliki

⁸ Di Indonesia, dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah lazim dikenal dengan nama Dana Perimbangan, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

dimensi horizontal. Artinya, dengan tarif pajak yang sama seharusnya juga menghasilkan penerimaan yang sama di antara daerah. Pengalaman empirik di berbagai negara menunjukkan ternyata kemampuan daerah untuk menghasilkan penerimaan dan kebutuhan belanjanya sangat bervariasi, tergantung kondisi daerah bersangkutan. Kondisi ini berimplikasi kepada terciptanya *horizontal fiscal imbalance*.

c. Koreksi Atas Penyebaran Eksternalitas (*Correcting Spatial Externalities*)

Beberapa jenis pelayanan publik di satu wilayah memiliki “efek menyebar” (atau eksternalitas) ke wilayah-wilayah lainnya. Misalnya, pendidikan tinggi (universitas), pemadam kebakaran, jalan raya penghubung antar daerah, sistem pengendali polusi (udara dan air), dan rumah sakit daerah, tidak bisa dibatasi manfaatnya hanya untuk masyarakat di mana pelayanan publik itu tersedia.

Namun, tanpa adanya “imbalan” (dalam bentuk penerimaan) yang berarti dari pelayanan publik di atas, biasanya pemerintah daerah enggan untuk berinvestasi di sini. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu memberikan semacam insentif ataupun menyerahkan sumber-sumber keuangan agar pelayanan-pelayanan publik demikian dapat dipenuhi oleh daerah.

d. Mengarahkan Prioritas (*Redirecting Priorities*)

Setiap level pemerintahan memiliki prioritas masing-masing di dalam penyediaan pelayanan publik kepada masyarakatnya, seringkali prioritas setiap level pemerintahan tersebut bertentangan dengan prioritas level pemerintahan lainnya. Misalnya, pemerintah pusat berkeinginan mengedepankan pembangunan di sektor pendidikan secara murah dan terjangkau. Ini terkait dengan pemenuhan harapan para konstituen pemilih ketika pemilihan umum berlangsung. Namun ternyata, keinginan tersebut tidak sinkron dengan pola kebijakan daerah. Pemerintah daerah ternyata menginginkan pembangunan di sektor kesehatan lebih mendapat prioritas karena pertimbangan kondisi masyarakat setempat. Agar keinginan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat berjalan secara paralel, maka pemerintah pusat memberikan transfer kepada daerah. Transfer tersebut bertujuan memberi insentif kepada daerah dalam mengarahkan kembali prioritas

daerah dan pusat sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh masing-masing level pemerintahan.

e. Eksperimen Ide-Ide Baru (*Experimenting with New Ideas*)

Bantuan (*grants*) seperti ini berawal dari adanya keinginan pemerintah pusat untuk mengujicobakan suatu program baru di suatu daerah, sebelum program tersebut diberlakukan terhadap seluruh daerah. Alasan perlunya bantuan dari pusat ke daerah sehubungan dengan uji coba program baru tersebut, karena daerah yang menjadi tempat uji coba tidak mau menanggung kerugian dan risiko manakala terjadi dampak negatif terhadap program baru tersebut. Dengan demikian, sesungguhnya bantuan untuk tujuan uji coba program baru ini tidak lebih dari sebuah kompensasi atas kesediaan daerah menjadi ajang uji coba suatu program baru dari pusat.

f. Stabilisasi

Transfer dana dapat ditingkatkan oleh pemerintah ketika aktivitas perekonomian sedang lesu. Di saat lain, bisa saja dana transfer ke daerah dikurangi manakala perekonomian sedang booming. Transfer untuk dana-dana pembangunan (*capital grants*) adalah merupakan instrumen yang cocok untuk tujuan ini. Namun kecermatan dalam mengkalkulasi amat diperlukan agar tindakan menaikkan/menurunkan dana transfer itu berakibat merusak atau bertentangan dengan tujuan stabilisasi.

g. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum

Daerah-daerah dengan sumber daya yang sedikit memerlukan subsidi agar dapat mencapai standar pelayanan minimum. Jika dikaitkan dengan postulat Musgrave (1983) yang menyatakan bahwa peran redistributif dari sektor publik akan dijalankan oleh pemerintah pusat, maka dengan adanya transfer, penerapan standar pelayanan minimum di setiap daerah pun akan lebih bisa dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah pusat.

Pengalaman empiris di berbagai negara menunjukkan bahwa pemberian transfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat disertai dengan

syarat-syarat tertentu atau tidak bersyarat sama sekali. Dengan demikian, pada dasarnya jenis-jenis transfer dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu:

a. **Transfer dengan syarat (*conditional grant, categorial grant, specific purpose grant*)**

Transfer ini biasanya digunakan untuk keperluan yang dianggap penting oleh pemerintah pusat namun kurang dianggap penting oleh daerah. Contohnya adalah pembangunan fasilitas pelayanan publik yang menimbulkan eksternalitas positif bagi daerah-daerah lain di sekitarnya ataupun pembangunan fasilitas dari pemerintah pusat yang sifatnya ujicoba atas suatu program atau ide baru (*experimenting with new ideas*).

Transfer ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

- Transfer pengimbang (*matching grants*), yaitu transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk menutup sebagian atau seluruh kekurangan pendanaan satu jenis urusan tertentu. Jadi, di sini pemerintah daerah telah mengalokasikan sejumlah dana dari pendapatan daerahnya untuk penyelenggaraan urusan tersebut dengan baik. Transfer dari pemerintah pusat dalam hal ini berfungsi untuk membantu mengatasi kekurangan dana tersebut. Transfer pengimbang ini juga dapat dibedakan menjadi dua jenis:
 - (a) transfer pengimbang tidak terbatas (*open-ended matching grants*), di mana transfer ini diperuntukkan apabila transfer tersebut dapat dan memang ditujukan untuk menutup seluruh kekurangan dana yang terjadi. Misalnya, sebuah proyek pembangunan universitas membutuhkan dana sekitar Rp100 miliar. Sementara itu, daerah hanya mampu menyediakan dana sebesar 10% dari total kebutuhan dana atau sekitar Rp10 miliar. Maka, kekurangan tersebut, yaitu sebesar Rp90 miliar ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat;
 - (b) transfer pengimbang terbatas (*closed-ended matching grants*), di mana pada transfer ini terdapat batasan jumlah dana maksimum yang dapat digunakan. Hal ini sangat disukai oleh pemberi bantuan (pemerintah pusat), karena walaupun dana yang diberikan sesuai dengan besar proyek, namun setelah besarnya biaya proyek melampaui jumlah

tertentu, pemberi bantuan dapat mencukupkan bantuannya. Seperti contoh di atas, jika dalam perkembangan proyek universitas ternyata membengkak menjadi Rp110 miliar atau mengalami kekurangan Rp10 miliar lagi, maka dengan sendirinya proyek tersebut harus disesuaikan dengan jumlah anggaran semula yaitu Rp100 miliar.

- Transfer bukan pengimbang (*non-matching grants*), yaitu transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk menambah dana penyelenggaraan suatu jenis urusan tertentu, tanpa mempertimbangkan bahwa pemerintah daerah sendiri telah/akan mengalokasikan dananya dengan jumlah besar atau kecil. Jenis transfer ini dapat dipakai oleh pemerintah pusat untuk menjadi sarana menginternalisasikan limpahan manfaat (eksternalitas) terutama kepada daerah yang menghasilkan limpahan manfaat tersebut.

Jadi, kendati pemerintah daerah yang bersangkutan telah mengalokasikan penerimaan daerahnya (*local revenue*) untuk pembiayaan penyelenggaraan urusan tersebut, namun karena pelaksanaannya menghasilkan limpahan manfaat besar kepada daerah-daerah lain, maka transfer tetap diberikan oleh pusat untuk mendorong daerah agar tetap bersemangat dan mau mengalokasikan penerimaan daerahnya untuk pelaksanaan fungsi tersebut.

b. Transfer tanpa syarat (*unconditional grant, general purpose grant, block grant*)

Pada umumnya transfer tanpa syarat ditujukan untuk menjamin adanya kemampuan fiskal daerah, sehingga setiap daerah dapat melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri pada tingkat yang layak, Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal yang bersifat horizontal (*horizontal fiscal equalization*).

Ciri utama dari transfer ini adalah daerah memiliki keleluasan (diskresi) penuh dalam memanfaatkan dana transfer sesuai dengan pertimbangan-pertimbangannya sendiri, atau sesuai dengan aturan apa yang menjadi prioritas daerahnya. Sampai saat ini, perdebatan sengit di kalangan pakar maupun praktisi keuangan publik menyangkut penentuan formula transfer tanpa syarat

(*unconditional grant, general purpose grant, block grant*) atau yang di Indonesia disebut DAU, masih terus berlangsung.

Tabel 2-1
Matriks Beberapa Substansi Formula

Sumber Acuan	Substansi Formula	Keterangan
Musgrave dan Musgrave (1987)	Melalui penghitungan posisi fiskal atau rasio kapasitas fiskal dengan kebutuhan fiskal	Transfer diberikan apabila posisi fiskal < 1
Rafuse (2000)	Melalui penghitungan biaya per kapita atas jasa publik dan kemampuan penyediaan dana per kapita oleh daerah	Transfer diberikan berdasarkan kesenjangan antara kebutuhan jasa perkapita dengan penyediaan per kapita
Ma (1997)	Melalui pendekatan fiskal, dengan memasukkan pula transfer yang bersifat khusus (<i>specific grants</i>)	Merupakan rumus umum celah fiskal. Supaya total transfer cocok dengan dana yang tersedia di pusat (<i>pool</i>), hanya sebagian celah fiskal yang bisa dipenuhi
LPEM-UI (2000); PP 104/2000	Melalui pendekatan celah fiskal	Penetapan variabel sesuai UU 25/1999. Bobot masing-masing variabel sama.
MEP-UGM (2001)	Melalui pendekatan celah fiskal	Penetapan variabel mengacu pada UU 25/1999. Bobot masing-masing variabel ditetapkan dengan proporsional, ekonometrik, dan campuran
CIDES (1999)	Melalui penghitungan Indeks Perimbangan	Variabel yang digunakan didasarkan pada TAP MPR No. XV/1998
AHP (Bappenas, PPE-UGM, PAU SE-UGM, Bambang K dan Yanssekardias, 2000)	Melalui pendekatan celah fiskal yang dihitung dari penjumlahan kebutuhan fiskal dengan invers kapasitas fiskal	Penetapan bobot masing-masing variabel berdasarkan <i>expert judgement</i>
Depkeu bersama UI, UGM, Unhas, dan Unand (2001)	Melalui pendekatan celah fiskal	Variabel yang digunakan mengacu pada UU 25/1999. bobot variabel ditetapkan secara proporsional dan ekonometrika
<i>Interstate equalization payment</i> (Shah, 1994)	Semua pajak penting diterapkan sistem bagi hasil antara federal dengan negara bagian. Kemudian dihitung selisih antara kapasitas fiskal dengan kebutuhannya	Jika E_{ij} positif, maka negara bagian harus memberikan transfer untuk dana keseimbangan; dan jika E_{ij} negatif negara bagian menerima alokasi dana keseimbangan.
Hamid (2005)	Melalui pendekatan celah fiskal	Penetapan variabel sesuai UU 25/1999 ditambah dengan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sumber: Kompilasi oleh penulis

2.1.2 Pengalaman Internasional Transfer Pusat Kepada Daerah

Dalam bagian ini akan dijelaskan pengalaman negara-negara lain dalam melakukan transfer dari pusat ke daerah. Satu hal yang menarik adalah bahwa ternyata tidak ada satu pola atau sistem yang bisa dijadikan acuan oleh seluruh negara di dunia. Transfer dari pusat ke daerah pada umumnya dibagikan berdasarkan suatu formula tertentu. Namun, formula bagaimana yang tepat amat tergantung kepada kondisi atau keadaan di masing-masing negara. Situasi dan kondisi politik suatu negara bersangkutan ternyata sangat mempengaruhi desain atau sistem transfer pusat ke daerah yang diterapkan.

Formula DAU mungkin berbeda dengan model alokasi IRA (*Internal Revenue Allotment*) yang merupakan dana transfer di negara Filipina. Negara Filipina mengalokasikan dana transfer hanya berdasarkan pada kebutuhan fiskal saja, yaitu menggunakan variabel luas wilayah dan jumlah penduduk. Formula DAU juga mungkin berbeda dengan alokasi transfer di Kanada. Alokasi transfer di Kanada hanya berdasarkan pada kemampuan pemungutan pajak daerah (sisi kapasitas fiskal daerah) saja.

India secara garis besar mengalokasikan transfer pusat ke daerah dengan berdasarkan pada: jumlah penduduk (20%), jarak perbedaan pendapatan per kapita dengan negara bagian yang tertinggi (60%), kondisi infrastruktur daerah (5%), luas wilayah (5%), dan *tax effort* atau rasio antara pendapatan sendiri per kapita dengan pendapatan per kapita kuadrat (10%).

Afrika Selatan mengalokasikan dana kepada provinsi lebih besar daripada pemerintah daerah (*municipalities*) karena kapasitas fiskal provinsi cenderung lebih kecil disamping juga merupakan tugas provinsi untuk menyediakan banyak pelayanan publik. Formula pemerataan (*equitable share formula*) untuk provinsi mencakup bagian untuk pendidikan usia sekolah 6-17 tahun (41%), kesehatan (19%), jaminan sosial (17%), aktivitas ekonomi di daerah (8%), jumlah penduduk (7%), komponen "keterbelakangan" (3%) dan bagi rata yang merupakan komponen institusional (5%).

Brazil mengalokasikan transfer dari pusat kepada negara bagian dan pemerintah daerah (*municipalities*) yang bersumber dari PPh dan PPN barang-

barang industri. Dana untuk negara bagian dibagikan berdasarkan jumlah penduduk dan pendapatan per kapita (95%) dan berdasarkan luas wilayah (5%). Sementara dana untuk pemerintah daerah dibagikan dengan pertimbangan: bagi ibukota negara bagian menggunakan penduduk dan pendapatan per kapita (10%) dan kepada pemerintah daerah lain yang bukan ibukota negara bagian berdasarkan penduduk (90%).

Amerika Serikat mengalokasikan transfer kepada negara bagian yang diarahkan terutama untuk pendidikan, perumahan, fasilitas kebersihan, dan konstruksi lapangan terbang. Transfer ini lebih merupakan bantuan bersyarat karena persoalan utama yang terjadi adalah pada ketidaksamaan tingkat pelayanan masyarakat antar-daerah/wilayah dan bukan pada ketimpangan fiskal.

Australia menggunakan kesenjangan fiskal sebagai dasar alokasi transfer dari pusat yang dihitung dari selisih pengeluaran yang distandarkan (*standardized expenditure*) dengan penerimaan yang distandarkan (*standardize revenue*). Pengeluaran yang distandarkan tersebut dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, komposisi penduduk, faktor lintas-batas, lokasi penduduk, faktor-faktor demografi lainnya, skala administrasi, skala penyediaan pelayanan publik, dan biaya-biaya input. Sedangkan penerimaan terstandar diperkirakan dengan memperhatikan basis pajak daerah dan *standard revenue effort* dengan berbagai penyesuaian.

Jepang memiliki mengalokasikan *block grant* yang disebut sebagai *Local Allocation Tax (LAT)*. Pengalokasian LAT untuk pemerintah daerah sebesar 94% yang dihitung berdasarkan kesenjangan fiskal daerah tersebut, yaitu kebutuhan fiskal dikurangi estimasi total penerimaan tiap daerah. Dana talangan bisa dimasukkan dalam LAT. Skema talangan dimasukkan dalam perhitungan kebutuhan fiskal standar yang didasarkan pada formulasi yang rumit. Sebaliknya peningkatan kapasitas fiskal daerah menyebabkan menurunnya jumlah LAT yang ditransfer ke daerah.

Salah satu jenis transfer di Jerman adalah *interstate equalization payments* yang merupakan transfer langsung antar negara bagian sebagai "kompensasi" terhadap beban khusus yang ditanggung oleh negara bagian tertentu seperti

pengungsi, pemeliharaan pelabuhan, dll. Penghitungannya berdasarkan selisih kapasitas fiskal dikurangi dengan kebutuhan fiskal masing-masing negara bagian.

Spanyol mengadopsi suatu sistem yang dikenal dengan istilah *the common system*. *The common system* menetapkan bahwa sebagian besar pajak jatuh sebagai pajak pusat, daerah dapat memperoleh *equalization grants* yang dihitung utamanya berdasarkan populasi. Konsep ini mengacu pada kebutuhan fiskal.

Secara lengkap ringkasan menyangkut tujuan transfer dan faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk itu di berbagai negara dapat dilihat pada Tabel 2-2 di bawah ini.

Tabel 2-2
Tujuan, Faktor Penentu Alokasi, dan Praktik di Beberapa Negara

Tujuan	Faktor Alokasi	Contoh Negara
Mencapai tingkat kemampuan penyediaan jasa/ pelayanan publik yang sama/mirip	Indikator kebutuhan belanja (<i>expenditure needs</i>): penduduk, anak usia sekolah, lansia, tingkat buta huruf, kemiskinan, kematian bayi, luas wilayah, standar belanja nasional	India, Italia, dan Spanyol
Mencapai tingkat ketersediaan sumber daya fiskal yang sama/mirip	Indikator kapasitas fiskal: PDRB per kapita, atau jumlah pendapatan yang diperoleh dari basis pajak daerah dengan menerapkan tingkat tarif efektif rata-rata; dan <i>tax effort</i> (tingkat sampai dimana daerah memanfaatkan basis pajak yang dimilikinya)	Kanada
Mencapai tingkat kemampuan penyediaan pelayanan publik yang sama/mirip pada tingkat kemampuan perpajakan yang sama	Kesenjangan fiskal (<i>fiscal gap</i>) = kebutuhan belanja – kapasitas fiskal, atau dengan berbagai kombinasi lain dari kebutuhan dan kapasitas	Australia, Cina, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Latvia, Rusia, dan Inggris Raya
Distribusi dengan cara membagi sama per kepala	Jumlah penduduk	Beberapa jenis transfer di Kanada, Ekuador, Estonia, Jerman, Hungaria, dan Inggris
Mengisi/menutupi celah anggaran (<i>budget gap</i>)	Jumlah transfer disini adalah selisih antara jumlah belanja/pengeluaran yang sudah dianggarkan dengan jumlah penerimaan sendiri dan bagi hasil	Beberapa negara bekas pecahan Uni Soviet dan Eropa Timur

Sumber: Jorge Martinez-Vazquez, *Principles for the Design of Equalization Grants*, Indonesia Workshop, May 2001

2.2 Praktik Transfer Pemerintah Pusat Kepada Daerah di Indonesia

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia, dan mengalami proses penyempurnaan yang cukup panjang. Hal ini antara lain tercermin dari telah dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1948 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 1957, dan kemudian disempurnakan dengan UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Selanjutnya, dengan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, dilakukan penyempurnaan kembali atas kebijakan otonomi daerah dengan fokus otonomi pada daerah tingkat II.

Dalam perkembangannya, seiring dengan semakin maraknya tuntutan demokrasi dan otonomi daerah, pada tahun 1999 diterbitkan 2 (dua) UU di bidang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Selanjutnya, berdasarkan hasil kajian dan evaluasi atas pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal selama 5 (lima) tahun, maka sebagai wujud nyata dari komitmen untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, dalam tahun 2004 telah dilakukan penyempurnaan atas UU (UU) No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

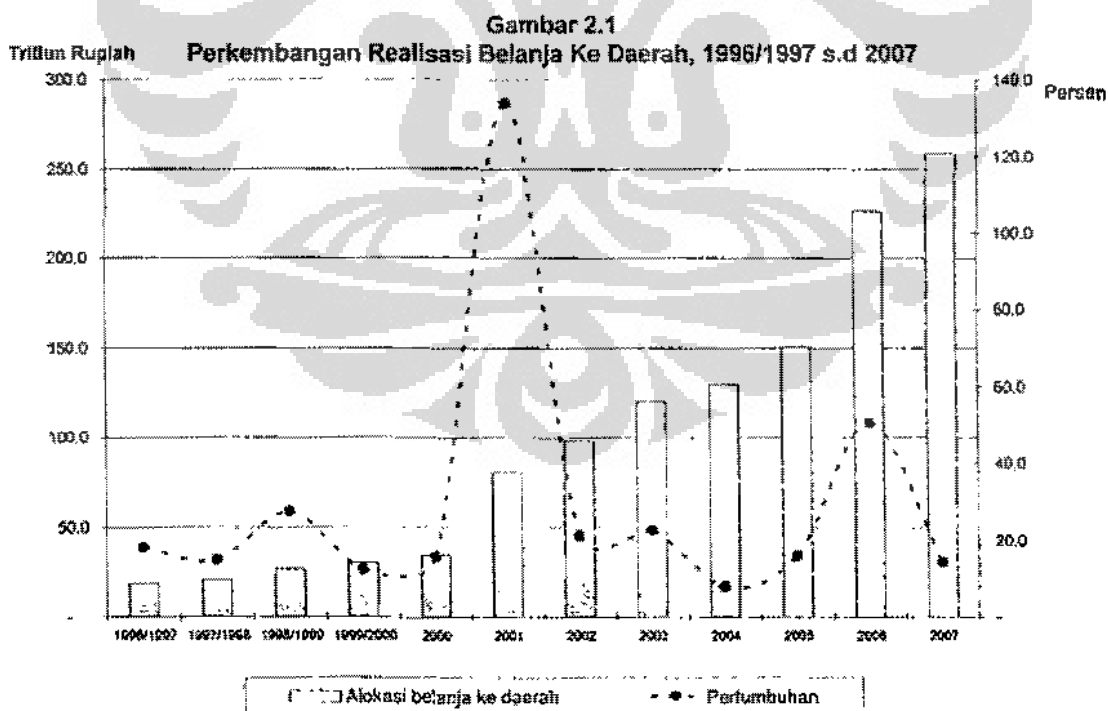
Satu hal penting yang harus dipahami adalah bahwa desentralisasi fiskal bukan merupakan suatu tujuan, tetapi merupakan suatu instrumen. Desentralisasi fiskal adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola pembangunan guna mendorong perekonomian daerah maupun nasional. Melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih baik diharapkan akan tercipta kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah yang berujung pada kesejahteraan masyarakat.

Peranan pemerintah daerah di Indonesia dapat dianggap sangat dominan sejak digulirkannya era otonomi daerah pada tahun 2001. Sebagai implikasi dari

pemberian kewenangan yang semakin luas kepada daerah, daerah dituntut untuk dapat secara mandiri melaksanakan pembangunan, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaannya sesuai prinsip-prinsip otonomi daerah. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut dilakukan dengan prinsip *money follow function*.

Sebagai salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kebijakan fiskal pemerintah, kebijakan alokasi anggaran belanja ke daerah sejak tahun 2001 diarahkan antara lain untuk: (i) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; (ii) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat; (iii) mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*); (iv) meningkatkan pelayanan publik; serta (v) meningkatkan efisiensi melalui anggaran berbasis kinerja yang sejalan dengan format APBN.

Perbandingan antara jumlah nominal dan pertumbuhan realisasi belanja ke daerah sebelum dan setelah dilaksanakannya kebijakan desentralisasi fiskal tahun 2001 dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Sumber: Nota Keuangan TA 2008

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah. Di Indonesia, pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah tersebut dilakukan melalui instrumen yang disebut dana perimbangan.

Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah.

Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di Daerah tertentu yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-Daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi Daerah. DAU juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal daerah dalam mendanai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang signifikan, khususnya untuk daerah kurang potensial Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini terlihat dari porsi DAU yang relatif lebih besar sumber-sumber penerimaan daerah lainnya di daerah-daerah tersebut. Dengan adanya DAU ini diharapkan kemampuan keuangan daerah cukup untuk

membayai pengeluaran, setelah pengeluaran tersebut juga dibiayai oleh PAD dan bagi hasil. Karena pembagian dana bagian daerah melalui bagi hasil (*revenue sharing*) cenderung menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*), maka diharapkan DAU dapat memperkecil variasi ketimpangan fiskal antar daerah akibat pembagian dana bagi hasil tersebut.

DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan fiskal daerah (*fiscal need*)⁹ dan kapasitas fiskal daerah (*fiscal capacity*)¹⁰. Daerah yang kapasitas fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh DAU kecil. Sebaliknya, daerah yang kapasitas fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh DAU besar. Pendekatan celah fiskal ini, secara matematis, memungkinkan adanya daerah yang tidak menerima DAU, yaitu daerah yang relatif sudah dianggap mampu dari segi kapasitas fiskal.

2.2.1 Kebijakan Pembagian Transfer DAU di Indonesia

Peran DAU sebagai instrument untuk mengatasi kesenjangan horizontal (*horizontal imbalance*) mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini tercermin antara lain dari meningkatnya rasio alokasi DAU terhadap penerimaan dalam negeri netto, dari 25% pada periode tahun 2001 hingga 2003, menjadi 25,5% dalam tahun 2004 sampai 2005, dan kemudian menjadi 26% dalam tahun 2006 dan 2007. Dalam kurun waktu tersebut, DAU yang dialokasikan ke provinsi meningkat dari Rp6.034,6 miliar pada tahun 2001 menjadi Rp16.478,7 miliar pada tahun 2007, atau naik rata-rata sebesar 18,2 persen per tahun.

2.2.2 Formulasi DAU di Indonesia

Pengalokasian DAU ke daerah dilakukan dengan menggunakan formula yang didasarkan pada data dasar perhitungan DAU. Berdasarkan konsolidasi data

⁹ Kebutuhan fiskal daerah dihitung dari perkalian pengeluaran rata-rata daerah dengan variabel-variabel indeks penduduk, indeks kemiskinan relatif, indeks luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi.

¹⁰ Kapasitas fiskal daerah dihitung dari penjumlahan variabel PAD dan dana bagi hasil.

dasar perhitungan DAU tersebut selanjutnya dilakukan perhitungan DAU berdasarkan formula. Secara historis sejak tahun 2001 hingga tahun 2005, formula DAU terbagi menjadi 2 (dua) komponen utama, yaitu Alokasi Minimum (AM) dan alokasi DAU berdasarkan Kesenjangan Fiskal (KF). Alokasi Minimum terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu komponen *lumpsum* dan proporsional belanja pegawai. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, pada tahun 2006 komponen AM dan KF tersebut disempurnakan menjadi Alokasi Dasar (AD) dan Celah Fiskal (CF). Alokasi DAU berdasarkan CF tersebut merupakan komponen ekualisasi kemampuan keuangan antar daerah, dengan mempertimbangkan selisih kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Dalam perkembangannya, proporsi komponen AD dan CF dari tahun ke tahun bervariasi. Pada tahun 2002 – 2007, proporsi AM atau AD terhadap DAU secara agregat provinsi dan kabupaten/kota mencapai sekitar 39 – 50 persen, sedangkan bobot CF mencapai sekitar 50 – 61 persen. Semakin besar porsi AD terhadap DAU menunjukkan peran DAU sebagai dana ekualisasi (*equalization grant*), yang ditunjukkan dengan nilai CF, menjadi semakin kecil atau berkurang.

Perumusan kebijakan DAU yang mengacu kepada formula yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Dana Perimbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Celah Fiskal}$$

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

Perhitungan DAU menggunakan formula dengan konsep celah fiskal (*fiscal gap*) yang merupakan selisih antara kebutuhan fiskal daerah (*fiscal need*) dan kapasitas fiskal daerah (*fiscal capacity*).

Dalam perkembangannya, formulasi DAU berdasar celah fiskal tersebut telah mengalami beberapa kali penyesuaian yaitu sebagai berikut:

A. DAU Tahun 2001

Pelaksanaan alokasi DAU 2001 mengacu pada beberapa prinsip antara lain: (i) norma hukum dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 harus dipenuhi, (ii) hubungan antara kebutuhan dan potensi daerah harus jelas, (iii) besarnya DAU 2001 paling tidak sama dengan besarnya bantuan SDO dan Inpres (yang selalu dibagikan setiap tahun sampai dengan tahun 2000), (iv) rumus untuk menentukan alokasi DAU haruslah mudah dipahami dan logis, serta (v) rumus didasarkan atas variabel-variabel yang datanya tersedia dan akurat.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, secara umum rumus DAU 2001 dapat dituliskan sebagai berikut:

$$DAU_i = FP_i + FF_i + FL_i$$

di mana FP adalah alokasi DAU yang berasal dari faktor penyeimbang, FF adalah alokasi yang berasal dari formula, dan FL adalah faktor lumpsum. Sementara itu, *i* menunjukkan unit kabupaten/kota yang akan mendapatkan alokasi DAU, apabila rumus tersebut dipergunakan untuk tingkat kabupaten dan kota.

Definisi umum dari faktor penyeimbang adalah suatu mekanisme untuk mencegah penurunan kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai kewajiban-kewajiban mereka. Sejalan dengan salah satu prinsip penyusunan rumus DAU di atas, maka pemerintah pusat menjamin secara eksplisit bahwa setiap pemerintah daerah di Indonesia tidak akan menerima DAU 2001 lebih rendah dari total SDO dan Inpres tahun 2000. Mengingat tahun anggaran 2000 hanya berumur 9 bulan, maka dasar penghitungan yang dipakai adalah 4/3 kali besarnya anggaran tahun fiskal 2000 tersebut.

Selain itu, faktor penyeimbang juga digunakan untuk mengatasi permasalahan pendanaan yang muncul akibat terjadinya transfer pegawai dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang tentunya membawa konsekuensi pada biaya gaji dan biaya-biaya terkait lainnya. Transfer pegawai tersebut harus dilakukan mengingat terjadinya likuidasi dari beberapa fungsi dekonsentrasi pemerintah pusat (kanwil, kandep). Sementara itu faktor lumpsum adalah suatu mekanisme untuk membagi habis total DAU yang sudah dianggarkan dalam APBN ke daerah-daerah.

Faktor formula berisi variabel dan rumus DAU adalah sebagai berikut:

Tabel 2-3

Bobot Variabel Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal DAU 2001

No.	Variabel	Bobot dalam Formula DAU 2001
1.	Komponen DAU	SDO+lnpres+Lumpsum+CF
2.	Celah Fiskal (CF), terdiri dari:	
	Kebutuhan Fiskal	
	Pengeluaran Daerah Rata-Rata dikalikan dengan penjumlahan dari	
	Indeks Penduduk (IP)	¼
	Indeks Kemiskinan Relatif (IKR)	¼
	Indeks Luas Wilayah (IW)	¼
	Indeks Harga Bangunan	¼
	Kapasitas Fiskal	
	Penerimaan Daerah Rata-Rata dikalikan dengan penjumlahan dari	
	Indeks SDA	1/3
	Indeks Industri	1/3
	Indeks SDM	1/3

Sumber: diolah dari UU Nomor 25 Tahun 1999 beserta Penjelasanannya

Dari tabel tersebut terlihat bahwa variabel yang dipergunakan dalam faktor formula merupakan variabel yang sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 1999 dan secara lebih jelas tertuang dalam PP Nomor 104 Tahun 2000. Variabel-variabel yang dipergunakan adalah (1) potensi penerimaan, yang terdiri dari PDRB sektor sumber daya alam (primer) untuk menghitung indeks SDA, PDRB Sektor Industri dan jasa lainnya (non primer) untuk menghitung indeks industri, dan besarnya angkatan kerja untuk menghitung indeks SDM, (2) kebutuhan daerah, yang terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, indeks harga bangunan, dan jumlah penduduk miskin.

Di samping alokasi DAU 2001 yang sudah didistribusikan kepada daerah-daerah dengan skema pencairan 1/12 setiap bulannya, juga terdapat dana tambahan yang diberikan kepada beberapa pemerintah daerah untuk mengantisipasi tingginya biaya peralihan pegawai dari pusat ke daerah, lambatnya peralihan kewenangan dari provinsi ke kabupaten, serta terjadinya kenaikan gaji pegawai negeri sipil. Dana tambahan tersebut diberikan dalam bentuk dana kontijensi tahap I, dana kontijensi tahap II, dan dana talangan.

B. DAU Tahun 2002 - 2005

Menyadari adanya beberapa kelemahan dalam formulasi DAU 2001, pemerintah telah meninjau kembali formula DAU, termasuk mereformulasikannya untuk perhitungan DAU 2002 dan seterusnya, dengan harapan akan menghasilkan perhitungan yang lebih baik dibandingkan dengan yang terdahulu sehingga dapat menciptakan kondisi yang lebih baik bagi daerah terhadap alokasi yang diterimanya. Upaya penyempurnaan memang perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi celah fiskal antar daerah (*fiscal gap*) serta dapat lebih mencerminkan asas keadilan dan pemerataan.

Guna menindaklanjutinya, pemerintah memfasilitasi kegiatan studi mengenai formula DAU bersama dengan 4 (empat) universitas terkemuka yang selama ini terlibat dalam kajian di bidang keuangan daerah, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Andalas. Hasil kajian ini digunakan sebagai pertimbangan kebijakan pemerintah untuk penetapan formula DAU selanjutnya.

Beberapa ketentuan berikut ini menjadi pedoman dasar bagi penyusunan formula DAU: (i) tetap mengacu pada kaidah-kaidah dasar dalam UU Nomor 25 Tahun 1999, di mana salah satu yang terpenting adalah DAU akan dialokasikan dengan bobot daerah yang dihitung dengan formula yang didasarkan atas pertimbangan kebutuhan dan potensi daerah yang diwujudkan atas beberapa indikator variabel yang dipergunakan dalam memperkirakan besarnya kebutuhan dan potensi penerimaan daerah, (ii) formula DAU tetap menggunakan penghitungan celah fiskal (*fiscal gap*), yaitu *fiscal needs* (kebutuhan pembiayaan) dibandingkan dengan *fiscal capacity* (potensi penerimaan), (iii) pendekatan celah fiskal memungkinkan adanya daerah yang relatif sudah dianggap mampu dari segi kapasitas keuangan, dan seharusnya tidak memerlukan lagi alokasi DAU, (iv) mengacu pada variabel-variabel yang dipertimbangkan dalam UU Nomor 25 Tahun 1999, tetapi sekaligus membuka kemungkinan penambahan beberapa variabel baru yang merupakan penyempurnaan dari variabel formula DAU dalam PP Nomor 104 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 84 Tahun 2001, tanpa menyimpang dari UU itu sendiri, (v) formula DAU harus

sederhana dalam artian dapat dijelaskan dan mudah dipahami serta dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan, (vi) akurasi data baik untuk variabel *fiscal needs* maupun *fiscal capacity* yang akan digunakan untuk penghitungan DAU harus menjadi perhatian utama, (vii) salah satu misi atau tujuan keberadaan DAU adalah sebagai transfer yang menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah (*equalization grant*). Dengan prinsip ini, dampak ketidakmerataan yang ditimbulkan oleh bagi hasil pajak maupun sumber daya alam (SDA) dapat dinetralisir. Dengan demikian, tolok ukur keberhasilan alokasi DAU adalah pada tercapainya pemerataan total penerimaan daerah per kapita yang sebaik-baiknya. Dalam bahasa teknis, diharapkan formula tersebut menghasilkan suatu indeks koefisien variasi penerimaan per kapita yang sekecil mungkin.

Perhitungan DAU masih menggunakan formula dengan konsep celah fiskal (*fiscal gap*) yang diatur dalam PP Nomor 84 Tahun 2001 sebagai perubahan atas PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. Selain dengan formula celah fiskal, perhitungan DAU juga ditentukan dengan menggunakan kebijakan berupa Alokasi Minimum. Komponen Alokasi Minimum dalam alokasi DAU terdiri dari dua komponen besar yaitu komponen lumpsum serta komponen Belanja Pegawai.

Salah satu komponen dalam DAU yang menjadi kontroversi adalah komponen lumpsum. Pembagian nilai DAU yang berasal dari komponen lumpsum ini dilakukan secara sama kepada semua daerah (baik provinsi maupun kabupaten/kota).

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, salah satu komponen dalam Alokasi Minimum adalah belanja pegawai. Proporsi belanja pegawai ini diperoleh dengan menggunakan rasio antara belanja pegawai untuk masing-masing daerah (provinsi atau kabupaten/kota) dengan total belanja pegawai seluruh daerah (provinsi atau kabupaten/kota) di Indonesia.

Jumlah alokasi untuk belanja pegawai dalam DAU ditentukan dengan mengalikan proporsi belanja pegawai dengan jumlah total belanja pegawai dalam alokasi DAU. Komposisi lumpsum, belanja pegawai dan perhitungan lain dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-4
Perbandingan Komposisi Kebijakan DAU 2001-2005

	2001	2002	2003	2004-2005
Jumlah Total	25% PDN	25% PDN	25% PDN	25,5% PDN
Komponen	FP+LS+CF	AM + CF	AM + CF	AM + CF
Alokasi Minimum	FP=SDO+INPRES	Lumpsum (LS)+Gaji	Lumpsum (LS)+Gaji	Lumpsum (LS)+Gaji
Komposisi	<u>Provinsi</u> FP+LS=80% CF = 20%	<u>Provinsi</u> LS = 20% Gaji = 30% CF = 50%	<u>Provinsi</u> LS = 10% Gaji = 30% CF = 60%	<u>Provinsi</u> LS = 5% Gaji = 30% CF = 65%
	<u>Kab/Kota</u> FP+LS=80% CF=20%	<u>Kab/Kota</u> LS = 10% Gaji = 50% CF = 40%	<u>Kab/Kota</u> LS = 5% Gaji = 45% CF = 50%	<u>Kab/Kota</u> LS = 5% Gaji = 40% CF = 55%
PAD estimasi	-	$\alpha + \beta$.PDRB jasa	$\alpha + \beta$.PDRB jasa	$\alpha + \beta$.PDRB jasa

Sumber: Diolah dari Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri

Pada bagian berikut ini akan dijelaskan komponen besar kedua dalam alokasi DAU yaitu komponen yang dialokasikan berdasarkan celah fiskal. Komponen dalam alokasi DAU yang didasarkan pada celah fiskal ini terdiri dari 2 komponen yaitu kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal.

Kebutuhan Fiskal

Kebutuhan fiskal dalam alokasi DAU secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu indikator kependudukan (indeks penduduk dan indeks kemiskinan relatif) dan indikator kewilayahan (indeks luas wilayah dan indeks kemahalan konstruksi). Ada dua hal penting dalam penentuan kebutuhan fiskal daerah yaitu penentuan bobot setiap indeks serta penentuan besarnya kebutuhan fiskal.

Komponen kedua dalam penentuan kebutuhan fiskal ini adalah besarnya pengeluaran rata-rata daerah. Besarnya pengeluaran rata-rata daerah ini diperoleh dengan membagi seluruh pengeluaran daerah dalam APBD (terbagi untuk tingkat

provinsi dan kabupaten/kota) dengan jumlah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Kebutuhan fiskal (KbF) ditentukan dengan formula sebagai berikut:

$$\text{KbF} = \{(\text{bobot IP} * \text{IP}) + (\text{bobot IKR} * \text{IKR}) + (\text{Bobot IW} * \text{IW}) + (\text{Bobot IKK} * \text{IKK})\} * \text{Pengeluaran Rata2 Daerah}$$

Kapasitas Fiskal

Komponen yang lain dalam alokasi DAU berdasarkan celah fiskal adalah kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal di daerah dihitung dengan menggunakan 3 komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak (BHP) serta Bagi Hasil Sumber Daya Alam (BHSDA). Satu hal yang paling penting dalam perhitungan kapasitas fiskal adalah pemberian bobot kepada masing-masing komponen kapasitas fiskal. Penentuan Kapasitas Fiskal (KpF) dilakukan dengan menjumlahkan perkalian bobot dan nilai setiap komponen dalam kapasitas fiskal. Secara formula hal itu dapat ditunjukkan dengan rumusan berikut ini:

$$\text{KpFi} = (\text{bobot PAD} * \text{PADi}) + (\text{bobot BHP} * \text{BHPI}) + (\text{bobot BHSDA} * \text{BHSDAi})$$

Dari tahun 2002 hingga 2005, penentuan bobot kepada masing-masing komponen baik kebutuhan fiskal maupun kapasitas fiskal telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-5
Bobot Variabel Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal
DAU 2002-2005

No	Variabel	Bobot dalam Formula DAU		
		2002	2003	2004-2005
1.	Komponen DAU	AM+CF	AM+CF	AM+CF
2.	Alokasi Minimum (AM)	Lumpsum+Gaji	Lumpsum+Gaji	Lumpsum+Gaji
3.	Celah Fiskal (CF) = Formula, terdiri dari:			
	Kebutuhan Fiskal			
	Pengeluaran Daerah Rata-Rata dikalikan dengan penjumlahan dari:			
	Indeks Penduduk (IP)	0,40	0,40	0,40
	Indeks Kemiskinan Relatif (IKR)	0,10	0,10	0,10
	Indeks Luas Wilayah (IW)	0,10	0,10	0,10
	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	0,40	0,40	0,40
	Kapasitas Fiskal			
	PAD	1,00	0,50	0,50
	Bagi Hasil Pajak (BHP)	1,00	1,00	1,00
	Bagi Hasil Sumber Daya Alam (BHSDA)	0,75	0,75	1,00

Sumber: Diolah dari Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri

Adanya tekanan politik dari daerah mengakibatkan munculnya keinginan daerah untuk tidak mau memperoleh DAU lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau yang biasa dikenal dengan *hold harmless*. Adanya *hold harmless* ini mengakibatkan munculnya item Dana Penyeimbang (DP) pada tahun 2002 sebagai antisipasi atas sikap daerah yang tidak mau menerima DAU pada tahun 2002 yang lebih rendah dari DAU 2001. Dana Penyeimbang ini

berkembang menjadi dua yaitu DP murni dan DP adhoc. DP murni merujuk kepada dana talangan untuk kebijakan pemerintah yang memberikan gaji ke-13 kepada pegawai negeri sipil.

Dalam alokasi DAU pada tahun-tahun berikutnya yaitu 2003-2004, juga tidak terlepas dari permasalahan *hold harmless* ini. Dalam mekanisme formula DAU yang murni, DAU usulan diperoleh dari penjumlahan alokasi minimum dan alokasi DAU yang berdasarkan celah fiskal. DAU usulan ini kemudian diperbandingkan dengan penjumlahan DAU dan DP murni pada tahun sebelumnya. Selisih antara DAU Usulan dan penjumlahan DAU dan DP tahun sebelumnya merupakan jumlah dana *hold harmless* yang harus ditanggung oleh pemerintah.

Khusus untuk PAD dihitung dengan metode estimasi, dengan rumusan berikut:

$$\text{PAD Estimasi} = \beta_1 + \beta_2 \text{PDRB Jasa}$$

Adapun penghitungan PAD estimasi dari tahun 2002 hingga 2005, menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Jasa sebagai dasar perhitungan. Secara teoretis PDRB adalah suatu indikator untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara sektoral, sehingga dapat dilihat penyebab pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Secara struktural PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya, dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) sektor atau lapangan usaha yang dapat dipilah dalam sektor ekonomi non jasa, yaitu: Pertanian; Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan; Listrik, Gas, dan Air Minum; Bangunan, serta ekonomi jasa, yaitu: Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perbankan; serta Jasa-jasa Lainnya (BPS, 2000). Pertumbuhan dan kontribusi masing-masing sektor ekonomi berbeda-beda tergantung pada struktur ekonomi daerah yang bersangkutan.

Sektor yang termasuk di dalam industri jasa adalah sektor-sektor yang kegiatannya diperkirakan dapat mempengaruhi besar kecilnya PAD dari suatu daerah. Mengingat pajak dan retribusi daerah sangat terkait dengan kegiatan sektor jasa, maka variabel ini sebenarnya merupakan penjumlahan nilai tambah bruto dari sektor yang berkaitan dengan jasa, yaitu: Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perbankan; dan Jasa-jasa Lainnya.

C. DAU Tahun 2006 - Sekarang

Dalam UU No.33.2004 disebutkan bahwa alokasi DAU antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibagi berdasarkan perimbangan kewenangan. Implikasinya, diperlukan pengaturan yang lebih jelas tentang perimbangan kewenangan antara level pemerintahan. Untuk merespons hal tersebut pada tahun 2007 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No.38/2007 yang mengatur mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah juga telah mengatur bahwa selama pembagian kewenangan ini belum dapat ditentukan, pemerintah masih mengacu pada pengaturan yang lama dalam mengalokasikan besaran DAU kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Meskipun mekanisme pencabutan hold harmless dalam alokasi DAU belum dilaksanakan, alokasi DAU sejak tahun 2006 telah mengadopsi formula alokasi DAU seperti yang diatur dalam UU No.33 Tahun 2004. Penggunaan formula tersebut antara lain menyangkut besaran alokasi DAU Nasional sebesar 25,5% dari Penerimaan Dalam Negeri Netto sampai dengan tahun 2007 serta penggunaan variabel-variabel kebutuhan dan kapasitas fiskal seperti yang diatur dalam UU tersebut.

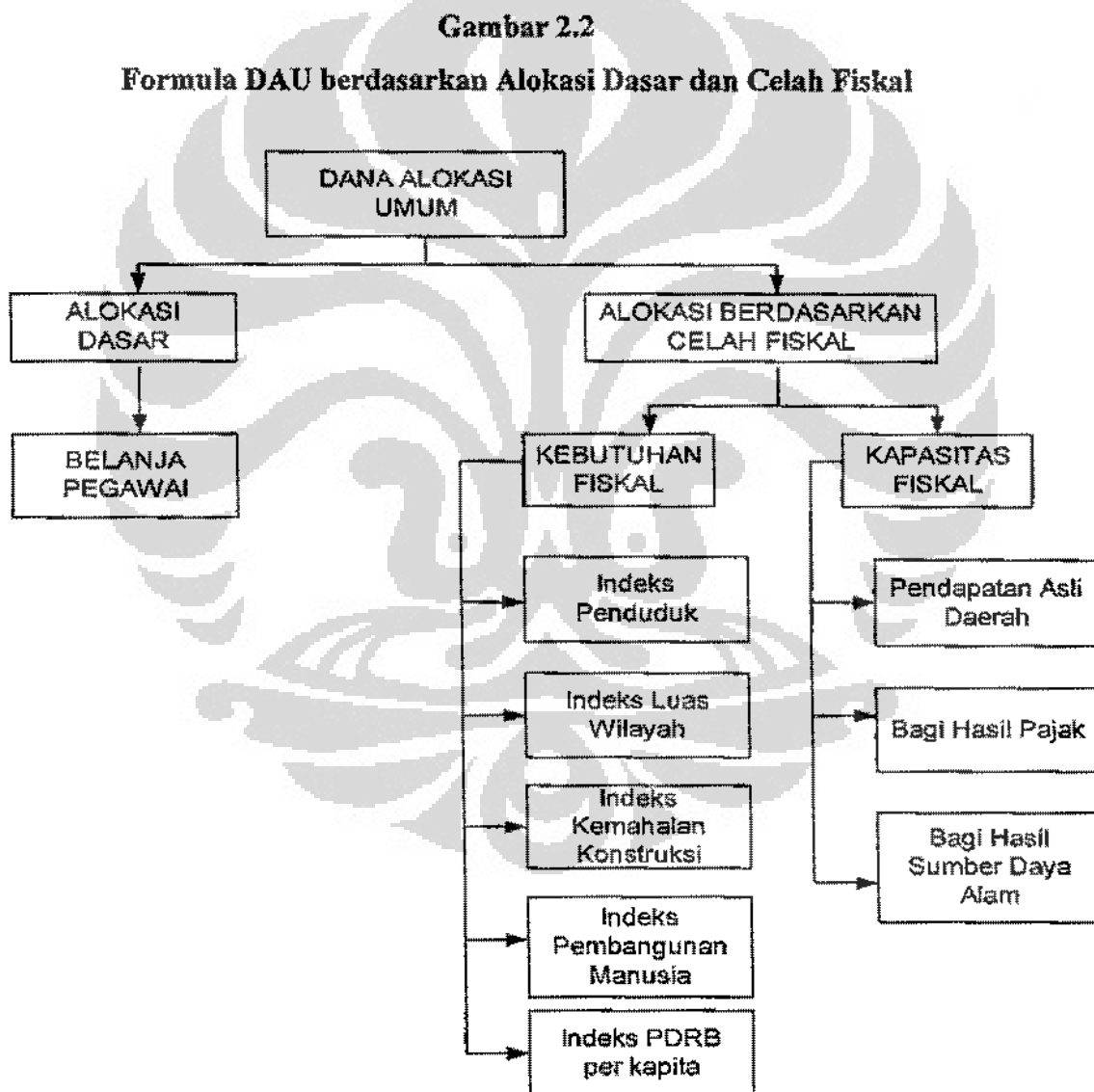
Dalam PP No. 55/2005 alokasi DAU untuk daerah dihitung dengan menggunakan formula: $DAU = AD + CF$, dimana AD adalah Alokasi Dasar dan CF adalah Celah Fiskal. Alokasi Dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah (PNSD) yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian Pegawai Negeri Sipil

termasuk di dalamnya tunjangan beras dan tunjangan Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21).

Celah Fiskal (CF) diperoleh dengan mengurangi kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal seperti dalam persamaan berikut:

$$CF_i = KbF_i - KpF_i$$

Secara lengkap formula DAU seperti yang diatur dalam UU No.33 Tahun 2004 dan PP No. 55/2005 adalah sebagai berikut:



Sumber: Diolah dari UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tahun 2005

Alokasi berdasarkan kesenjangan fiskal memperhitungkan dua bagian besar yaitu kebutuhan fiskal (KbF) dan kapasitas fiskal (KpF) mengingat kesenjangan/celah fiskal (CF) merupakan selisih dari kebutuhan dan kapasitas fiskal suatu daerah. Sesuai dengan UU No.33/2004, variabel-variabel kebutuhan fiskal tersebut terdiri dari:

- Jumlah penduduk, merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap daerah
- Luas wilayah, merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM), merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan
- PDRB Perkapita, merupakan cerminan potensi dan aktivitas perekonomian suatu daerah yang dihitung berdasarkan total seluruh output produksi kotor dalam suatu wilayah
- Indeks Kemahalan Konstruksi, merupakan cerminan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah

Di sisi lain, komponen-komponen kapasitas fiskal dalam perhitungan DAU terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBHSDA), merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

- Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP), merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND), dan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Perhitungan kebutuhan fiskal tidak menggunakan data dasar secara langsung namun dinyatakan dalam bentuk indeks. Jika X_i adalah nilai suatu variabel kebutuhan fiskal i , maka nilai indeks X_i (IX_i) adalah hasil bagi X_i dengan nilai rata-rata X_i seluruh daerah. Secara matematis, hal ini dapat ditunjukkan pada persamaan berikut ini:

$$IX_i = \frac{X_i}{\left(\sum_{i=1}^n X_i / n\right)}$$

dimana n adalah jumlah daerah dalam formula alokasi DAU. Perumusan nilai kebutuhan fiskal dapat ditunjukkan pada persamaan berikut:

$$KbF_i = [\alpha_1 * IP_i + \alpha_2 * ILW_i + \alpha_3 * IIPM_i + \alpha_4 * IIPDRB_i + \alpha_5 * IKK_i] * TBR$$

Sebagai catatan, α_i adalah bobot setiap indeks variabel kebutuhan fiskal dimana

$$\sum_{i=1}^5 \alpha_i = 1$$

TBR sendiri menggambarkan besarnya Total Belanja Rata-Rata APBD seluruh daerah.

Di sisi yang lain, kapasitas fiskal (KpF) suatu daerah dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$KpF_i = [\beta_1 * PAD_i + \beta_2 * DBHSDA_i + \beta_3 * DBHP_i]$$

Total DAU Nasional menurut UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tahun 2005 sampai dengan pada tahun 2007 setara dengan 25,5% dari Penerimaan Dalam Negeri (PDN) Netto. PDN Netto itu sendiri merupakan hasil pengurangan dari Penerimaan Dalam Negeri (komponen dalam APBN) dengan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR). Namun demikian, pada tahun 2007 Pemerintah

menetapkan total DAU Nasional sebesar Rp 164.787,4 Milyar atau 26% dari PDN Netto yang memiliki nilai sebesar Rp 634,05 Trilyun. Dari total DAU Alokasi Nasional tersebut, alokasi DAU bagi seluruh provinsi di Indonesia mencapai Rp 16.478,74 Milyar (atau 10% dari total DAU Nasional) serta alokasi bagi seluruh pemerintah kabupaten/kota mencapai Rp 148.308,66 Milyar.

Formula alokasi DAU dalam UU No.33/2004 mengatur bahwa besaran alokasi DAU pertama-tama harus dialokasikan untuk menutupi alokasi dasar sebesar total belanja pegawai negeri sipil daerah. Sisanya, total alokasi DAU pada masing-masing pemerintahan dikurangi dengan total alokasi dasar, dibagi berdasarkan bobot celah fiskal. Dalam alokasi DAU Provinsi, diketahui besaran belanja pegawai negeri sipil daerah seluruh provinsi di Indonesia mencapai Rp7.469,26 Milyar sehingga alokasi DAU berdasarkan kesenjangan fiskal bernilai Rp9.009,48 Milyar. Sedangkan total Alokasi Dasar (AD) DAU seluruh Kabupaten/Kota mencapai Rp66.015,14 Milyar sehingga besaran DAU yang dialokasikan berdasarkan kesenjangan fiskal sebesar Rp82.293,52 Milyar.

Secara lengkap besarnya bobot setiap variabel kebutuhan dan kapasitas fiskal serta besar Total Belanja Rata-Rata untuk provinsi dan kabupaten/kota dapat diperlihatkan pada Tabel berikut ini:

Tabel 2-6
Bobot Variabel Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal DAU 2007

VARIABEL	BOBOT	
	DAU PROVINSI	DAU KAB/KOT
Kebutuhan Fiskal		
Indeks Penduduk	30%	30%
Indeks Luas Wilayah	15%	15%
Indeks IPM	10%	10%
Indeks PDRB Perkapita	15%	15%
Indeks IKK	30%	30%
Total Belanja Rata-Rata	Rp 1.576,96 Milyar	Rp 353,85 Milyar
Kapasitas Fiskal		
PAD	50%	75%
DBHSDA	50%	50%
DBHP	75%	75%

Sumber: Diolah dari Departemen Keuangan

2.2.3 Kebijakan *Non Hold Harmless*

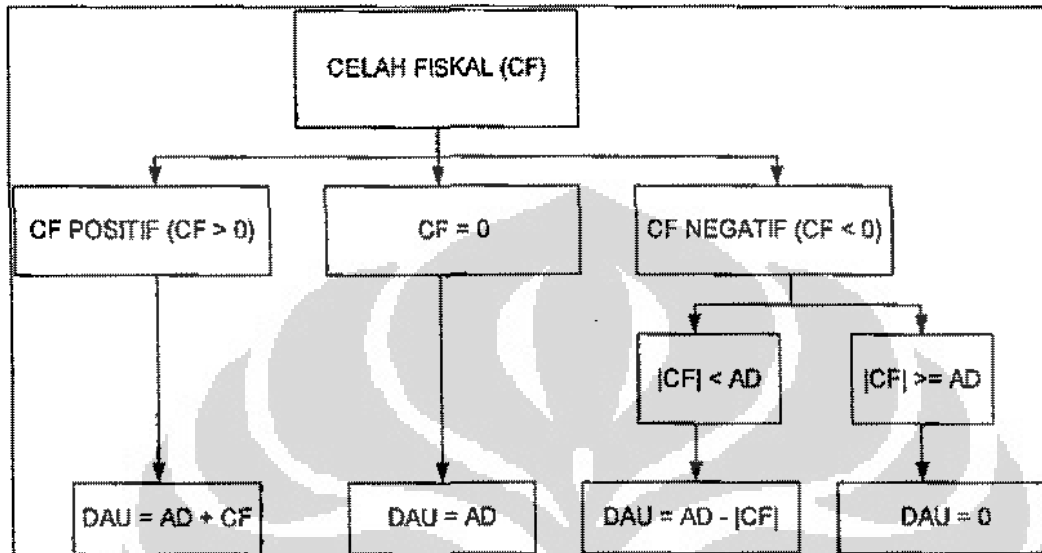
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa alokasi DAU yang diberlakukan untuk masing-masing daerah ditetapkan tidak lebih kecil dari tahun anggaran 2005 dan berlaku sampai dengan tahun 2007. Dalam UU tersebut juga diatur beberapa kondisi pengalokasian DAU sesuai kemampuan fiskal masing-masing daerah. Dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan tujuan pengalokasian DAU kembali pada konsep awal, dimana daerah-daerah dengan potensi kapasitas fiskal relatif besar mulai tahun 2008 dimungkinkan mengalami penurunan DAU, atau bahkan tidak menerima DAU sama sekali. Kebijakan ini lebih dikenal sebagai kebijakan *non hold harmless*.

Kebijakan ini dalam UU No. 33 Tahun 2004 dan PP 55 Tahun 2005 mulai berlaku pada tahun 2008. Penerapan kebijakan ini akan memberikan beberapa konsekuensi yang tidak terlepas dari nilai alokasi DAU berdasarkan kesenjangan fiskal (CF). Terdapat beberapa kemungkinan nilai CF ini, yaitu:

- Daerah yang memiliki nilai kesenjangan fiskal lebih besar dari nol ($CF > 0$) akan memperoleh alokasi DAU sebesar Alokasi Dasar (AD) ditambah dengan nilai kesenjangan fiskalnya, yaitu Kebutuhan dikurangi Kapasitas Fiskal.
- Daerah yang memiliki nilai kesenjangan fiskal sama dengan nol akan menerima alokasi DAU sebesar Alokasi Dasar
- Daerah yang memiliki nilai kesenjangan fiskal negatif ($CF < 0$) dan nilai negatif tersebut lebih kecil daripada alokasi dasar ($CF < 0$; $|CF| < AD$), akan memperoleh alokasi DAU sebesar Alokasi Dasar dikurangi dengan nilai kesenjangan fiskal
- Daerah yang memiliki nilai kesenjangan fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama dengan atau lebih besar daripada Alokasi Dasar ($CF < 0$; $|CF| \geq AD$), maka DAU yang diterima daerah tersebut adalah negatif atau disesuaikan menjadi nol (tidak memperoleh alokasi DAU).

Implikasi penghapusan kebijakan hold harmless dalam alokasi DAU ini dapat digambarkan pada Gambar 2.3 berikut ini:

Gambar 2.3
Formula DAU berdasarkan Celah Fiskal



Sumber: Diolah dari PP No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian mengenai dampak kebijakan *non holdharmless* terhadap tingkat pemerataan pendapatan di provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia ini, analisa dilakukan secara komprehensif yaitu secara ekonomi, ekonometrik dan statistik. Teori ekonomi yang relevan digunakan sebagai dasar untuk model yang akan digunakan serta untuk menganalisa hubungan dari masing-masing variabel dalam model. Untuk menganalisa efektivitas serta efisiensi model dilakukan secara ekonometrik. Sedangkan analisa statistik berupa deskripsi, digunakan dalam menggambarkan kondisi tiap-tiap variabel yang termasuk dalam jangka waktu penelitian.

3.1 Teknik Analisis

Teknik analisis yang akan dilakukan dalam menganalisis bobot variabel kebutuhan fiskal pada formula DAU adalah dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Adapun analisis kuantitatif atau ekonometrika yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Uji Index Williamson yang bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan *non holdharmless* alokasi DAU terhadap pemerataan fiskal antara daerah di Indonesia. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut :

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2 \frac{f_i}{N}}}{\bar{y}}$$

di mana:

Vw = Indeks Williamson

f_i = populasi daerah ke-i

N = populasi nasional

- y_i = penerimaan daerah (PAD+DAU+DBH) perkapita daerah ke-i
 \bar{y} = rata-rata penerimaan daerah (PAD+DAU+DBH) perkapita

Semakin kecil angka Indeks Williamson menunjukkan tingkat variasi atau kesenjangan fiskal antar daerah semakin diperkecil dengan memperhitungkan secara relatif terhadap penduduk.

- b. Analisis regresi dengan menggunakan peralatan Model Regresi Berganda (*Multiple Regression Model*), sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_i X_i + \varepsilon$$

digunakan untuk memperhitungkan/memperkirakan besarnya pengaruh secara kuantitatif dari masing-masing variabel bebas (independen) yang tercakup di dalam model regresi terhadap variabel terikat (dependen), di mana:

Y	=	Dana Alokasi Umum (DAU)
β_0	=	Intercept/konstanta
β_i	=	Koefisien variabel bebas (i=1,2,...,n)
X_i	=	Variabel bebas yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan DAU (i = 1,2,...,n)
ε	=	Random Error

Apabila persamaan di atas dituliskan kembali dalam bentuk formula DAU akan menjadi sebagai berikut:

$$DAU = AD + \beta_1 IJP + \beta_2 ILW + \beta_3 IPM + \beta_4 IKK + \beta_5 IPDRB - \beta_6 PAD - \beta_7 DBHSDA - \beta_8 DBHP + \varepsilon$$

- AD : Alokasi Dasar, yaitu gaji pegawai
 IJP : Indeks Jumlah Penduduk
 ILW : Indeks Luas Wilayah

IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
IKK	:	Indeks Kemahalan Konstruksi
IPDRB	:	Indeks PDRB Per Kapita
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
DBH SDA	:	Dana Bagi hasil Sumber Daya Alam
DBH P	:	Dana Bagi Hasil Pajak

Analisis data dilakukan dengan metode least square mengingat model yang dikembangkan menggunakan 1 persamaan (single equation) untuk meregresi persamaan tersebut digunakan program Eviews version 4.1. Parameter yang diestimasi dengan model di atas kemudian diuji secara statistik menggunakan uji nilai t, uji nilai F, dan Adjusted R-squared.

- Uji Koefisien Regresi Parsial

Untuk menguji apakah secara sendiri-sendiri dana bagi hasil, luas wilayah, dan belanja pegawai berpengaruh terhadap DAU.

$$H_0 : \beta_i = 0$$

$$H_1 : \beta_i \neq 0$$

$$\alpha = 5\%, \text{ d.f} = n-1-k$$

$$t = \frac{\beta_i}{S\beta_i}$$

Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima.

- Uji Koefisien Regresi Secara Serentak

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$$

Variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y)

$$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$$

Variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (Y)

$$\alpha = 5\%, \text{ df} = \text{pembilang} = k$$

$$= \text{penyebut} = n-1-k$$

$$F = \frac{K_{\text{reg}}}{K_{\text{simp}}} = \frac{JKR/k}{JKR_{\text{res}}/n-1-k}$$

Bila F hitung $>$ F tabel maka H_0 ditolak dan jika F hitung $<$ F tabel maka H_0 diterima.

- c. Analisis korelasi yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan hubungan variabel-variabel dasar DAU seperti alokasi dasar, indeks kebutuhan fiskal, dan kapasitas fiskal terhadap alokasi DAU yang diterima provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
- d. Uji multikolinearitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan/korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel bebas dalam model. Dengan adanya multikolinearitas maka standar error dugaan koefisien regresi akan menjadi besar. Akibatnya pengujian dugaan koefisien regresi secara parsial (uji-t) menjadi rendah, sehingga variabel yang seharusnya signifikan dapat menjadi tidak signifikan. Lebih jauh lagi, tidak hanya variabel menjadi tidak signifikan tetapi juga mempunyai tanda koefisien yang salah. Akibatnya bertentangan dengan dengan teori yang melandasinya.
- e. Analisa regresi berganda terboboti yang bertujuan untuk membuat nilai yang sama bagi semua variabel DAU. Variabel DAU terdiri dari alokasi dasar yang merupakan cerminan dari gaji pegawai dan celah fiskal yang merupakan selisih kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. Variabel kebutuhan fiskal terdiri dari luas wilayah, jumlah penduduk, IKK, IPM, dan PDRB per kapita, sementara kapasitas fiskal terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil sumber daya alam, dan bagi hasil pajak. Dalam regresi berganda terboboti, semua variabel dalam formula DAU tersebut dibuat menjadi standar. Hal ini dilakukan dengan mengurangi nilai masing-masing variabel dengan nilai rata-ratanya kemudian dibagi dengan standar deviasi. Koefisien yang diperoleh hasil regresi terboboti kemudian dirasionalkan menjadi bobot bagi masing-masing variabel dalam formula.

Rasionalisasi bobot ini dilakukan terhadap keseluruhan formula DAU yang terdiri dari komponen alokasi dasar dan celah fiskal, sehingga dengan

demikian penjumlahan nilai bobot untuk alokasi dasar dan celah fiskal harus sama dengan satu.

Rasionalisasi bobot juga dilakukan untuk variabel-variabel yang terdapat dalam kebutuhan fiskal, sehingga penjumlahan seluruh bobot masing-masing variabel kebutuhan fiskal (jumlah penduduk, luas wilayah, IKK, IPM, dan Indeks PDRB Per kapita) harus sama dengan satu.

Terakhir rasionalisasi bobot dilakukan untuk variabel-variabel yang terdapat dalam kapasitas fiskal, sehingga penjumlahan seluruh bobot masing-masing variabel kapasitas fiskal (PAD, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, dan Bagi Hasil Pajak) harus sama dengan satu.

3.2 Asumsi Ekonometrika

Sebelum dianalisis, data tersebut harus diuji apakah melanggar asumsi dasar seperti kolinearitas jamak, korelasi serial, dan heteroskedastisitas.

a. Kolinearitas Jamak (*Multicollinearity*)

Masalah kolinearitas jamak terjadi jika dua atau lebih variabel (atau kombinasi beberapa variabel) berkorelasi tinggi satu sama lain. Jika dijumpai adanya kolinearitas jamak, maka kemungkinan dijumpai masalah sebagai berikut (Greene, 1997, 420):

- Perubahan kecil data dapat merubah parameter secara lebih besar
- Variabel mempunyai koefisien yang besar

Untuk mendeteksi adanya kolinearitas jamak, dapat digunakan beberapa cara, salah satu diantaranya menganalisis *condition index* (CI) (Gujarati, 1995, 338). Pedoman (*rule of thumb*) yang digunakan yaitu diatas 0,8 menunjukkan adanya kolinearitas jamak yang kuat. CI dihitung menggunakan program *eviews*.

b. Korelasi Serial

Dalam menganalisis korelasi serial, terdapat istilah serupa yang sering digunakan, yaitu otokorelasi (*autocorrelation*). Otokorelasi mendeteksi adanya hubungan antara data lag pada data time series itu sendiri, misalnya u_1, u_2, \dots, u_{10} dan u_2, u_3, \dots, u_{11} . Sementara itu, korelasi serial menjelaskan hubungan

antara data lag dua series yang berbeda, seperti u_1, u_2, \dots, u_{10} dan v_1, v_2, \dots, v_{10} . Namun Gujarati (1995, 401) menyamakan kedua istilah tersebut.

Korelasi serial dijumpai jika error dari periode-periode waktu yang berbeda saling berkorelasi. Biasanya korelasi serial terjadi pada data time series (deret-waktu). Pada analisis ini, korelasi serial yang dibahas adalah first-order serial correlation dimana error di satu periode waktu berkorelasi langsung dengan error periode waktu berikutnya. Selain itu, dalam analisis ini juga hanya menitikberatkan pada korelasi yang positif karena pada data time series lebih sering terjadi. Apabila pada model dijumpai adanya korelasi serial, maka model menjadi tidak efisien meskipun tetap tidak bias dan tetap konsisten

Untuk mendeteksi adanya korelasi serial, digunakan Uji Durbin-Watson (DW) yang dapat diproses dengan program Eviews. DW terletak antara 0 sampai 4, dengan nilai yang dekat 2 menunjukkan tidak ada korelasi serial tingkat pertama. Korelasi serial positif berkaitan dengan nilai DW di bawah 2.

c. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas dijumpai pada model yang mempunyai varians error yang tidak konstan. Pada umumnya heteroskedastisitas diperoleh pada data cross section (kerat lintang). Jika pada model dijumpai adanya heteroskedastisitas, maka model menjadi tidak 'best' atau tidak efisien meskipun tidak bias dan tidak konsisten. Dengan kata lain, jika regresi tetap dilakukan meskipun ada masalah heteroskedastisitas, maka apapun hasil regresi akan membuat "misleading" (Gujarati, 1995, 366). Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas, digunakan Uji White yang diperoleh dalam program Eviews. Dengan Uji White, dibandingkan $Obs \cdot R\text{-Squared}$ dengan χ tabel. Jika nilai $Obs \cdot R\text{-Squared}$ lebih kecil dari pada tabel, maka tidak ada heteroskedastisitas.

3.3 Variabel-Variabel dan Sumber Data

Variabel-variabel yang digunakan dalam penghitungan DAU adalah variable-variabel DAU sebagaimana disebutkan dalam dalam UU Nomor 33

Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

- Jumlah penduduk (dalam jiwa)

Variabel yang mencerminkan kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap daerah

- Luas wilayah (dalam kilometer persegi)

Variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah

- Indeks Kemahalan Konstruksi

Variabel yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah

- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita

Variabel yang merupakan cerminan potensi dan aktivitas perekonomian suatu daerah yang dihitung berdasarkan total seluruh output produksi kotor dalam suatu wilayah

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan

- Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Variabel yang menunjukkan berapa besar potensi sumber daya alam dari suatu daerah yang terdiri dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi..

- Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh Orang Pribadi) dan PPh Pasal 21

Variabel ini untuk menunjukkan perbedaan potensi daerah atas dasar potensi sumber daya manusianya. Suatu daerah yang memiliki sumber daya manusia yang besar secara relatif akan memiliki potensi penerimaan yang lebih baik,

misalnya; potensi penerimaan yang berasal dari bagi hasil PPh orang pribadi dan juga PAD.

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Meskipun jenis pajak ini tergolong sebagai pajak pemerintah pusat, sistem pembagiannya yang praktis memberikan lebih dari 90% hasilnya kembali ke daerah membuat kedua jenis pajak ini secara bersama-sama harus dimasukkan sebagai unsur potensi penerimaan suatu daerah.

Data yang digunakan dalam tesis ini adalah data sekunder yang seluruhnya bersumber dari Departemen Keuangan Republik Indonesia. Sedangkan bentuk data yang digunakan dalam tesis ini seluruhnya adalah berbentuk *cross section* (silang). Data sekunder ini dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu:

- a. Data yang digunakan dalam analisa regresi dan korelasi adalah data dasar yang digunakan dalam perhitungan DAU Tahun 2006 dan 2007.

Uji regresi menggunakan data dasar DAU untuk Tahun 2006 dan 2007 dengan alasan karena pengalokasian DAU dengan menggunakan formula sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tahun 2005 dimulai pada tahun 2006. Penulis membatasi hanya sampai pada tahun 2007 karena sampai dengan tahun 2007 Pemerintah masih menerapkan kebijakan non hold harmless. Pengalokasian DAU tahun 2008 sudah mulai menerapkan kebijakan hold harmless walaupun belum benar-benar murni karena pada tahun 2008 daerah yang mengalami penurunan DAU dari tahun sebelumnya lebih besar dari 75% masih diberikan dana penyesuaian.

Rincian data dasar yang digunakan dalam perhitungan DAU Tahun 2006 dan 2007 adalah sebagai berikut:

- Data jumlah penduduk menggunakan data jumlah penduduk seperti dalam formula DAU 2006 dan 2007 yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk Tahun 2005 dan 2006
- Data luas wilayah menggunakan data luas wilayah daratan seperti dalam formula DAU 2006 dan 2007 ditambah dengan luas wilayah perairan 4 mil

(kabupaten/kota) dan 12 mil (provinsi) laut yang berasal dari Bakosurtanal tahun 2006

- Data Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) berasal dari data BPS Tahun 2005 dan 2006 dimana basis nilai IKK yang digunakan adalah 150
 - Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan berasal dari BPS Tahun 2005 dan 2006. Penting dicatat bahwa variabel yang digunakan adalah IPM Invers dengan formula $IPM\ Invers = 100 - IPM$
 - Data PDRB Perkapita menggunakan data PDRB Perkapita seperti dalam formula DAU 2006 dan 2007 yang diperoleh dengan membagi nilai PDRB Total kecuali sektor pertambangan dan industri manufaktur dengan jumlah penduduk.
 - Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggunakan data realisasi PAD Tahun 2004 dan 2005.
 - Nilai Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBHSDA) menggunakan data realisasi tahun 2004 dan 2005
 - Nilai Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) menggunakan data realisasi tahun 2004 dan 2005
 - Besaran gaji pegawai negeri sipil daerah menggunakan data gaji seperti dalam formula DAU 2006 dan 2007 yaitu data gaji dengan basis pada Bulan Juni Tahun 2005 dan Bulan Juni Tahun 2006
 - Regresi dilakukan terhadap alokasi DAU berdasarkan Formula dan juga terhadap alokasi DAU berdasarkan
- b. Sedangkan data yang digunakan dalam uji Indeks Williamson menggunakan data dasar yang digunakan dalam perhitungan DAU tahun 2006, 2007, dan tahun 2008. Dalam rangka analisa dampak pemerataan pendapatan terhadap kebijakan *non holdharmless* digunakan data pendapatan riil dalam APBD tahun 2006, 2007, dan 2008 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) baik Sumber Daya Alam maupun Pajak.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dilakukan analisis data mengenai seberapa besar dampak kebijakan *non holdharmless* pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap tingkat pemerataan pendapatan di provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Dalam bab ini juga akan dilakukan analisis data secara kuantitatif dengan menggunakan model regresi ekonometrik. Analisis data ini tidak mengarah kepada pembentukan suatu model matematis, tetapi hanya untuk menunjukkan hubungan dan arah koefisien yang diharapkan antara variabel bebas dan variabel terikat sesuai hipotesa dengan tetap mengikuti prinsip-prinsip ekonometrik analisa. Teori ekonomi yang relevan digunakan sebagai dasar untuk model yang akan digunakan serta untuk menganalisa hubungan dari masing-masing variabel dalam model.

4.1. Kinerja DAU Untuk Pemerataan Kemampuan Fiskal Antar Daerah

Ada banyak indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan kapasitas fiskal daerah, diantaranya Koefisien Variasi, Williamson Index, Rasio Maksimum/Minimum Pendapatan Daerah Per Kapita, Theil Index, Koefisien Gini, dll. Untuk analisis pada thesis ini digunakan ukuran pemerataan dengan menggunakan *Williamson Index*. Komponen pendapatan daerah yang dijadikan dasar dalam penghitungan kesenjangan fiskal ini dibatasi hanya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam, dan Dana Alokasi Umum (DAU). Penghitungan berdasarkan *Williamson Index* ini dilakukan untuk alokasi DAU berdasarkan Peraturan Presiden dan alokasi DAU berdasarkan formula murni.

Penghitungan *Williamson Index* dilakukan dengan membandingkan DAU berdasarkan formula murni dan berdasarkan peraturan presiden untuk 3 (tiga) tahun, yaitu DAU tahun 2006, 2007, dan 2008. Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 alokasi DAU

berdasarkan formula murni dilakukan mulai tahun 2008. Namun alokasi DAU tahun 2008 ternyata juga belum benar-benar murni berdasarkan formula sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pada tahun 2008 daerah yang mengalami penurunan DAU dari tahun sebelumnya lebih besar dari 75% masih diberikan dana penyesuaian.

Hasil perhitungan Indeks Williamson untuk provinsi adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1
Indeks Williamson Provinsi

	2006	2007	2008
DAU Formula	1.77544	1.82709	1.73388
DAU Perpres	1.92699	1.85553	1.73517

Sumber: Departemen Keuangan, diolah

Dalam Tabel 4.1 diatas disajikan hasil perhitungan Indeks Williamson alokasi DAU yang berada di level pemerintah provinsi pada tahun 2006, 2007, dan 2008 untuk alokasi DAU berdasarkan formula dan alokasi DAU berdasarkan peraturan presiden tentang alokasi DAU.

Dalam tabel tersebut terlihat Indeks Williamson untuk alokasi DAU tahun 2006 memperlihatkan bahwa Indeks Williamson DAU berdasarkan Formula sebesar 1.77544 yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan Indeks Williamson DAU berdasarkan Perpres sebesar 1.92699. Sedangkan DAU tahun 2007 memperlihatkan bahwa Indeks Williamson DAU berdasarkan Formula sebesar 1.82709 lebih kecil dibandingkan dengan Indeks Williamson DAU berdasarkan Perpres sebesar 1.85553. Demikian juga untuk alokasi DAU provinsi tahun 2008 memperlihatkan Indeks Williamson DAU berdasarkan Formula sebesar 1.73388 lebih kecil dibandingkan dengan Indeks Williamson DAU berdasarkan Perpres sebesar 1.73517.

Semakin kecil angka Indeks Williamson menunjukkan tingkat variasi atau kesenjangan fiskal antar provinsi semakin diperkecil dengan memperhitungkan

secara relatif terhadap penduduk. Dengan demikian Tabel 4.1 menunjukkan bahwa kinerja DAU berdasarkan Formula dalam memperkecil kesenjangan fiskal antar provinsi lebih baik dibandingkan dengan kinerja DAU berdasarkan Peraturan Presiden.

Sedangkan untuk perbandingan Indeks Williamson alokasi DAU provinsi antara tahun 2006, 2007 dan 2008 menunjukkan bahwa kinerja DAU provinsi tahun 2008 secara keseluruhan lebih baik dibandingkan dengan kinerja DAU provinsi tahun 2006 dan 2007. Hal ini terutama berlaku untuk kinerja DAU Perpres. Sedangkan untuk DAU formula, Indeks Williamson DAU Formula tahun 2006 lebih baik dibandingkan tahun 2007. Namun demikian Indeks Williamson DAU Formula tahun 2008 lebih baik dibandingkan tahun 2006. Dengan demikian DAU provinsi tahun 2008 lebih dapat memperkecil kesenjangan fiskal antar provinsi dibandingkan dengan DAU tahun 2006 dan 2007.

Dapat disimpulkan bahwa Pengalokasian DAU kepada provinsi yang dilakukan oleh Pemerintah dan disepakati oleh DPR-RI pada tahun 2006 dan 2007 melalui Peraturan Presiden belum menunjukkan kinerja DAU yang sebenarnya, yaitu memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah, dibandingkan alokasi DAU pada tahun 2008. Walaupun pada tahun 2008 bagi beberapa daerah yang DAU-nya turun lebih besar dari 75% dari tahun sebelumnya masih diberikan dana penyesuaian, pengalokasian DAU tahun 2008 lebih menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun 2007.

Hasil perhitungan Indeks Williamson untuk kabupaten/kota adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.2. di bawah ini:

Tabel 4.2

Indeks Williamson Kabupaten/Kota

	2006	2007	2008
DAU Formula	0.89140	0.85823	0.85712
DAU Perpres	0.91050	0.86892	0.86017

Sumber: Departemen Keuangan, diolah

Tabel 4.2 diatas menyajikan perhitungan Indeks Williamson alokasi DAU yang berada di level pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2007 dan 2008 untuk alokasi DAU berdasarkan formula dan alokasi DAU berdasarkan peraturan presiden tentang alokasi DAU.

Dalam Tabel 4.2 tersebut terlihat Indeks Williamson untuk alokasi DAU kabupaten/kota tahun 2006 berdasarkan Formula sebesar 0.89140 lebih kecil dibandingkan dengan Indeks Williamson DAU berdasarkan Perpres sebesar 0.91050. Sedangkan DAU tahun 2007 memperlihatkan Indeks Williamson DAU berdasarkan Formula sebesar 0.85823 lebih kecil dibandingkan dengan Indeks Williamson DAU berdasarkan Perpres sebesar 0.86892. Demikian juga untuk alokasi DAU kabupaten/kota tahun 2008 memperlihatkan Indeks Williamson DAU berdasarkan Formula sebesar 0.85712 lebih kecil dibandingkan dengan Indeks Williamson DAU berdasarkan Perpres sebesar 0.86017.

Semakin kecil angka Indeks Williamson menunjukkan tingkat variasi atau kesenjangan fiskal antar kabupaten/kota semakin diperkecil dengan memperhitungkan secara relatif terhadap penduduk. Dengan demikian Tabel 4.2 menunjukkan bahwa kinerja DAU kabupaten/kota tahun 2007 berdasarkan Formula dalam memperkecil kesenjangan fiskal antar kabupaten/kota lebih baik dibandingkan dengan kinerja DAU berdasarkan Peraturan Presiden.

Sedangkan untuk perbandingan Indeks Williamson alokasi DAU kabupaten/kota antara tahun 2006, 2007 dan 2008 menunjukkan bahwa kinerja DAU kabupaten/kota tahun 2008 secara keseluruhan lebih baik dibandingkan dengan kinerja DAU provinsi tahun 2006 dan 2007. Hal ini berlaku untuk kinerja DAU formula maupun DAU Perpres.

Dapat disimpulkan bahwa Pengalokasian DAU kepada kabupaten/kota yang dilakukan oleh Pemerintah dan disepakati oleh DPR-RI pada tahun 2006 dan 2007 melalui Peraturan Presiden belum menunjukkan kinerja DAU yang sebenarnya, yaitu memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah, dibandingkan alokasi DAU pada tahun 2008. Walaupun pada tahun 2008 bagi beberapa daerah yang DAU-nya turun lebih besar dari 75% dari tahun sebelumnya masih diberikan dana

penyesuaian, pengalokasian DAU tahun 2008 lebih menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun 2007.

4.2 Analisis Perbandingan Pengaruh Masing-masing Variabel DAU Pada DAU Berdasarkan Formula dan DAU Berdasarkan Perpres Dengan Regresi Berganda.

Pada bagian ini akan dianalisis pengaruh masing-masing variabel DAU, baik variabel DAU pada alokasi DAU berdasarkan formula maupun variabel DAU pada alokasi DAU berdasarkan Peraturan Presiden, dengan tahap-tahap berikut:

1. Menguji signifikansi antara masing-masing variabel DAU yang terdiri dari alokasi dasar yang dicerminkan dalam gaji pegawai, kebutuhan fiskal yang dicerminkan dalam variabel jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, PDRB per kapita, indeks pembangunan manusia, dan kapasitas fiskal yang dicerminkan dalam variabel pendapatan asli daerah, bagi hasil sumber daya alam, dan bagi hasil pajak.
2. Pengujian masing-masing variabel dilakukan pada DAU berdasarkan formula dan DAU berdasarkan peraturan presiden.
3. Hasil uji akan menunjukkan justifikasi pengaruh masing-masing variabel DAU berdasarkan formula murni dan berdasarkan peraturan presiden
4. Perbandingan hasil uji antara masing-masing variabel pada DAU berdasarkan formula murni dan DAU berdasarkan peraturan presiden akan dijadikan dasar untuk melakukan justifikasi kebijakan pengalokasian DAU.

Regresi berganda dilakukan berdasarkan pada formula DAU sebagai berikut:

$$DAU = AD + CF$$

$$DAU = AD + (KB_f - KP_f)$$

$$DAU = AD + (((TBR * (\alpha_1 * IJP + \alpha_2 * ILW + \alpha_3 * IPM + \alpha_4 * IKK + \alpha_5 * IPDRB)) - (PAD + BHSDA + BHP)))$$

Keterangan:

- AD : Alokasi Dasar, yaitu gaji pegawai
 CF : Celah Fiskal
 KBf : Kebutuhan Fiskal

KPf	:	Kapasitas Fiskal
TBR	:	Total Belanja Rata-rata
IJP	:	Indeks Jumlah Penduduk
ILW	:	Indeks Luas Wilayah
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
IKK	:	Indeks Kemahalan Konstruksi
IPDRB	:	Indeks PDRB Per Kapita
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
DBH SDA	:	Dana Bagi hasil Sumber Daya Alam
DBH P	:	Dana Bagi Hasil Pajak

4.2.1 DAU Provinsi

Regresi berganda terhadap formula DAU bagi provinsi dilakukan terhadap DAU berdasarkan formula dan DAU berdasarkan peraturan presiden dengan menggunakan data DAU tahun 2006 dan 2007. Regresi berganda terhadap model diolah dengan menggunakan software e-views. Hasil lengkap regresi berganda DAU Provinsi dapat dilihat pada Lampiran 3 sampai dengan 6.

Penulis menggunakan tiga kriteria evaluasi untuk menyatakan bahwa model regresi yang dihasilkan adalah baik, yaitu:

4.2.1.1 Kriteria ekonomi

Berdasarkan hasil regresi diatas, tanda untuk variabel bebas sudah sesuai dengan yang diharapkan, yaitu gaji pegawai (GAJI), jumlah penduduk (PDDK), luas wilayah (LW), indeks kemahalan konstruksi (IKK), PDRB per kapita (PDRB), dan indeks pembangunan manusia (IPMI) bertanda positif, sedangkan pendapatan asli daerah (PAD), bagi hasil sumber daya alam (BHSDA), dan bagi hasil pajak (BHP) bertanda negatif.

Kriteria Statistik

Uji T, dari hasil 4 (empat) regresi diatas, ternyata terdapat 3 (tiga) variabel bebas pada DAU Formula 2007 yang mempunyai *P-value* > 0.05, yaitu variable PDRB per kapita sebesar 0.0534, variabel IPMI

sebesar 0.0664, dan variabel PAD sebesar 0.0692. Namun demikian, jika menggunakan taraf nyata sebesar 10%, maka variabel IPMI dan PAD masih dapat digunakan. Sedangkan pada DAU Perpres 2006 variabel IPMI mempunyai nilai *P-value* sebesar 0.2178.

Uji kedua adalah uji F atau uji model secara keseluruhan. Apabila digunakan $\alpha = 5\%$, maka baik regresi DAU Formula maupun regresi DAU Perpres semuanya menunjukkan Probability (F-statistics) $< \alpha$, ini berarti tolak H_0 atau dengan kata lain ada hubungan linier antara variabel independent terhadap variabel dependen. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa variabel-variabel DAU provinsi sebagai variabel independent hasil estimator mempengaruhi secara signifikan alokasi DAU provinsi sebagai variable terikat.

Pengujian ketiga yaitu melihat koefisien determinasi R^2 atau R^2 adjusted. Nilai R^2 dan R^2 adjusted dari DAU Formula maupun DAU Perpres adalah 98.67% dan 100% Ini menunjukkan bahwa estimasi dalam kedua regresi tersebut dapat menjelaskan keragaman yang terjadi dalam model secara sempurna, atau hampir 100%.

4.2.1.2 Kriteria ekonometrik

a. Uji Multicollinearity

Uji multikolineariti diperlukan untuk mendeteksi adanya korelasi antar beberapa variabel bebas dalam suatu model. Dari hasil uji multikolineariti diketahui bahwa nilai korelasi antar variabel baik dalam DAU Formula maupun DAU Perpres masih lebih rendah dibandingkan dengan nilai R^2 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolineariti.

b. Uji Autocorrelations

Korelasi serial terjadi apabila data yang digunakan adalah data time series, sedangkan data yang digunakan dalam analisis ini adalah *cross section*, sehingga uji ini pun tidak diperlukan.

c. Uji Heterocedasticity

Tabel 4.3

Hasil Uji Heteroscedasticity Regresi Berganda DAU Provinsi

DAU	F-statistic	Probability	Obs*R-squared	Probability
Formula 2006	1.671305	0.166903	22.51989	0.209719
Perpres 2006	1.581061	0.194444	22.11894	0.226747
Formula 2007	1.768679	0.141671	22.92064	0.193658
Perpres 2007	0.521785	0.902860	13.24976	0.776527

Sumber: Departemen Keuangan, diolah

Pengujian dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

H_0 : tidak ada heterocedastisitas (homocedastis).

H_1 : ada heterocedastisitas.

Dengan $\alpha = 5\%$, tolak H_0 jika Probability (P-value) $< \alpha$.

Dari hasil uji heteroskedastisitas DAU Formula maupun DAU Perpres pada Tabel 4.3 diatas, semuanya memiliki nilai Probability (P-Value) diatas 5%, yaitu 20.97% untuk DAU Formula 2006, 19.37% untuk DAU Formula 2007, 22.67% untuk DAU Perpres 2006, dan 77.65% untuk DAU Perpres 2007 maka berarti H_0 tidak ditolak atau H_0 diterima yang menunjukkan tidak adanya heterokedastisitas.

Perbandingan koefisien masing-masing variabel DAU pada DAU Formula dan DAU Perpres untuk tahun 2006 dan 2007 hasil regresi berganda adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.4 di bawah ini:

Tabel 4.4
Koefisien Hasil Regresi Berganda DAU Provinsi

Variabel	DAU 2006		DAU 2007	
	Formula	Perpres	Formula	Perpres
Gaji	1.000005 *)	1.073138 *)	0.919055 *)	1.000000 *)
IP	0.000310 *)	1.73E-05 *)	2.18E-05 *)	2.13E-05 *)
ILW	0.016593 *)	0.001158 *)	0.000807 *)	0.001025 *)
IKK	1.209286 *)	1.106270 *)	0.982982 **)	0.951305 *)
IPM Invers	1.563647 *)	1.480192 ^{ns})	9.11E-06 ***)	1.12E-05 *)
IPDRB	1.36E-05 *)	8.28E-06 *)	5.526933 ***)	1.558358 *)
PAD	-0.439772 *)	-0.178747 *)	-0.113644 ***)	-0.151736 *)
BHSDA	-0.439776 *)	-0.221468 *)	-0.157492 *)	-0.151737 *)
BHP	-0.439792 *)	-0.324766 *)	-0.282396 *)	-0.227608 *)

Sumber: Departemen Keuangan, diolah

Keterangan:

- *) $P\text{-value} < 0.01$, sangat signifikan
- **) $0.01 < P\text{-value} < 0.05$, signifikan
- ***) $0.05 < P\text{-value} < 0.1$, cukup signifikan
- ns $P\text{-value} > 0.1$, tidak signifikan

Dari hasil uji di atas, masing-masing variabel baik dalam DAU Formula maupun dalam DAU Perpres untuk alokasi DAU Provinsi dapat diinterpretasikan pengaruhnya terhadap alokasi DAU sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan semua variabel DAU berpengaruh sangat signifikan terhadap penghitungan DAU provinsi pada tahun 2006 dan 2007, kecuali variabel IPM yang pada DAU perpres 2007 tidak signifikan mempengaruhi penghitungan DAU walaupun memiliki nilai koefisien yang besar.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2007 sangat signifikan berpengaruh terhadap penghitungan DAU. Pada tahun 2007 tersebut PAD memiliki koefisien regresi bertanda negatif sebesar 0.113644 pada DAU Formula 2007 dan sebesar 0.151736 pada DAU Perpres 2007, hal ini menunjukkan bahwa pada DAU Perpres, provinsi yang berhasil melakukan intensifikasi dan eketensifikasi penerimaan PAD sehingga memiliki nilai

PAD yang besar menjadi seperti “mendapat hukuman” dengan lebih besarnya koefisien nilai pengurang dibandingkan pada DAU Formula.

3. Gaji pada tahun 2006 dan 2007 sangat signifikan berpengaruh terhadap penghitungan DAU. Pada tahun 2007 Gaji memiliki koefisien regresi bertanda positif yang cukup besar pada DAU Formula 2007 yaitu sebesar 0.919055 dan pada DAU Perpres 2007 sebesar 1. Pada DAU 2006 koefisien gaji malah lebih besar dibandingkan DAU 2007, yaitu sebesar 1.00005 pada DAU Formula 2006 dan sebesar 1.073138 pada DAU Perpres 2006. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi dasar yang dicerminkan oleh gaji pegawai menjadi faktor yang sangat signifikan pada alokasi DAU di provinsi. Maka tidak salah apabila selama ini banyak daerah, terutama provinsi, yang menganggap bahwa alokasi DAU semata-mata untuk belanja pegawai.
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada DAU perpres 2006 tidak signifikan mempengaruhi penghitungan DAU. Pada DAU Formula 2007 IPM memiliki koefisien regresi bertanda positif yang sangat besar yaitu sebesar 5.526933 namun terkoreksi menjadi hanya sebesar 1.558358 pada DAU Perpres 2007. Hal yang sama terjadi pada DAU tahun 2006. Koefisien regresi IPM pada DAU Formula 2006 sebesar 1.563647 terkoreksi menjadi 1.480192 pada DAU Perpres 2006. Dalam formula alokasi DAU angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dihitung adalah inversnya ($100 - \text{IPM}$). Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa provinsi yang tingkat pencapaian pembangunan manusianya masih rendah yang dicerminkan dari kesejahteraan penduduk atas layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan yang masih rendah menjadi seperti “mendapat hukuman” dengan turunnya koefisien yang cukup signifikan yaitu sebesar 5.52693 pada DAU Formula 2007 menjadi hanya sebesar 1.558358 pada DAU Perpres 2007 dan sebesar 1.563647 pada DAU Formula 2006 menjadi sebesar 1.480192 pada DAU Perpres 2006. Perbandingan antara IPM dengan DAU Perpres dan DAU Formula untuk provinsi pada tahun 2007 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5

Perbandingan IPM dengan DAU Perpres dan Formula Tahun 2007

Provinsi	IPM Inverse	DAU Perpres	DAU Formula
Papua	37.92	876.30	832.89
Nusa Tenggara Barat	37.58	447.66	513.72
Nusa Tenggara Timur	36.41	553.59	567.44
Irian Jaya Barat	35.17	464.87	467.96
Sulawesi Barat	34.28	279.25	277.60
Kalimantan Barat	33.80	610.89	620.09
Maluku Utara	33.05	370.72	382.04
Kalimantan Selatan	32.56	427.99	497.62
Gorontalo	32.54	191.40	322.50
Sulawesi Tenggara	32.48	461.84	440.48
Sulawesi Selatan	31.94	599.51	569.60
Jawa Timur	31.58	1,091.16	1159.30
Sulawesi Tengah	31.53	502.13	461.54
Banten	31.20	330.60	336.42
Lampung	31.15	509.66	540.93
Nanggroe Aceh Darussalam	30.95	487.93	407.28
Maluku	30.76	476.05	464.48
Jawa Tengah	30.22	1,050.73	1096.15
Bali	30.22	436.53	456.15
Jawa Barat	30.07	933.44	1001.37
Sumatera Selatan	29.77	510.20	526.14
Bangka Belitung	29.32	319.36	289.18
Jambi	29.05	415.02	412.37
Bengkulu	28.91	405.86	427.92
Sumatera Barat	28.81	546.33	535.81
Sumatera Utara	27.97	657.36	661.82
Riau Kepulauan	27.77	333.33	374.09
Kalimantan Timur	27.06	257.11	181.90
Kalimantan Tengah	26.78	571.29	496.39
DI Yogyakarta	26.50	437.38	419.28
Riau	26.37	277.66	204.57
Sulawesi Utara	25.79	447.04	454.47
DKI Jakarta	23.93	773.02	42.34

Sumber: Departemen Keuangan, diolah

Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa dari 33 provinsi di Indonesia, 20 provinsi memiliki IPM di bawah 70 atau IPM Invers di atas 30 yang berarti tingkat pencapaian pembangunan manusianya relatif belum tinggi. Dari 20 provinsi tersebut 14 (empat belas) provinsi mengalami penurunan DAU menurut Peraturan Presiden apabila dibandingkan dengan DAU Formula. Sedangkan sebaliknya dari 13 provinsi yang memiliki IPM di atas 70 atau

IPM Invers dibawah 30 yang berarti tingkat pencapaian pembangunan manusianya cukup tinggi, sebanyak 8 (delapan) provinsi justru memperoleh kenaikan DAU menurut Perpres apabila dibandingkan dengan penghitungan DAU berdasarkan formula murni.

4.2.2 DAU Kabupaten/Kota

Regresi berganda terhadap alokasi DAU bagi kabupaten/kota juga dilakukan terhadap DAU berdasarkan formula dan DAU berdasarkan peraturan presiden dengan menggunakan data DAU tahun 2006 dan 2007. Regresi berganda terhadap model diolah dengan menggunakan software e-views. Namun demikian mengingat banyaknya variasi jumlah data kabupaten/kota yang akan dilakukan regresi dan agar hasil estimasi yang dilakukan mendekati kenyataan, penulis melakukan regresi dengan menggunakan logaritma. Regresi dengan menggunakan logaritma ini dilakukan baik untuk regresi DAU berdasarkan Formula maupun untuk regresi DAU berdasarkan Perpres. Hasil lengkap regresi berganda DAU Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Lampiran 7 sampai dengan 10.

Penulis menggunakan tiga kriteria evaluasi untuk menyatakan bahwa model regresi DAU kabupaten/kota yang dihasilkan adalah baik, yaitu:

4.2.2.1 Kriteria ekonomi

Sama dengan hasil regresi alokasi DAU provinsi, hasil regresi alokasi DAU kabupaten/kota untuk DAU Formula dan DAU Perpres diatas juga menunjukkan tanda untuk variabel bebas sudah sesuai dengan tanda yang diharapkan, yaitu gaji pegawai (GAJI), jumlah penduduk (PDDK), luas wilayah (LW), indeks kemahalan konstruksi (IKK), PDRB per kapita (PDRB), dan indeks pembangunan manusia (IPMI) bertanda positif, sedangkan pendapatan asli daerah (PAD), bagi hasil sumber daya alam (BHSDA), dan bagi hasil pajak (BHP) bertanda negatif.

Kriteria Statistik

Uji T, dari hasil 4 (empat) regresi diatas, ternyata terdapat 1 (satu) variabel bebas pada DAU Formula 2006, 1 (satu) variable bebas pada DAU Perpres 2006, 2 (dua) variable bebas pada DAU Formula 2007,

Universitas Indonesia

dan 1 (satu) variable bebas pada DAU Perpres 2007 yang mempunyai *P-value* > 0,05. Pada DAU Formula 2006 variabel IPMI sebesar 0.2390, pada DAU Perpres 2006 variabel IPMI 0.0793, pada DAU Formula 2007 variabel IPMI sebesar 0.1477 dan variabel BHP sebesar 0.5038, sedangkan pada DAU Perpres 2007 variable BHP sebesar 0.2033. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPMI) tidak signifikan mempengaruhi alokasi DAU kabupaten/kota, sementara pada DAU Formula 2007 variabel Bagi Hasil Pajak (BHP) juga tidak signifikan mempengaruhi alokasi DAU.

Uji kedua adalah uji F atau uji model secara keseluruhan. Apabila digunakan $\alpha = 5\%$, maka baik regresi DAU Formula maupun regresi DAU Perpres semuanya menunjukkan Probability (F-statistics) < α , ini berarti tolak H_0 atau dengan kata lain ada hubungan linier antara variabel independent terhadap variabel dependen. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa variabel-variabel DAU kabupaten/kota sebagai variabel independen hasil estimator mempengaruhi secara signifikan alokasi DAU kabupaten/kota sebagai variabel terikat.

Pengujian ketiga yaitu melihat koefisien determinasi R^2 atau R^2 adjusted. Nilai R^2 dan R^2 adjusted dari DAU Formula maupun DAU Perpres adalah berada pada kisaran 77.66% sampai dengan 80.77%. Ini menunjukkan bahwa estimasi dalam kedua regresi tersebut dapat menjelaskan keragaman yang terjadi dalam model sebesar hampir 81%.

Kriteria ekonometrik

a. Uji Multicollinearity

Uji multikolineariti diperlukan untuk mendeteksi adanya korelasi antar beberapa variabel bebas dalam suatu model. Dari hasil uji multikolineariti diketahui bahwa nilai korelasi antar variabel baik dalam DAU Formula maupun DAU Perpres masih lebih rendah dibandingkan dengan nilai R^2 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolineariti.

b. Uji Autocorrelations

Korelasi serial terjadi apabila data yang digunakan adalah data time series, sedangkan data yang digunakan dalam analisis ini adalah *cross section*, sehingga uji ini pun tidak diperlukan.

c. Uji Heterocedasticity

Tabel 4.6

**Hasil Uji Heteroscedasticity Regresi Berganda
DAU Kabupaten/Kota**

DAU	F-statistic	Probability	Obs*R-squared	Probability
Formula 2006	0.751573	0.756789	13.70350	0.748205
Perpres 2006	5.768152	0.000000	86.85136	0.000000
Formula 2007	10.09455	0.000000	131.7388	0.000000
Perpres 2007	10.69115	0.000000	137.4031	0.000000

Sumber: Departemen Keuangan, diolah

Pengujian dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

H_0 : tidak ada heterocedastisitas (homocedastis).

H_1 : ada heterocedastisitas.

Dengan $\alpha = 5\%$, tolak H_0 jika Probability (P-value) $< \alpha$.

Dari hasil uji heteroskedastisitas DAU Formula maupun DAU Perpres pada tahun 2006 dan 2007 terdapt nilai Probability (P-Value) dibawah 5%, yaitu 0% untuk DAU Perpres 2006, DAU Formula 2007, dan DAU Perpres 2007, maka berarti H_0 ditolak atau H_1 diterima yang menunjukkan adanya heterokedastisitas.

Masalah heteroskedastisitas ini kemudian dihilangkan dengan melakukan tindakan perbaikan model regresi. Metode yang digunakan untuk menghilangkan masalah heteroskedastisitas adalah metode White atau Newey-West yang merupakan metode koreksi standard error atau *heteroscedasticity-corrected standard errors*.¹ Dalam evIEWS penghilangan masalah heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode yang dikenal dengan

¹ Agus Widarjono, *Ekonomometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*

istilah *White Heteroscedasticity Consistent Covariance*. Hasil regresi untuk kabupaten/kota ini sudah menggunakan metode *white heteroscedasticity consistent covariance*.

Perbandingan koefisien masing-masing variabel DAU pada DAU Formula dan DAU Perpres Kabupaten/Kota untuk tahun 2006 dan 2007 hasil regresi berganda adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.7 di bawah ini:

Tabel 4.7
Koefisien Hasil Regresi DAU Kabupaten/Kota

Variabel	DAU 2006		DAU 2007	
	Formula	Perpres	Formula	Perpres
Gaji Pegawai	0.411240 *)	0.448076 *)	0.361621 *)	0.393407 *)
IP	0.198220 *)	0.179555 *)	0.196246 *)	0.193361 *)
ILW	0.051702 *)	0.044296 *)	0.046918 *)	0.042749 *)
IKK	0.769512 *)	0.752183 *)	0.747357 *)	0.820227 *)
IPM Invers	0.136112 ^{ns})	0.193013 ^{***})	0.055298 ^{ns})	0.133882 ^{**})
IPDRB	0.112238 *)	0.116149 *)	0.144957 ^{**})	0.249917 *)
PAD	-0.033642 ^{**})	-0.052223 ^{**})	-0.041152 *)	-0.042002 *)
BHSDA	-0.065179 *)	-0.061591 *)	-0.036159 *)	-0.045687 *)
BHP	-0.072636 *)	-0.053228 *)	-0.015573 ^{ns})	-0.031847 ^{ns})

Sumber: Departemen Keuangan, diolah

Keterangan:

- *) $P\text{-value} < 0,01$, sangat signifikan
- ***) $0,01 < P\text{-value} < 0,05$, signifikan
- ***) $0,05 < P\text{-value} < 0,1$, cukup signifikan
- ns $P\text{-value} > 0,1$, tidak signifikan

Dari hasil uji di atas, masing-masing variabel baik dalam DAU Formula maupun dalam DAU Perpres kabupaten/kota tahun 2006 dan 2007 dapat diinterpretasikan pengaruhnya terhadap alokasi DAU sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan semua variabel DAU berpengaruh sangat signifikan terhadap penghitungan DAU kabupaten/kota pada tahun 2006 dan 2007, kecuali variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada DAU Formula tahun 2006 dan 2007 tidak berpengaruh signifikan terhadap

penghitungan DAU. Selain itu variabel Bagi Hasil Pajak pada DAU Formula dan Perpres 2007 juga tidak signifikan mempengaruhi penghitungan DAU.

2. Variabel Bagi Hasil Sumber Daya Alam (BHSDA) pada tahun 2006 dan 2007 berpengaruh sangat signifikan terhadap penghitungan DAU. Pada DAU Formula 2007 memiliki koefisien regresi bertanda negatif sebesar 0.036159 dan sebesar 0.04569 pada DAU Perpres 2007.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pada DAU berdasarkan Perpres, kabupaten/kota yang dianugerahi sumber daya alam melimpah menjadi "mendapat hukuman" dengan makin besarnya nilai pengurang pada DAU berdasarkan peraturan presiden apabila dibandingkan dengan alokasi DAU berdasarkan Formula.

3. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2006 berpengaruh signifikan pada penghitungan DAU dan sangat signifikan pada tahun 2007. Dibandingkan dengan hasil regresi untuk alokasi DAU provinsi, maka koefisien untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) hasil regresi alokasi DAU pada kabupaten/kota menunjukkan angka yang sangat kecil.

Koefisien PAD pada regresi DAU Formula 2006 provinsi adalah sebesar negatif 0.439772 sementara koefisien PAD pada regresi DAU Formula 2006 kabupaten/kota adalah hanya sebesar negatif 0.033642. Demikian pula koefisien PAD pada regresi DAU Perpres 2006 provinsi sebesar negatif 0.178747 yang jauh lebih besar dibandingkan koefisien PAD pada regresi DAU Perpres 2006 kabupaten/kota sebesar negatif 0.052223.

Koefisien PAD pada regresi DAU Formula 2007 provinsi adalah sebesar negatif 0.113644 sementara koefisien PAD pada regresi DAU Formula 2007 kabupaten/kota adalah hanya sebesar negatif 0.041152. Demikian pula koefisien PAD pada regresi DAU Perpres 2007 provinsi sebesar negatif 0.151736 yang jauh lebih besar dibandingkan koefisien PAD pada regresi DAU Perpres 2007 kabupaten/kota sebesar negatif 0.042.

4. Variabel Bagi Hasil Pajak (BHP) pada tahun 2006 berpengaruh sangat signifikan terhadap penghitungan DAU, namun pada tahun 2007 variabel BHP menjadi tidak signifikan mempengaruhi penghitungan DAU. Dibandingkan dengan hasil regresi untuk alokasi DAU provinsi, maka koefisien untuk Bagi

Hasil Pajak (BHP) hasil regresi alokasi DAU kabupaten/kota menunjukkan angka yang sangat kecil.

Koefisien BHP pada regresi DAU Formula 2006 provinsi adalah sebesar negatif 0.439792 sementara koefisien PAD pada regresi DAU Formula 2006 kabupaten/kota adalah sebesar negatif 0.072636. Demikian pula koefisien BHP pada regresi DAU Perpres 2006 provinsi sebesar negatif 0.324766 yang jauh lebih besar dibandingkan koefisien PAD pada regresi DAU Perpres 2006 kabupaten/kota sebesar negatif 0.053228.

Koefisien BHP pada regresi DAU Formula 2007 provinsi adalah sebesar negatif 0.282396 sementara koefisien PAD pada regresi DAU Formula 2007 kabupaten/kota adalah sebesar negatif 0.015573. Demikian pula koefisien BHP pada regresi DAU Perpres 2007 provinsi sebesar negatif 0.227608 yang jauh lebih besar dibandingkan koefisien PAD pada regresi DAU Perpres 2007 kabupaten/kota sebesar negatif 0.03185.

Hal ini menunjukkan bahwa variabel BHP pada alokasi DAU kabupaten/kota lebih kecil pengaruhnya dibandingkan pada alokasi DAU provinsi.

4.3 Analisis Perbandingan Pengaruh Masing-masing Variabel DAU Pada DAU Berdasarkan Formula dan DAU Berdasarkan Perpres Dengan Regresi Berganda Terboboti

Pada bagian ini penulis ingin melihat dan melakukan analisa pengaruh variasi penerimaan DAU setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang dipengaruhi oleh variabel DAU. Sehingga diharapkan dengan melakukan standarisasi pada seluruh variabel DAU akan dapat diketahui peran masing-masing variabel DAU terhadap penghitungan dan pengalokasian DAU.

Sebelum dilakukan regresi berganda terboboti terlebih dahulu dilakukan standarisasi pada seluruh variabel DAU yang mencakup variabel alokasi dasar dan celah fiskal. Pemberian bobot dihitung dengan mengurangi variabel DAU suatu daerah tertentu dengan nilai rata-ratanya dan kemudian dibagi dengan standar deviasinya.

Pada bagian ini juga penulis akan membandingkan bobot masing-masing variabel dalam formula DAU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu DAU yang dihitung berdasarkan penjumlahan alokasi dasar dan celah fiskal yang dinotasikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{DAU} &= f(\text{Alokasi Dasar} + \text{Celah Fiskal}) \\ &= f(\text{AD} + (\text{Gaji Pegawai} + \text{Jumlah Penduduk} + \text{Luas Wilayah} + \text{IKK} + \\ &\quad \text{IPM} + \text{Indeks PDRB Per Kapita}) - (\text{PAD} + \text{BH Sumber Daya Alam} + \\ &\quad \text{BH Pajak})) \end{aligned}$$

Selain itu penulis juga akan menghitung bobot masing-masing variabel dalam formula DAU yang dihitung hanya berdasarkan pada konsep celah fiskal. Artinya alokasi dasar yang merupakan cerminan dari gaji pegawai akan dihitung sebagai bagian dari kebutuhan fiskal dan bukan merupakan variabel yang berdiri sendiri. Konsep DAU berdasarkan celah fiskal ini dinotasikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{DAU} &= f(\text{Celah Fiskal}) \\ \text{DAU} &= f(((\text{Gaji Pegawai} + \text{Jumlah Penduduk} + \text{Luas Wilayah} + \text{IKK} + \text{IPM} + \\ &\quad \text{Indeks PDRB Per Kapita}) - (\text{PAD} + \text{BH Sumber Daya Alam} + \text{BH} \\ &\quad \text{Pajak})) \end{aligned}$$

4.3.1 DAU Provinsi

Pada bagian ini akan dijelaskan analisa hasil regresi terboboti alokasi DAU untuk provinsi. Regresi terboboti alokasi DAU provinsi dilakukan untuk alokasi DAU berdasarkan Formula dan alokasi DAU berdasarkan Peraturan Presiden untuk tahun 2006 dan 2007.

Untuk menyatakan bahwa model regresi yang dihasilkan adalah baik, penulis menggunakan tiga kriteria evaluasi, yaitu:

4.3.1.1 Kriteria ekonomi

Hasil regresi terboboti alokasi DAU provinsi menunjukkan tanda untuk variabel bebas sudah sesuai dengan tanda yang diharapkan.

Gaji pegawai (GAJI), jumlah penduduk (PDDK), luas wilayah (LW), indeks kemahalan konstruksi (IKK), PDRB per kapita (PDRB), dan indeks pembangunan manusia (IPMI) bertanda positif, sedangkan variabel pendapatan asli daerah (PAD), bagi hasil sumber daya alam (BHSDA), dan bagi hasil pajak (BHP) memiliki koefisien bertanda negatif.

4.3.1.2 Kriteria Statistik

Uji T, dari hasil 4 (empat) regresi diatas, ternyata terdapat 1 (satu) variabel bebas pada DAU Perpres 2006, 1 (satu) variable bebas pada DAU Formula 2007, dan 2 (dua) variable bebas pada DAU Perpres 2007 yang mempunyai *P-value* > 0,05. Pada DAU Perpres 2006 variabel IPMI sebesar 0.2071, pada DAU Formula 2007 variabel IPMI 0.2727, sedangkan pada DAU Perpres 2007 variabel IPMI sebesar 0.063 dan variabel PAD sebesar 0.062. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPMI) tidak signifikan mempengaruhi alokasi DAU provinsi, sementara pada DAU Perpres 2007 variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga tidak signifikan mempengaruhi alokasi DAU.

Uji kedua adalah uji F atau uji model secara keseluruhan. Apabila digunakan $\alpha = 5\%$, maka baik regresi DAU Formula maupun regresi DAU Perpres semuanya menunjukkan Probability (F-statistics) < α , ini berarti tolak H_0 atau dengan kata lain ada hubungan linier antara variabel independent terhadap variabel dependen. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa variabel-variabel DAU provinsi sebagai variabel independen hasil estimator mempengaruhi secara signifikan alokasi DAU provinsi sebagai variabel terikat.

Pengujian ketiga yaitu melihat koefisien determinasi R^2 atau R^2 adjusted. Nilai R^2 dan R^2 adjusted dari DAU Formula maupun DAU Perpres adalah berada pada kisaran 98.66% sampai dengan 100%. Ini menunjukkan bahwa estimasi dalam kedua regresi tersebut dapat menjelaskan keragaman yang terjadi dalam model secara sempurna.

4.3.1.3 Kriteria ekonometrik

a. Uji Multicollinearity

Uji multikolineariti diperlukan untuk mendeteksi adanya korelasi antar beberapa variabel bebas dalam suatu model. Dari hasil uji multikolineariti diketahui bahwa nilai korelasi antar variabel baik dalam DAU Formula maupun DAU Perpres masih lebih rendah dibandingkan dengan nilai R^2 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolineariti.

b. Uji Autocorrelations

Korelasi serial terjadi apabila data yang digunakan adalah data time series, sedangkan data yang digunakan dalam analisis ini adalah *cross section*, sehingga uji ini pun tidak diperlukan.

c. Uji Heterocedasticity

Tabel 4.8

Hasil Uji Heteroscedasticity Regresi Berganda Terboboti
DAU Provinsi

DAU	F-statistic	Probability	Obs*R-squared	Probability
Formula 2006	0.510045	0.910283	13.06972	0.787414
Perpres 2006	1.581218	0.194392	22.11966	0.226716
Formula 2007	0.359832	0.978194	10.43808	0.916665
Perpres 2007	1.790375	0.136613	23.00579	0.190368

Sumber: Departemen Keuangan, diolah

Pengujian dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

H_0 : tidak ada heterocedastisitas (homocedastis).

H_1 : ada heterocedastisitas.

Dengan $\alpha = 5\%$, tolak H_0 jika Probability (P-value) $< \alpha$.

Dari hasil uji heteroskedastisitas terhadap regresi terboboti DAU Formula maupun DAU Perpres pada tahun 2006 dan 2007 semuanya memiliki nilai Probability (P-Value) diatas 5%, maka berarti H_0 tidak ditolak atau H_0 diterima yang menunjukkan tidak adanya heterokedastisitas.

Perbandingan koefisien masing-masing variabel DAU pada DAU Formula dan DAU Perpres Provinsi untuk tahun 2006 dan 2007 hasil regresi berganda terboboti adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.9 di bawah ini:

Tabel 4.9
Koefisien Hasil Regresi Berganda Terboboti DAU Provinsi

Variabel	DAU 2006		DAU 2007	
	Formula	Perpres	Formula	Perpres
Alokasi Dasar	0.131318 *)	2.353518 *)	1.981727 *)	1.502254 *)
Celah Fiskal	0.868682 *)	-1.353518 *)	-0.981727 *)	-0.502254 *)
IP	1.060366 *)	0.990435 *)	0.946659 *)	0.903783 *)
ILW	0.380316 *)	0.443432 *)	0.326469 *)	0.229233 *)
IKK	0.010001 *)	0.152784 *)	0.112955 *)	0.119444 **)
IPM Invers	0.001877 *)	0.029737 ^{ns})	0.141088 ^{ns})	0.088640 ***)
IPDRB	0.026314 *)	0.267533 *)	0.028473 *)	0.077355 **)
PAD	-0.190264 *)	-1.291504 *)	-1.527094 *)	-0.878708 ***)
BHSDA	-0.041887 *)	-0.352310 *)	-0.335939 *)	-0.294252 *)
BHP	-0.088030 *)	-1.085855 *)	-0.292790 ^{ns})	-0.972052 **)

Sumber: Departemen Keuangan, diolah

Keterangan:

- *) $P\text{-value} < 0.01$, sangat signifikan
- ***) $0.01 < P\text{-value} < 0.05$, signifikan
- ***) $0.05 < P\text{-value} < 0.1$, cukup signifikan
- ns $P\text{-value} > 0.1$, tidak signifikan

Hasil lengkap regresi terboboti DAU Provinsi dapat dilihat pada Lampiran 11 sampai dengan 14.

Berdasarkan hasil regresi terboboti pada Tabel diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Pada DAU Formula 2006, peran Alokasi Dasar (AD) yang dicerminkan pada koefisien Gaji adalah sebesar 0.13 atau 13%. Hal ini berarti bahwa peran Celah Fiskal (CF) adalah sebesar 0.87 atau 87%. Akan tetapi pada DAU

Perpres 2006, peran Alokasi Dasar justru meningkat menjadi 2.35 yang berarti peran celah fiskal menjadi bernilai negatif dengan besaran 1.35.

Dengan demikian konsep DAU berdasarkan celah fiskal dalam rangka menempatkan DAU untuk memperkecil kesenjangan fiskal antar provinsi menjadi makin memburuk pada DAU Perpres dibandingkan dengan DAU Formula pada tahun 2006.

Kondisi ini juga menunjukkan bahwa peran alokasi dasar yang dicerminkan oleh Gaji masih jauh lebih besar dibandingkan peran celah fiskal.

- 2) Pada DAU Formula 2007, peran Alokasi Dasar (AD) yang dicerminkan pada koefisien Gaji adalah sebesar 1.98. Hal ini berarti bahwa peran Celah Fiskal (CF) menjadi bernilai negatif sebesar 0.98.

Akan tetapi pada DAU Perpres 2007, peran Alokasi Dasar justru menurun menjadi 1.51 yang berarti peran celah fiskal tetap bernilai negatif dengan besaran yang lebih kecil yaitu 0.51.

Dengan demikian sama seperti pada alokasi DAU tahun 2006, konsep DAU berdasarkan celah fiskal dalam rangka menempatkan DAU untuk memperkecil kesenjangan fiskal antar provinsi menjadi makin memburuk pada DAU Perpres dibandingkan dengan DAU Formula pada tahun 2007.

Kondisi pada tahun 2007 ini tetap menunjukkan bahwa peran alokasi dasar yang dicerminkan oleh Gaji masih jauh lebih besar dibandingkan peran celah fiskal.

Apabila koefisien hasil regresi sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.8 dirasionalkan menjadi bobot bagi masing-masing variabel dalam formula DAU, maka perbandingan bobot masing-masing variabel pada kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal DAU Tahun 2006 dan 2007 adalah sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.10 di bawah ini.

Tabel 4.10
Bobot Variabel Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal DAU Provinsi
Setelah Rasionalisasi Koefisien

Variabel	DAU 2006		DAU 2007	
	Formula	Perpres	Formula	Perpres
Komposisi Formula				
1. Alokasi Dasar	0.13	2.35	1.98	1.51
2. Celah Fiskal	0.87	- 1.35	- 0.98	- 0.51
	1.00	1.00	1.00	1.00
Kebutuhan Fiskal				
1. Penduduk	0.72	0.53	0.61	0.64
2. Luas Wilayah	0.25	0.23	0.21	0.16
3. IKK	0.01	0.08	0.07	0.08
4. IPM	0.00	0.02	0.02	0.05
5. PDRB per kapita	0.02	0.14	0.09	0.06
	1.00	1.00	1.00	1.00
Kapasitas Fiskal				
1. PAD	0.59	0.47	0.71	0.41
2. BH SDA	0.13	0.13	0.16	0.14
3. BH Pajak	0.27	0.40	0.14	0.45
	1.00	1.00	1.00	1.00
Indeks Williamson	1.77544	1.92699	1.82709	1.85553

Sumber: Departemen Keuangan, diolah

Dari Tabel 4.10 tersebut dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peran alokasi dasar pada pengalokasian DAU Provinsi yang merupakan cerminan dari gaji pegawai sangat luar biasa dominan, yaitu diatas 100%, sehingga peran celah fiskal menjadi bernilai negatif. Hanya pada DAU Formula 2006 peran alokasi dasar hanya sebesar 13%.

Dengan peran alokasi dasar yang sangat luar biasa dominan tersebut jelas pengalokasian DAU bagi provinsi pada tahun 2006 dan 2007 sama sekali tidak mencerminkan konsep DAU yang bertujuan untuk meminimalkan kesenjangan fiskal antar daerah. Kondisi ini juga diperkuat dengan angka

Universitas Indonesia

Indeks Williamson. Pada saat peran alokasi dasar diatas 100% seperti pada DAU Formula 2007, angka Indeks Williamson menjadi lebih besar dibandingkan dengan pada saat alokasi dasar hanya sebesar 13% seperti pada DAU Formula 2006. Dengan demikian makin besar peran alokasi dasar pada pengalokasian DAU bagi provinsi akan makin memperbesar pula kesenjangan fiskal antar provinsi, demikian pula sebaliknya.

2. Pada variabel-variabel kebutuhan fiskal dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Makin rendah peran Jumlah Penduduk ternyata mengakibatkan alokasi DAU makin tidak merata yang ditunjukkan dengan makin besarnya nilai Indeks Williamson.
 - b. Makin rendah peran Luas Wilayah ternyata mengakibatkan alokasi DAU provinsi makin tidak merata yang ditunjukkan dengan makin besarnya nilai Indeks Williamson
 - c. Makin besar peran IKK ternyata makin memperbesar ketidakmerataan alokasi DAU provinsi yang ditunjukkan dengan makin besarnya nilai Indeks Williamson
 - d. Apabila IPM tidak dimasukkan dalam penghitungan DAU provinsi justru membuat alokasi DAU provinsi lebih merata.
 - e. Makin besar peran PDRB per kapita ternyata mengakibatkan alokasi DAU provinsi makin tidak merata yang ditunjukkan dengan makin besarnya Indeks Williamson.
3. Pada variabel kapasitas fiskal dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Makin besar peran PAD ternyata justru makin memperbesar ketidakmerataan alokasi DAU provinsi yang ditunjukkan dengan makin besarnya nilai Indeks Williamson
 - b. Makin besar peran Bagi Hasil Sumber Daya Alam (BHSDA) ternyata makin memperbesar ketidakmerataan alokasi DAU provinsi yang ditunjukkan dengan makin besarnya nilai Indeks Williamson
 - c. Makin besar peran Bagi Hasil Pajak ternyata justru makin memperkecil ketidakmerataan alokasi DAU yang ditunjukkan dengan makin kecilnya nilai Indeks Williamson

Bobot masing-masing variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.10 diatas masih berdasarkan pada formula yang ada dalam UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tahun 2005, yaitu menggunakan variabel alokasi dasar yang berdiri sendiri untuk mencerminkan gaji pegawai. Penulis mencoba untuk mencari alternatif pengalokasian DAU dengan memasukkan unsur gaji pegawai sebagai salah satu unsur dalam perhitungan kaebutuhan fiskal, jadi bukan merupakan unsur yang berdiri sendiri dalam bentuk alokasi dasar. Kondisi ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{DAU} = f(\text{Celah Fiskal})$$

$$\text{DAU} = f((\text{Gaji Pegawai} + \text{Jumlah Penduduk} + \text{Luas Wilayah} + \text{IKK} + \text{IPM} + \text{Indeks PDRB Per Kapita}) - (\text{PAD} + \text{BH Sumber Daya Alam} + \text{BH Pajak}))$$

Apabila gaji pegawai bukan merupakan variabel yang berdiri sendiri dalam bentuk alokasi dasar, tetapi dimasukkan menjadi salah satu variabel penghitungan kebutuhan fiskal, maka bobot masing-masing variabel yang akan diperoleh adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.11 di bawah ini.

Berdasarkan Tabel 4.11 tersebut, apabila komponen gaji dimasukkan dalam penghitungan kebutuhan fiskal maka peran gaji dalam kebutuhan fiskal DAU Formula 2006 adalah sebesar 0.08 sehingga peran celah fiskal menjadi lebih besar lagi yaitu 0.92 atau diatas 90%. Kondisi ini jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan Tabel 4.10 yang menunjukkan peran gaji sebesar 0.13 sehingga peran celah fiskal hanya 0.87. Demikian juga untuk DAU Perpres 2006, DAU Formula 2007, dan DAU Perpres 2007 yang kesemuanya menunjukkan perbaikan peran celah fiskal dalam formula DAU dibandingkan dengan peran celah fiskal sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.10. Dengan demikian hal ini menunjukkan kondisi bahwa apabila komponen gaji tidak merupakan variabel yang berdiri sendiri dalam bentuk Alokasi Dasar melainkan dimasukkan dalam unsur kebutuhan fiskal akan makin memperbesar porsi celah fiskal.

Tabel 4.11
Koefisien Variabel Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal DAU Provinsi
Apabila Gaji Menjadi Unsur Variabel Kebutuhan Fiskal

Variabel	DAU 2006		DAU 2007	
	Formula	Perpres	Formula	Perpres
Kebutuhan Fiskal				
Gaji Pegawai	0.08	0.56	0.56	0.51
Penduduk	0.66	0.23	0.27	0.31
Luas Wilayah	0.23	0.10	0.09	0.08
IKK	0.01	0.04	0.03	0.04
IPM	0.00	0.01	0.04	0.03
PDRB per kapita	0.02	0.06	0.01	0.03
	1.00	1.00	1.00	1.00
Kapasitas Fiskal				
PAD	0.59	0.47	0.71	0.41
BH SDA	0.13	0.13	0.16	0.14
BH Pajak	0.27	0.40	0.14	0.45
	1.00	1.00	1.00	1.00
Indeks Williamson	1.77544	1.92699	1.82709	1.85553

Sumber: Departemen Keuangan, diolah

Dalam Tabel 4.11 di atas bahwa apabila komponen gaji pegawai dimasukkan dalam unsur kebutuhan fiskal maka peranan komponen gaji pegawai tetap memiliki kontribusi yang paling besar dibandingkan dengan variabel-variabel yang lain. Hal ini menjadi tidak masalah karena komponen gaji pegawai tersebut dihitung sebagai komponen yang mewakili kebutuhan fiskal daerah. Sehingga konsep pengalokasian DAU yang bertujuan untuk memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah yang dihitung berdasarkan konsep celah fiskal daerah akan terlaksana. Variabel kebutuhan fiskal berikutnya yang memiliki kontribusi cukup besar dalam menghitung kebutuhan fiskal setelah variabel gaji pegawai adalah variabel jumlah penduduk, luas wilayah, IKK, dan PDRB per kapita. Sedangkan kontribusi variabel IPM perlu diteliti kembali mengingat pada

pengalokasian DAU provinsi tahun 2006 variabel IPM sama sekali tidak memiliki kontribusi.

4.3.2 DAU Kabupaten/Kota

Pada bagian ini akan dijelaskan analisa hasil regresi terboboti alokasi DAU untuk kabupaten/kota. Sama seperti pada provinsi, regresi terboboti alokasi DAU kabupaten/kota juga dilakukan untuk alokasi DAU berdasarkan Formula dan alokasi DAU berdasarkan Peraturan Presiden untuk tahun 2006 dan 2007.

Untuk menyatakan bahwa model regresi yang dihasilkan adalah baik, penulis menggunakan tiga kriteria evaluasi, yaitu

4.3.2.1 Kriteria ekonomi

Hasil regresi terboboti alokasi DAU kabupaten/kota pada 4 (empat) Tabel diatas menunjukkan tanda untuk variabel bebas sudah sesuai dengan tanda yang diharapkan, yaitu gaji pegawai (GAJI), jumlah penduduk (PDDK), luas wilayah (LW), indeks kemahalan konstruksi (IKK), PDRB per kapita (PDRB), dan indeks pembangunan manusia (IPMI) bertanda positif, sedangkan pendapatan asli daerah (PAD), bagi hasil sumber daya alam (BHSDA), dan bagi hasil pajak (BHP) bertanda negatif.

4.3.2.2 Kriteria Statistik

Uji T, dari hasil 4 (empat) regresi terboboti DAU kabupaten/kota diatas, ternyata seluruh variabel bebas mempunyai *P-value* > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempengaruhi alokasi DAU kabupaten/kota secara signifikan.

Uji kedua adalah uji F atau uji model secara keseluruhan. Apabila digunakan $\alpha = 5\%$, maka baik regresi terboboti DAU Formula maupun regresi terboboti DAU Perpres pada tahun 2006 dan 2007 semuanya menunjukkan Probability (F-statistics) < α , ini berarti tolak H_0 atau dengan kata lain ada hubungan linier antara variabel independent terhadap variabel dependen. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa variabel-variabel DAU kabupaten/kota sebagai variabel independen hasil

Universitas Indonesia

estimator mempengaruhi secara signifikan alokasi DAU kabupaten/kota sebagai variabel terikat.

Pengujian ketiga yaitu melihat koefisien determinasi R^2 atau R^2 adjusted. Nilai R^2 dan R^2 adjusted dari DAU Formula maupun DAU Perpres adalah berada pada kisaran 97.30% sampai dengan 100%. Ini menunjukkan bahwa estimasi dalam kedua regresi tersebut dapat menjelaskan keragaman yang terjadi dalam model secara sempurna, atau hampir 100%.

4.3.2.3 Kriteria ekonometrik

a. Uji Multicollinearity

Uji multikolinieriti diperlukan untuk mendeteksi adanya korelasi antar beberapa variabel bebas dalam suatu model. Dari hasil uji multikolinieriti diketahui bahwa nilai korelasi antar variabel baik dalam DAU Formula maupun DAU Perpres masih lebih rendah dibandingkan dengan nilai R^2 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieriti.

b. Uji Autocorrelations

Korelasi serial terjadi apabila data yang digunakan adalah data time series, sedangkan data yang digunakan dalam analisis ini adalah *cross section*, sehingga uji ini pun tidak diperlukan.

c. Uji Heterocedasticity

Tabel 4.12

Hasil Uji Heteroscedasticity Regresi Berganda Terboboti
DAU Kabupaten/Kota

DAU	F-statistic	Probability	Obs*R-squared	Probability
Formula 2006	0.511282	0.952977	9.415622	0.949323
Perpres 2006	15.36630	0.000000	173.5724	0.000000
Formula 2007	1090.818	0.000000	425.0168	0.000000
Perpres 2007	107.4243	0.000000	357.3130	0.000000

Sumber: Departemen Keuangan, diolah

Pengujian dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

H_0 : tidak ada heteroskedastisitas (homoskedastis).

H_1 : ada heteroskedastisitas.

Dengan $\alpha = 5\%$, tolak H_0 jika Probability (P-value) $< \alpha$.

Dari hasil uji heteroskedastisitas regresi terboboti DAU Formula maupun DAU Perpres pada tahun 2006 dan 2007 terdapat nilai Probability (P-Value) dibawah 5%, yaitu 0% untuk DAU Perpres 2006, DAU Formula 2007, dan DAU Perpres 2007, maka berarti H_0 ditolak atau H_1 diterima yang menunjukkan adanya heteroskedastisitas.

Masalah heteroskedastisitas ini kemudian dihilangkan dengan melakukan tindakan perbaikan model regresi. Metode yang digunakan untuk menghilangkan masalah heteroskedastisitas adalah metode White atau Newey-West yang merupakan metode koreksi standard error atau *heteroscedasticity-corrected standard errors*. Dalam eviews penghilangan masalah heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode yang dikenal dengan istilah *White Heteroscedasticity Consistent Covariance*. Koefisien regresi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel di bawah sudah menggunakan metode *white heteroscedasticity consistent covariance*.

Perbandingan koefisien masing-masing variabel DAU pada DAU Formula dan DAU Perpres kabupaten/Kota untuk tahun 2006 dan 2007 hasil regresi berganda terboboti adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.13 di bawah ini. Dalam Tabel 4.13 tersebut ditunjukkan bahwa berbeda halnya dengan DAU provinsi, pada DAU kabupaten/kota seluruh variable DAU yang terdiri dari alokasi dasar, kebutuhan fiskal, dan kapasitas fiskal menunjukkan nilai yang sangat signifikan terhadap pengalokasian DAU.

Tabel 4.13
Koefisien Hasil Regresi Berganda Terboboti DAU Kabupaten/Kota

Variabel	DAU 2006		DAU 2007	
	Formula	Perpres	Formula	Perpres
Gaji Pegawai	0.672470 *)	0.753008 *)	0.680890 *)	0.702131 *)
Celah Fiskal	0.327530 *)	0.247992 *)	0.319110 *)	0.297869 *)
IP	0.446561 *)	0.452071 *)	0.472076 *)	0.470419 *)
ILW	0.288176 *)	0.245671 *)	0.295649 *)	0.285685 *)
IKK	0.095992 *)	0.122491 *)	0.104200 *)	0.107426 *)
IPM Invers	0.019529 *)	0.041735 *)	0.104479 *)	0.092049 *)
IPDRB	0.108931 *)	0.093039 *)	0.026072 *)	0.030634 *)
PAD	-0.159085 *)	-0.149575 *)	-0.102010 *)	-0.096923 *)
BHSDA	-0.448706 *)	-0.160507 *)	-0.268809 *)	-0.160703 *)
BHP	-0.140593 *)	-0.159365 *)	-0.119952 *)	-0.125274 *)

Sumber: Departemen Keuangan, diolah

Keterangan:

- *) $P\text{-value} < 0.01$, sangat signifikan
- ***) $0.01 < P\text{-value} < 0.05$, signifikan
- ****) $0.05 < P\text{-value} < 0.1$, cukup signifikan
- ns $P\text{-value} > 0.1$, tidak signifikan

Hasil lengkap regresi terboboti DAU Provinsi dapat dilihat pada Lampiran 15 sampai dengan 18.

Berdasarkan hasil regresi terboboti DAU kabupaten/kota tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pada DAU Formula 2006, peran Alokasi Dasar (AD) yang dicerminkan pada koefisien Gaji adalah sebesar 0.67 atau 67%. Hal ini berarti bahwa peran Celah Fiskal (CF) adalah sebesar 0.33 atau 33%. Akan tetapi pada DAU Perpres 2006, peran Alokasi Dasar justru meningkat menjadi 0.75 yang berarti peran celah fiskal turun menjadi 0.25. Pada DAU Formula 2007, peran Alokasi Dasar (AD) yang dicerminkan pada koefisien Gaji adalah sebesar 0.68 atau 68%. Hal ini berarti bahwa peran Celah Fiskal (CF) adalah sebesar 0.32 atau 32%. Akan tetapi pada DAU Perpres 2007, peran Alokasi Dasar justru meningkat menjadi 0.70 yang berarti peran celah fiskal turun menjadi 0.30.

Dengan demikian alokasi DAU kabupaten/kota pada tahun 2006 dan 2007 lebih banyak ditentukan oleh alokasi dasar atau gaji pegawai dan tidak berdasarkan pada konsep celah fiskal. Konsep DAU berdasarkan celah fiskal dalam rangka menempatkan DAU untuk memperkecil kesenjangan fiskal antar kabupaten/kota menjadi makin memburuk pada DAU Perpres dibandingkan dengan DAU Formula pada tahun 2006 dan 2007.

Apabila koefisien hasil regresi dalam Tabel 4.13 dirasionalkan menjadi bobot bagi masing-masing variabel dalam formula DAU, maka perbandingan bobot masing-masing variabel pada kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal DAU Tahun 2006 dan 2007 ditunjukkan dalam Tabel 4.14 di bawah ini.

Tabel 4.14
Bobot Variabel Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal DAU
Kabupaten/Kota Setelah Rasionalisasi Koefisien

Vaiabel	DAU 2006		DAU 2007	
	Formula	Perpres	Formula	Perpres
Komposisi Formula				
1. Alokasi Dasar	0.67	0.75	0.68	0.70
2. Celah Fiskal	0.33	0.25	0.32	0.30
	1.00	1.00	1.00	1.00
Kebutuhan Fiskal				
Penduduk	0.47	0.47	0.47	0.48
Luas Wilayah	0.30	0.26	0.29	0.29
IKK	0.10	0.13	0.10	0.11
IPM	0.02	0.04	0.10	0.09
PDRB per kapita	0.11	0.10	0.03	0.03
	1.00	1.00	1.00	1.00
Kapasitas Fiskal				
PAD	0.21	0.32	0.21	0.25
BH SDA	0.60	0.34	0.55	0.42
BH Pajak	0.19	0.34	0.24	0.33
	1.00	1.00	1.00	1.00
Indeks Williamson	0.89140	0.91050	0.85823	0.86892

Sumber: Departemen Keuangan, diolah

Universitas Indonesia

Dari Tabel 4.14 tersebut dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peran alokasi dasar pada pengalokasian DAU kabupaten/kota yang merupakan cerminan dari gaji pegawai cukup dominan, yaitu diatas 65%. Dengan peran alokasi dasar yang cukup dominan tersebut jelas pengalokasian DAU bagi kabupaten/kota pada tahun 2006 dan 2007 belum mencerminkan konsep DAU yang bertujuan untuk meminimalkan kesenjangan fiskal antar daerah. Kondisi ini juga diperkuat dengan angka Indeks Williamson. Pada saat peran alokasi dasar diatas 70% seperti pada DAU Formula 2007, angka Indeks Williamson menjadi lebih besar dibandingkan dengan pada saat peran alokasi dasar hanya dibawah 70% seperti pada DAU Formula 2006 dan 2007. Dengan demikian makin besar peran alokasi dasar pada pengalokasian DAU bagi kabupaten/kota akan makin memperbesar pula kesenjangan fiskal antar kabupaten/kota, demikian pula sebaliknya.
2. Pada variabel-variabel kebutuhan fiskal dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Makin rendah peran Jumlah Penduduk ternyata mengakibatkan alokasi DAU kabupaten/kota makin tidak merata yang ditunjukkan dengan makin besarnya nilai Indeks Williamson.
 - b. Makin rendah peran Luas Wilayah ternyata mengakibatkan alokasi DAU kabupaten/kota makin merata yang ditunjukkan dengan makin rendahnya nilai Indeks Williamson
 - c. Makin besar peran IKK ternyata makin memperbesar ketidakmerataan alokasi DAU kabupaten/kota yang ditunjukkan dengan makin besarnya nilai Indeks Williamson
 - d. Makin besar peran IPM ternyata makin memperkecil ketidakmerataan alokasi DAU kabupaten/kota yang ditunjukkan dengan makin rendahnya nilai Indeks Williamson
 - e. Makin besar peran PDRB per kapita ternyata mengakibatkan alokasi DAU kabupaten/kota makin tidak merata yang ditunjukkan dengan makin besarnya Indeks Williamson.

3. Pada variabel kapasitas fiskal dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Makin besar peran PAD ternyata justru makin memperbesar ketidakmerataan alokasi DAU kabupaten/kota yang ditunjukkan dengan makin besarnya nilai Indeks Williamson
 - b. Makin besar peran Bagi Hasil Sumber Daya Alam (BHSDA) ternyata makin memperbesar ketidakmerataan alokasi DAU provinsi yang ditunjukkan dengan makin besarnya nilai Indeks Williamson
 - c. Makin besar peran Bagi Hasil Pajak ternyata justru makin memperkecil ketidakmerataan alokasi DAU yang ditunjukkan dengan makin kecilnya nilai Indeks Williamson

Bobot masing-masing variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.14 diatas masih berdasarkan pada formula yang ada dalam UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tahun 2005, yaitu menggunakan variabel alokasi dasar yang berdiri sendiri untuk mencerminkan gaji pegawai. Penulis mencoba untuk mencari alternatif penghitungan alokasi DAU dengan memasukkan unsur gaji pegawai sebagai salah satu unsur dalam perhitungan kebutuhan fiskal, jadi bukan merupakan unsur yang berdiri sendiri dalam bentuk alokasi dasar. Kondisi ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{DAU} = f(\text{Celah Fiskal})$$

$$\text{DAU} = f((\text{Gaji Pegawai} + \text{Jumlah Penduduk} + \text{Luas Wilayah} + \text{IKK} + \text{IPM} + \text{Indeks PDRB Per Kapita}) - (\text{PAD} + \text{BH Sumber Daya Alam} + \text{BH Pajak}))$$

Apabila gaji pegawai bukan merupakan variabel yang berdiri sendiri dalam bentuk alokasi dasar, tetapi dimasukkan menjadi salah satu variabel penghitungan kebutuhan fiskal, maka bobot masing-masing variabel yang akan diperoleh adalah sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.15 di bawah ini.

Tabel 4.15

**Koefisien Variabel Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal DAU
Kabupaten/Kota Apabila Gaji Menjadi Unsur Variabel Kebutuhan Fiskal**

Variabel	DAU 2006		DAU 2007	
	Formula	Perpres	Formula	Perpres
Kebutuhan Fiskal				
Gaji Pegawai	0.41	0.44	0.40	0.42
Penduduk	0.27	0.27	0.28	0.28
Luas Wilayah	0.18	0.14	0.18	0.17
IKK	0.06	0.07	0.06	0.06
IPM	0.01	0.02	0.06	0.05
PDRB per kapita	0.07	0.06	0.02	0.02
	1.00	1.00	1.00	1.00
Kapasitas Fiskal				
PAD	0.21	0.32	0.21	0.21
BH SDA	0.60	0.34	0.55	0.55
BH Pajak	0.19	0.34	0.24	0.24
	1.00	1.00	1.00	1.00

Sumber: Departemen Keuangan, diolah

Berdasarkan Tabel 4.15 tersebut, apabila komponen gaji dimasukkan dalam penghitungan kebutuhan fiskal maka peran gaji dalam kebutuhan fiskal DAU Formula 2006 adalah sebesar 0.41 sehingga peran celah fiskal menjadi lebih besar lagi yaitu 0.59. Kondisi ini jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan Tabel 4.12 yang menunjukkan peran gaji sebesar 0.67 sehingga peran celah fiskal hanya 0.33. Demikian juga untuk DAU Perpres 2006, DAU Formula 2007, dan DAU Perpres 2007 yang kesemuanya menunjukkan perbaikan peran celah fiskal dalam formula DAU dibandingkan dengan peran celah fiskal sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.13. Dengan demikian hal ini menunjukkan kondisi bahwa apabila komponen gaji tidak merupakan variabel yang berdiri sendiri dalam bentuk Alokasi Dasar melainkan dimasukkan dalam unsur kebutuhan fiskal, akan makin memperbesar porsi celah fiskal

Dalam Tabel 4.15 di atas bahwa apabila komponen gaji pegawai dimasukkan dalam unsur kebutuhan fiskal maka peranan komponen gaji pegawai tetap memiliki kontribusi yang paling besar dibandingkan dengan variabel-variabel yang lain. Hal ini menjadi tidak masalah karena komponen gaji pegawai tersebut dihitung sebagai komponen yang mewakili kebutuhan fiskal daerah. Sehingga konsep pengalokasian DAU yang bertujuan untuk memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah yang dihitung berdasarkan konsep celah fiskal daerah akan terlaksana. Variabel kebutuhan fiskal berikutnya yang memiliki kontribusi cukup besar dalam menghitung kebutuhan fiskal setelah variabel gaji pegawai adalah variabel jumlah penduduk, luas wilayah, IKK, dan IPM atau PDRB per kapita.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab terdahulu, pada bagian ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengalokasian DAU kepada provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan berdasarkan formula murni sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan lebih dapat menunjukkan kinerja DAU sesuai dengan fungsinya untuk memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah. Hal ini dibuktikan sebagai berikut:
 - a. Indeks Williamson DAU berdasarkan formula murni lebih kecil dibandingkan dengan Indeks Williamson berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Alokasi DAU.
 - b. Pada pengalokasian DAU berdasarkan Peraturan Presiden pada tahun 2007 telah mengakibatkan provinsi yang berhasil melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pendapatan asli daerahnya (PAD) sehingga memiliki nilai PAD yang besar justru mendapat DAU yang lebih kecil dengan lebih besarnya koefisien nilai pengurang sebesar 0.151736 dibandingkan dengan pada DAU berdasarkan Formula yang hanya sebesar 0.113644.
2. Pengalokasian DAU bagi provinsi pada tahun 2007 berdasarkan Perpres menunjukkan bahwa provinsi yang tingkat pencapaian pembangunan manusianya masih rendah, yang dicerminkan dari kesejahteraan penduduk atas layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan yang masih rendah, justru mendapat DAU yang lebih kecil karena rendahnya koefisien IPM dibandingkan dengan pengalokasian dengan menggunakan Formula.

3. Berkaitan dengan masing-masing variabel dalam formula DAU, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Berdasarkan hasil uji regresi, semua variabel dalam formula DAU memiliki tanda yang sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu variabel kebutuhan fiskal bertanda positif sedangkan variabel kapasitas fiskal bertanda negatif.
 - b. Peran alokasi dasar pada pengalokasian DAU Provinsi yang merupakan cerminan dari gaji pegawai sangat luar biasa dominan, yaitu diatas 100%, sehingga peran celah fiskal menjadi bernilai negatif. Hanya pada DAU Formula 2006 peran alokasi dasar hanya sebesar 13%. Sedangkan peran alokasi dasar pada pengalokasian DAU kabupaten/kota cukup dominan yaitu diatas 65%. Dengan peran alokasi dasar yang cukup besar tersebut jelas pengalokasian DAU bagi provinsi dan kabupaten/kota pada tahun 2006 dan 2007 belum mencerminkan konsep DAU yang bertujuan untuk meminimalkan kesenjangan fiskal antar daerah.
 - c. Makin rendah peran variabel Jumlah Penduduk ternyata mengakibatkan alokasi DAU provinsi dan kabupaten/kota makin tidak merata yang ditunjukkan dengan makin besarnya nilai Indeks Williamson.
 - d. Makin rendah peran variabel Luas Wilayah ternyata mengakibatkan alokasi DAU provinsi dan kabupaten/kota makin tidak merata yang ditunjukkan dengan makin besarnya nilai Indeks Williamson.
 - e. Makin besar peran variabel Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) ternyata makin memperbesar ketidakmerataan alokasi DAU provinsi dan kabupaten/kota yang ditunjukkan dengan makin besarnya nilai Indeks Williamson.
 - f. Makin besar peran variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ternyata makin memperkecil ketidakmerataan alokasi DAU provinsi dan kabupaten/kota yang ditunjukkan dengan makin rendahnya nilai Indeks Williamson.
 - g. Makin besar peran variabel PDRB per kapita ternyata mengakibatkan alokasi DAU provinsi dan kabupaten/kota makin tidak merata yang ditunjukkan dengan makin besarnya Indeks Williamson.

- h. Makin besar peran variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) ternyata justru makin memperbesar ketidakmerataan alokasi DAU provinsi dan kabupaten/kota yang ditunjukkan dengan makin besarnya nilai Indeks Williamson
- i. Makin besar peran Bagi Hasil Sumber Daya Alam (BHSDA) ternyata makin memperbesar ketidakmerataan alokasi DAU provinsi dan kabupaten/kota yang ditunjukkan dengan makin besarnya nilai Indeks Williamson
- j. Makin besar peran Bagi Hasil Pajak ternyata justru makin memperkecil ketidakmerataan alokasi DAU provinsi dan kabupaten/kota yang ditunjukkan dengan makin kecilnya nilai Indeks Williamson
- k. Apabila komponen gaji tidak merupakan variabel yang berdiri sendiri dalam bentuk Alokasi Dasar melainkan dimasukkan dalam unsur kebutuhan fiskal maka akan makin memperbesar porsi celah fiskal dalam pengalokasian DAU.

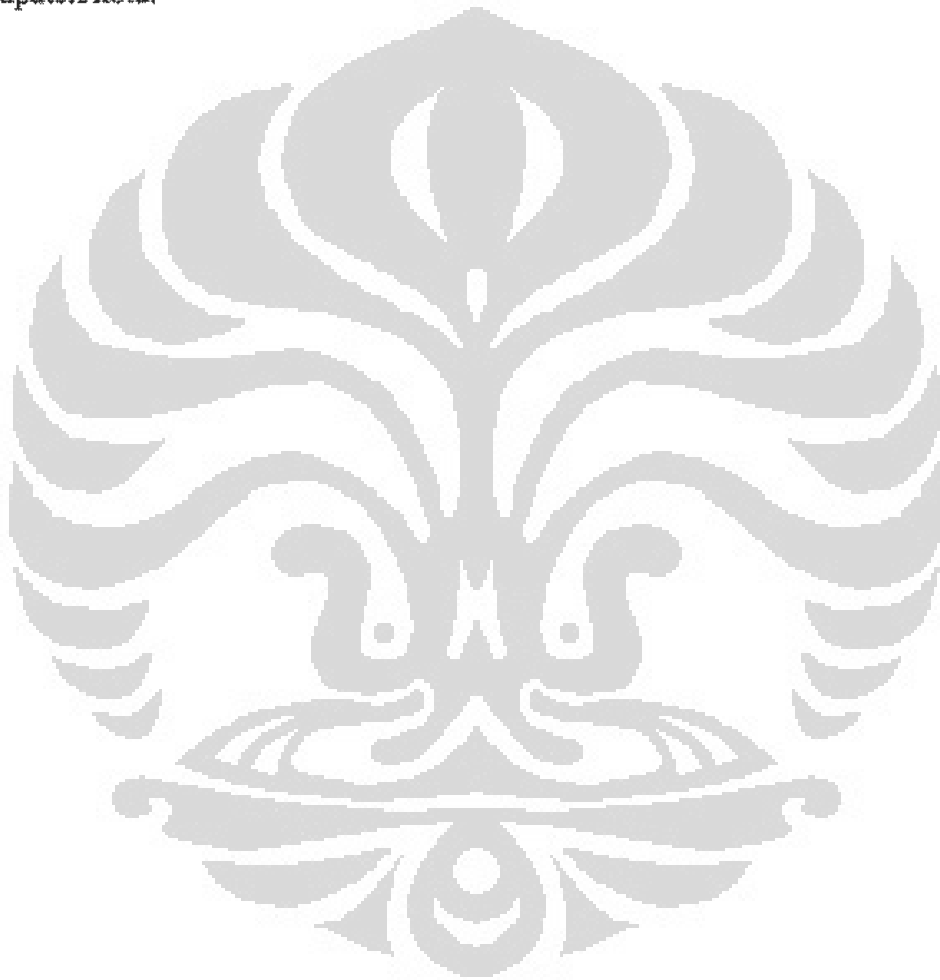
5.1. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dalam rangka untuk terus memperbaiki pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia terutama dalam pengalokasian Dana Alokasi Umum, perlu kami sampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu terus melanjutkan penghapusan kebijakan *hold harmless* dalam pengalokasian DAU kepada provinsi dan kabupaten/kota pada tahun-tahun yang akan datang. Penghapusan kebijakan *hold harmless* dilakukan dengan mengalokasikan DAU berdasarkan formula murni sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Berdasarkan hasil analisa kuantitatif, kebijakan *non holdharmless* ini terbukti lebih dapat menunjukkan kinerja DAU sesuai dengan fungsinya untuk memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah. Hal ini ditunjukkan dengan lebih kecilnya Indeks Williamson DAU berdasarkan formula murni dibandingkan dengan Indeks Williamson berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Alokasi DAU.
2. Pemerintah diharapkan dapat terus mengembangkan konsep DAU yang lebih didasari pada konsep celah fiskal. Hasil analisa kuantitatif menunjukkan bahwa variabel alokasi dasar pada formula DAU yang dicerminkan oleh belanja pegawai menunjukkan masih menjadi faktor penyumbang yang cukup signifikan pada pengalokasian DAU. Hal ini terjadi pada alokasi DAU bagi provinsi dan juga bagi kabupaten/kota. Maka tidak salah apabila selama ini banyak daerah yang menganggap bahwa alokasi DAU semata-mata untuk belanja pegawai.
Hasil analisa kuantitatif juga menunjukkan bahwa apabila gaji pegawai tidak merupakan variabel yang berdiri sendiri dalam bentuk alokasi dasar, tetapi dimasukkan dalam komponen kebutuhan fiskal, akan menunjukkan konsep celah fiskal yang lebih baik.
3. Selain itu Pemerintah perlu meninjau kembali bobot masing-masing variabel yang digunakan dalam penghitungan dan pengalokasian DAU agar DAU

lebih dapat berfungsi pemeratakan pendapatan baik di level provinsi maupun kabupaten/kota.

4. Pemerintah perlu menciptakan formula DAU dengan membedakan variabel-variabel yang digunakan dalam formula DAU bagi provinsi dengan formula DAU bagi kabupaten/kota karena ada variabel yang sangat signifikan berperan dalam alokasi DAU provinsi atau kabupaten/kota namun di sisi lain sama sekali tidak memiliki peran dalam alokasi DAU provinsi atau kabupaten/kota.



DAFTAR PUSTAKA

- Bahl, Roy, W., 1992. *Urban Public Finance in Developing Countries*, Published of the World Bank, Oxford University Press, New York.
- Davey, Kenneth J., 1988, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah, Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, UI Press, Jakarta.
- Devas, Nick; Brian Binder; Anne Booth; Kenneth Davey; Roy Kelly, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bekerjasama dengan Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin dan Universitas Andalas disponsori oleh Governance Partnership – UNDP, Juli 2001, *Laporan Awal Studi Formulasi Dana Alokasi Umum Tahun 2002*, Jakarta, Indonesia.
- Gujarati, Damodar, 1999, *Ekonometrika Dasar*, diterjemahkan oleh Sumarno Zein, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Handra, Hefrizal, 2007, Penerapan Formula Murni (Non Holdharmless) DAU 2008: Sebuah Tantangan Bagi Pemerintah Pusat, Makalah pada Diskusi Ilmiah Konsep dan Kebijakan DAU 2008, FE Andalas, Padang, Indonesia
- Hamid, Edy Suandi, 2005, *Formula Alternatif DAU: Upaya Mengatasi Ketimpangan Fiskal Dalam Era Otonomi Daerah*, UII Press Yogyakarta.
- Hendranata, Anton, 2004, *Materi Kuliah Ekonometrika Terapan pada Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik*, Universitas Indonesia.
- Jorge Martinez-Vazquez, *Principles for the Design of Equalization Grants*, Indonesia Workshop, May 2001
- LPEM-FEUI, 2000, *Laporan Akhir Model Dana Alokasi Umum (DAU) LPEM FEUI*, LPEM-FEUI, Jakarta.
- Ma, Jun, 1997, *Intergovernmental Transfer in Nine Countries*, The World Bank, Washington D.C.

- Mardiasmo, Dr., MBA, Ak, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Musgrave, Richard A. dan Musgrave, Peggy A., 1993, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Kelima, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Republik Indonesia, 1999, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, Republik Indonesia, Jakarta.
- _____, 1999, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Republik Indonesia, Jakarta.
- _____, 2000, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Republik Indonesia, Jakarta.
- _____, 2004, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Republik Indonesia, Jakarta.
- _____, 2004, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*, Republik Indonesia, Jakarta.
- _____, 2000, *Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan*, Republik Indonesia, Jakarta.
- _____, 2001, *Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan*, Republik Indonesia, Jakarta.
- _____, 2005, *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan*, Republik Indonesia, Jakarta.
- Saragih, Juli Panglima, 2003, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Shah, Anwar, 1994, *The Reform of Intergovernmental Fiscal Relations in Developing and Emerging Market Economics*, World Bank Policy Research Series 23. Washington, DC : The World Bank June.

- Sidik, Machfud Dr.; Dr. B. Raksaka Mahi; Dr. Robert Simanjutak, Dr. Bambang Brodjonegoro, 2002, *Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, LPEM FEUI, MPKP FEUI, Ditjen PKPD, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Sidik, Machfud, 2001, *Studi Empiris Desentralisasi Fiskal : Prinsip, Pelaksanaan Di Berbagai Negara serta Evaluasi Pelaksanaan Penyerahan P3D (Personil, Peralatan, Pembiayaan Dan Dokumentasi) Sebagai Konsekuensi Kebijakan Pemerintah*, Sidang Pleno ISEI Ke-X, pada 13-14 April 2001, Batam.
- _____, 2001, *Studi Empiris Desentralisasi Fiskal: Prinsip, Pelaksanaan Di Berbagai Negara serta Evaluasi Pelaksanaan Penyerahan P3D (Personil, Peralatan, Pembiayaan Dan Dokumentasi) Sebagai Konsekuensi Kebijakan Pemerintah*, Seminar Nasional Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah di FE-Universitas Airlangga, 11 Agustus 2001. Surabaya.
- Simanjutak, Dr. Robert; Dr. B. Raksaka Mahi; Karyaman Muehtar, SE, M.Sc; Iman Rozani, SE, M.Soc.Sc; R.H. Achmadi, SE, M.Soc.Sc, 2004, *Materi Kuliah Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah pada Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik*, Universitas Indonesia.
- Supranto, J., 1986, *Statistik Teori dan Aplikasi Jilid 1*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Susanti, Hera; Moh. Ikhsan; Widyanti, 1995, *Indikator-Indikator Makroekonomi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ter-Minassian, Teresa, 1997, *Fiscal Federalism In Theory and Practice*, International Monetary Fund, Washington.
- The World Bank, 2000, *Entering the 21st Century, World Bank Development Report 1999/2000*, The World Bank, Washington D.C.

Perhitungan Indeks Williamson DAU TA 2006, 2007, dan TA 2008 Kabupaten/Kota

Daerah	Penduduk	DAU TA 2006				DAU TA 2007				DAU TA 2008					
		PAD + DBH + DAU (Keppras)	PAD + DBH + DAU (Formula)	(y1 - ybar) ² Penduduk total penduduk (Perpras)	(y1 - ybar) ² Penduduk total penduduk (Formula)	Penduduk	PAD + DBH + DAU (Keppras)	(y1 - ybar) ² Penduduk total penduduk (Perpras)	(y1 - ybar) ² Penduduk total penduduk (Formula)	Penduduk	PAD + DBH + DAU (Keppras)	(y1 - ybar) ² Penduduk total penduduk (Perpras)	(y1 - ybar) ² Penduduk total penduduk (Formula)		
Kab. Aceh Barat	185.258	229,45	233.5078872	18.06822156	17.11683772	151.339,00	340,10	9,78	341,46	9,58	151.339	354,79	16,65	354,79	16,54
Kab. Aceh Besar	218.958	380,877457	386.6792639	0,000513097	0,026830435	301.110,00	403,07	4,18	404,59	3,96	301.110	464,92	2,89	464,92	2,63
Kab. Aceh Selatan	190.539	295,1823316	300,5688892	6,567560315	5,907068067	193.239,00	356,41	9,28	357,82	9,01	193.239	376,82	15,58	376,82	15,46
Kab. Aceh Singkil	152.594	193,5840738	198,3944173	24,93804269	24,16343514	152.525,00	208,89	44,04	207,81	44,60	152.525	215,29	61,26	215,29	61,06
Kab. Aceh Tengah	192.027	274,3073933	278,8431228	10,49785544	9,574787627	163.688,00	318,61	15,24	318,25	14,69	163.688	349,99	19,37	349,99	19,25
Kab. Aceh Tenggara	170.245	310,2425934	313,8100521	4,083212975	3,715627801	171.300,00	345,04	9,98	347,15	9,79	171.300	385,66	16,26	385,66	16,15
Kab. Aceh Timur	309.699	244,423	248,4843854	27,52398714	26,9125467	308.316,00	425,21	1,51	426,67	1,39	308.316	440,86	6,51	440,86	6,41
Kab. Aceh Utara	404.592	471,943042	374,0187416	18,88982434	0,130964597	498.442,00	520,41	9,25	520,45	9,28	498.442	737,14	122,80	737,14	123,33
Kab. Bireuen	352.312	393,4274934	398,9612083	0,23408022	0,502853428	354.110,00	434,82	0,85	436,65	0,72	354.110	472,98	1,92	473,98	1,89
Kab. Aceh Pidie	481.587	451,4963495	459,3198468	11,11899701	13,39632835	477.310,00	431,04	1,46	433,97	1,24	477.310	424,58	15,35	424,58	15,37
Kab. Simeulue	72.110	149,309	151,5970425	18,37302799	18,01732453	79.545,00	221,03	20,86	221,90	20,71	79.545	241,37	26,51	241,37	26,41
Kota Banda Aceh	239.621	320,8107441	325,570331	4,17699696	3,549463869	178.360,00	370,45	6,34	373,03	6,11	178.360	406,97	6,53	406,97	6,45
Kota Sabang	29.079	196,6725188	199,2036234	4,69984909	4,56600527	28.828,00	228,09	7,12	228,93	7,08	28.828	228,24	10,73	228,24	10,69
Kota Langsa	134.247	222,1869886	225,6222162	16,11235582	15,42509394	138.538,00	246,11	29,05	247,06	28,79	138.538	275,29	35,17	275,29	35,04
Kota Lhokseumawe	109.932	235,2972071	238,1380184	14,14581098	13,6012327	108.218,00	305,66	16,84	306,96	16,80	108.218	328,15	23,68	328,15	23,54
Kab. Nagan Raya	112.961	179,312	192,8783287	21,83227887	10,04169051	123.905,00	221,84	32,28	222,87	31,87	123.905	310,86	22,57	310,86	22,46
Kab. Aceh Jaya	92.798	171,54	180,0404203	17,25408965	19,19480833	81.018,00	259,84	11,17	260,92	11,06	81.018	246,04	19,63	246,04	19,59
Kab. Aceh Barat Daya	112.230	167,363	174,593291	28,65386151	22,71292122	116.703,00	280,11	17,23	281,15	17,02	116.703	306,73	22,16	306,73	22,05
Kab. Gayo Lues	88.784	189,358	182,4081194	12,00634738	12,89012184	73.003,00	253,28	14,28	254,23	14,15	73.003	274,46	18,59	274,46	18,58
Kab. Aceh Tamiang	226.889	294,4159885	297,8122809	8,188360003	7,597039378	237.062,00	355,63	11,54	356,82	11,32	237.062	389,05	12,97	389,05	12,86
Kab. Bener Meriah	102.336	201,9518272	208,5412263	15,8859274	14,81164036	108.210,00	198,95	34,66	199,86	33,99	108.210	250,58	33,61	250,58	33,46
Kab. Aceh	1.024.369	569,5544451	569,4807192	154,9920225	170,8088383	1.038.554,00	614,48	119,87	617,17	124,16	1.038.554	479,03	4,07	479,03	3,93
Kab. Deli	281.267	272,43	277,300589	14,76817086	13,28834842	267.629,00	330,48	20,28	332,25	19,70	267.629	380,96	27,11	380,96	26,93
Kab. Deli Serdang	1.589.638	769,8198	782,4709398	1117,691251	1191,610715	1.634.115,00	872,68	1329,83	876,72	1.346,73	1.634.115	965,39	1663,48	965,39	1668,92
Kab. Tanah Karo	318.207	383,956109	370,0750933	0,464209565	0,197789951	342.555,00	410,08	9,61	412,00	9,33	342.555	437,96	7,87	437,96	7,76
Kab. Labuhan Batu	951.773	562,2585434	570,5901496	148,7635197	160,6157386	887.157,00	670,24	209,50	672,91	214,79	887.157	727,01	222,19	727,01	223,19
Kab. Langkat	570.433	608,7850428	617,3383399	298,5925133	254,7333338	1.012.849,00	707,47	297,85	710,15	303,48	1.013.849	721,44	218,74	721,44	217,73
Kab. Mandailing Natal	386.150	298,969	304,2266979	12,45027053	10,91554497	413.750,00	393,81	17,04	395,47	16,44	413.750	423,34	13,99	423,34	13,73
Kab. Nias	441.807	315,773	321,8150976	9,039347103	7,465691444	442.019,00	375,88	13,82	377,70	13,21	442.019	428,68	12,96	428,68	12,60
Kab. Bimabangun	826.101	649,8558009	599,482479	169,43485	185,26312	841.198,00	683,43	187,27	686,34	172,04	841.198	732,58	199,05	732,58	199,92
Kab. Tapanuli Selatan	426.702	455,036	463,3459341	15,97173022	19,79234229	429.212,00	588,48	80,61	590,95	82,57	429.212	604,10	27,28	604,10	27,56
Kab. Tapanuli Tengah	263.035	252,1956641	255,8186124	22,38362216	21,14683681	297.843,00	284,66	38,88	289,68	39,34	297.843	325,06	46,71	325,06	46,46
Kab. Tapanuli Utara	256.201	303,9830389	309,8326911	7,288206216	6,265126901	256.444,00	320,84	22,43	322,77	21,84	256.444	370,93	22,59	370,93	22,41
Kab. Toba Samosir	159.877	235,534695	239,7257414	15,98871462	15,09347632	169.116,00	274,02	26,71	275,42	26,30	169.116	284,81	39,58	284,81	39,38
Kota Binjai	237.904	270,9346252	274,941397	13,7445634	12,78038881	244.256,00	317,50	22,46	318,71	22,07	244.256	347,37	29,53	347,37	29,35
Kota Medan	2.036.185	1122,280518	1130,578544	5277,055136	5396,908361	2.067.288,00	1.289,71	6714,39	1.293,15	6.769,93	2.067.288	1378,81	7371,60	1379,81	7379,80
Kota Palembang Siantar	230.487	282,721481	287,3390346	10,84175035	9,850073176	235.372,00	313,87	22,78	316,24	22,34	235.372	382,65	23,30	382,65	23,14
Kota Sibolga	86.717	184,3223387	187,1488452	15,307648	15,84374779	81.841,00	209,01	28,63	209,90	28,44	81.841	241,97	30,50	241,97	30,39
Kota Tanjung Balai	152.814	195,542284	199,8217978	24,71734526	23,90078598	158.475,00	220,63	41,18	221,81	40,84	158.475	253,65	47,58	253,65	47,19
Kota Tabing Tinggi	135.871	198,4812005	201,4922539	21,49172508	20,78392014	137.959,00	235,29	31,97	236,16	31,70	137.959	283,88	41,73	283,88	41,57
Kota Padang Sidempuan	177.498	222,0303	225,4535122	21,34566901	20,44382848	181.865,00	253,81	35,48	254,65	35,10	181.865	289,84	40,57	289,84	40,39
Kab. Pakpak Bharat	34.542	127,756	130,9405825	10,51295285	10,25877713	34.822,00	150,02	14,45	161,11	14,35	34.822	178,14	17,76	178,14	17,71
Kab. Nias Selatan	288.233	203,2244391	207,8229958	43,31477317	41,25089609	271.026,00	241,37	98,38	242,97	98,61	271.026	283,66	83,94	283,66	83,69
Kab. Humbang Hasandutan	152.997	225,0135573	229,4812879	17,71730948	16,72461338	162.757,00	286,63	28,85	288,44	28,39	162.757	284,13	35,89	284,13	35,73
Kab. Serdang Bedagai	568.176	338,557065	343,8224851	5,144015623	3,961519305	605.630,00	394,35	11,33	396,01	10,74	605.630	443,19	11,91	443,19	11,73

Perhitungan Indeks Williamson DAU TA 2006, 2007, dan TA 2008 Kabupaten/Kota

Daerah	Penduduk	DAU TA 2006				DAU TA 2007				DAU TA 2008					
		PAD + DBH + DAU (Keppres)	PAD + DBH + DAU (Formula)	(y1 - ybar) ² Penduduk /total penduduk (Keppres)	(y1 - ybar) ² Penduduk /total penduduk (Formula)	PAD + DBH + DAU (Keppres)	(y1 - ybar) ² Penduduk /total penduduk (Keppres)	PAD + DBH + DAU (Formula)	(y1 - ybar) ² Penduduk /total penduduk (Formula)	PAD + DBH + DAU (Keppres)	(y1 - ybar) ² Penduduk /total penduduk (Keppres)	PAD + DBH + DAU (Formula)	(y1 - ybar) ² Penduduk /total penduduk (Formula)		
Kab. Samosir	181.073	300.4317393	204.914376	20.31890209	19.32517481	130.662,00	222,99	33,70	224,49	33,27	130.662	245,52	42,20	245,52	42,04
Kab. Umapuduh Kota	331.744	334.9586238	340.7374442	3.405447102	2.614400747	327.203,00	370,58	11,60	372,34	11,13	327.203	418,65	12,15	418,65	12,02
Kab. Asam	424.266	367.8617344	373.8880269	0.366333826	0.121445826	426.767,00	410,42	4,44	412,27	4,10	426.767	453,55	5,92	453,55	5,01
Kab. Kepulauan Mentawai	67.540	222.1779566	225.4786556	2.1552112	7.620713725	66.332,00	260,78	9,72	282,11	9,57	66.332	317,32	11,30	317,32	11,25
Kab. Padang Pariaman	379.939	347.3059391	352.9257123	2.108945898	1.473862391	381.803,00	360,85	10,53	382,50	10,08	381.803	438,21	8,71	438,21	8,58
Kab. Pasaman	244.928	232.044	236.7610232	25.87351364	24.26808447	248.930,00	285,41	30,68	298,09	30,08	248.930	340,79	32,62	340,79	32,42
Kab. Pasisir Selatan	427.177	373.834025	379.9977024	0.121230035	0.003066713	429.647,00	413,07	3,68	414,92	3,86	429.647	462,42	4,18	462,42	4,09
Kab. Sawahlunto Sijunjung	183.148	238.3708034	242.7065912	17.93848131	16.86810699	192.997,00	273,55	30,63	275,00	30,16	192.997	305,70	37,02	305,70	36,84
Kab. Solok	341.501	317.9135415	323.7286652	6.33514131	5.386074153	347.288,00	354,38	17,33	358,23	16,71	347.288	400,87	18,54	400,87	18,48
Kab. Tanah Datar	343.178	336.674787	342.0670737	3.269566714	2.531294732	334.258,00	373,45	11,09	375,07	10,85	334.258	418,17	12,63	418,17	12,49
Kota Bukit Tinggi	103.607	216.9489253	219.2038235	13.42745249	12.90432021	102.515,00	253,42	20,03	254,49	19,82	102.515	278,91	25,86	278,91	25,55
Kota Padang Panjang	43.143	171.091159	173.7717918	9.029915369	8.801164723	50.279,00	190,83	10,77	191,65	10,67	50.279	232,20	17,93	232,20	17,87
Kota Padang	801.854	645.5747861	654.9516942	263.9760017	283.0675424	819.765,00	699,91	225,89	702,86	231,45	819.765	786,39	319,89	786,39	320,08
Kota Payakumbuh	103.908	214.9186311	217.8717422	13.6348393	13.15519021	104.084,00	237,50	23,93	238,42	23,43	104.084	278,32	26,19	278,32	26,08
Kota Sawahlunto	52.650	174.327859	176.9506487	10.72404296	10.45407008	52.827,00	204,16	15,90	204,99	15,80	52.827	228,32	19,78	228,32	19,72
Kota Solok	86.300	178.3052894	181.2182849	10.88983504	10.67683586	55.784,00	182,25	19,82	183,18	19,68	55.784	228,78	20,39	228,78	20,32
Kota Pariaman	74.921	188.05819	189.2581838	13.33026978	13.0907897	70.358,00	216,08	19,23	217,13	19,07	70.358	247,06	22,46	247,06	22,37
Kab. Pasaman Barat	316.867	274.6367	279.8697276	17.12061321	15.48534815	322.356,00	317,87	28,44	319,69	28,72	322.356	353,27	36,17	353,27	35,94
Kab. Dharmasraya	164.080	196.311	200.9420394	26.80598213	25.29178798	170.347,00	247,29	35,31	248,68	34,78	170.347	286,83	39,02	286,83	38,85
Kab. Solok Selatan	122.081	185.0729532	189.0539303	22.27107157	21.37804112	128.614,00	202,87	39,17	204,01	38,78	128.614	238,65	44,38	238,65	44,23
Kab. Bengkulu	686.433	206.723	-249.4127417	99.14794463	1291.055525	708.382,00	1.632,52	456,73	1.425,80	3.114,78	708.382	1878,95	4655,63	1627,27	4165,97
Kab. Indragiri Hilir	639.459	538.5782882	642.630788	74.45083968	78.34674393	647.401,00	827,22	414,99	828,08	418,85	647.401	768,58	206,28	768,58	207,08
Kab. Indragiri Hulu	290.737	465.5938587	497.2288983	9.692724402	10.07431947	295.148,00	725,45	99,37	726,24	99,95	295.148	696,00	48,95	696,00	49,21
Kab. Kampar	534.044	183.109	142.7919133	97.38470881	143.8485842	554.989,00	973,79	693,75	974,29	695,37	554.989	1040,82	739,08	1040,82	740,44
Kab. Kuantan Singingi	245.231	393.5229844	397.3047595	0.165095668	0.286360233	249.320,00	710,18	74,65	711,83	75,82	249.320	678,64	34,47	678,64	34,67
Kab. Pelalawan	237.875	302.678281	303.6588531	6.999285435	6.826936429	253.156,00	554,47	11,18	555,32	11,36	253.156	674,01	32,75	674,01	32,94
Kab. Rokan Hilir	429.119	1694.857102	1453.824417	3496.618561	2330.549865	421.584,00	150,89	185,90	59,04	313,94	421.584	1279,06	1176,66	1255,10	1108,14
Kab. Rokan Hulu	331.716	417.024947	418.8620003	1.968106502	2.15443988	346.635,00	734,34	124,57	735,34	125,48	346.635	728,10	78,80	728,10	79,15
Kab. Siak	288.374	1089.834	775.0368894	682.9323564	210.8843125	301.496,00	1.619,24	1908,27	1.523,63	1.607,09	301.496	1787,28	2314,26	1763,38	2230,34
Kota Dumai	222.890	361.5624665	341.5588232	0.422121116	1.689670053	230.075,00	632,44	33,02	632,77	33,14	230.075	550,11	1,92	550,11	1,96
Kota Pekanbaru	706.829	579.1804568	582.0844254	130.3788081	134.2360008	754.467,00	915,99	743,74	917,85	749,15	754.467	950,40	692,72	950,40	694,25
Kab. Bintan	117.825	232.9362773	233.887827	12.29873074	12.14117419	121.303,00	409,46	1,31	410,18	1,27	121.303	320,04	20,06	320,04	19,98
Kab. Nalun	88.914	862.274	782.1151185	97.0491805	67.38133252	91.916,00	1.236,98	261,91	1.237,11	262,00	91.916	668,35	11,09	628,50	8,32
Kab. Karimun	200.704	247.3551	249.7864111	17.08241114	16.46851696	209.875,00	419,85	1,40	420,93	1,32	209.875	407,96	9,84	407,96	9,74
Kota Batam	616.114	149.203	150.994021	157.1867902	154.7498881	656.001,00	625,85	87,18	626,85	88,21	656.001	582,18	9,04	582,18	9,21
Kota Tanjung Pinang	167.611	224.70432	227.5584227	17.08135534	16.42355345	172.616,00	385,17	4,24	386,31	4,11	172.616	339,36	23,01	339,36	22,87
Kab. Lingga	83.680	134.380	137.6137872	24.16515547	23.52784763	86.150,00	354,48	4,29	355,70	4,19	86.150	252,65	28,33	252,65	28,23
Kab. Balingkang	212.178	286.4741047	289.8519421	9.096827978	9.470575418	211.733,00	250,26	42,65	251,25	42,25	211.733	437,76	4,89	437,76	4,82
Kab. Bungo	242.236	318.716881	323.6380299	4.522638012	3.88524558	251.096,00	320,15	22,22	321,62	21,75	251.096	401,44	13,38	401,44	13,33
Kab. Kerinci	305.082	365.5904599	371.6710085	0.364088762	0.141568494	306.519,00	414,07	2,71	415,82	2,50	306.519	416,82	11,98	416,82	11,85
Kab. Merangin	278.425	337.01406	342.1217028	2.812797408	2.047989571	277.548,00	359,62	12,60	361,02	12,12	277.548	408,58	12,85	408,58	12,72
Kab. Muaro Jambi	200.117	207.056	210.2855136	40.30596706	38.82689507	295.271,00	334,06	21,10	335,15	20,73	295.271	276,44	74,21	276,44	73,60
Kab. Sarolangun	198.937	281.385282	284.9578727	13.58170368	12.78172078	205.087,00	243,88	43,58	244,76	43,54	205.087	362,92	30,23	362,92	29,89
Kab. Tanjung Jabung Barat	235.789	278.8401484	282.2189393	11.7598227	10.99782148	239.719,00	365,22	5,88	366,26	5,71	239.719	555,92	2,59	555,92	2,64
Kab. Tanjung Jabung Timur	205.120	179.47	182.0584181	39.80569344	38.57381409	206.826,00	329,87	16,81	330,87	16,81	206.826	354,04	22,98	354,04	22,84
Kab. Tebo	238.867	270.65925	274.865626	13.80902946	12.82147998	246.004,00	296,34	29,97	297,54	29,53	246.004	359,04	25,58	359,04	25,41

Perhitungan Indeks Williamson DAU TA 2006, 2007, dan TA 2008 Kabupaten/Kota

Daerah	Penduduk	DAU TA 2006				DAU TA 2007				DAU TA 2008					
		PAD + DBH + DAU (Keppres)	PAD + DBH + DAU (Formula)	(y1 - ybar)^2 / (Total penduduk (Perpres))	(y1 - ybar)^2 / (Total penduduk (Formula))	Penduduk	PAD + DBH + DAU (Keppres)	(y1 - ybar)^2 / (Total penduduk (Perpres))	PAD + DBH + DAU (Formula)	(y1 - ybar)^2 / (Total penduduk (Perpres))	Penduduk	PAD + DBH + DAU (Keppres)	(y1 - ybar)^2 / (Total penduduk (Perpres))	PAD + DBH + DAU (Formula)	(y1 - ybar)^2 / (Total penduduk (Formula))
Kota Jambi	460.539	372.587834	377.4654948	0.176103628	0.097952843	443.378.00	433.69	1.18	435.14	1.04	443.378	483.92	0.41	493.92	0.38
Kab. Lahat	545.754	475.8463902	481.5847964	22.90658385	25.781230054	550.478.00	590.74	45.82	592.49	47.04	550.478	540.28	2.70	540.28	2.78
Kab. Musi Banyuwasin	468.175	591.659313	662.0812282	213.0692216	174.3782326	484.245.00	1.268.41	1495.94	1.268.89	1.467.70	484.245	1274.32	1332.85	1274.32	1332.85
Kab. Musi Rawas	474.430	513.6145098	520.3585301	39.08693805	43.16177211	484.281.00	653.61	87.34	655.04	89.33	484.281	786.98	159.40	768.98	152.96
Kab. Muara Enim	532.222	460.4940974	473.2598064	22.56773329	25.19088433	843.924.00	585.51	49.47	587.05	50.71	843.924	735.05	153.77	735.05	156.44
Kab. Ogan Komering Ilir	556.828	474.5292165	481.675723	26.80351463	31.06550163	672.192.00	1.087.48	1251.55	1.089.83	1.260.31	672.192	662.81	75.71	662.81	78.19
Kab. Ogan Komering Ulu	265.246	340.1918825	344.0460847	2.06589932	1.616357965	259.292.00	317.22	29.84	318.95	23.35	259.292	536.07	0.68	536.07	1.00
Kota Palembang	1.336.793	780.4801326	789.9267792	1005.298398	1054.020458	1.369.239.00	900.42	1259.88	903.71	1.278.44	1.369.239	1068.67	2019.01	1068.67	2022.54
Kota Pagar Alam	114.562	217.2687043	219.3751779	14.61155786	14.23885913	115.563.00	265.31	20.02	268.06	19.86	115.563	333.49	16.49	333.49	16.40
Kota Lubuk Linggau	174.452	251.0369895	253.7452174	14.04465479	13.4674194	178.074.00	290.96	23.17	291.89	22.91	178.074	317.99	30.13	317.99	29.89
Kota Prabumulih	130.340	216.095837	219.1758301	16.68125347	16.23974249	132.752.00	202.68	48.07	203.67	40.12	132.752	321.62	21.61	321.62	21.50
Kab. Banyuwasin	733.626	465.221043	471.612692	24.24838712	27.72424411	757.398.00	545.00	87.19	546.86	28.35	757.398	615.10	40.78	615.10	41.16
Kab. Ogan Ilir	358.983	371.122855	376.5506217	0.164977682	0.042693883	365.333.00	459.57	0.61	461.36	0.03	365.333	553.86	3.61	553.86	3.69
Kab. OKU Timur	556.010	359.0187653	355.5138313	1.337498049	0.678148862	564.924.00	495.08	3.74	497.19	4.17	564.924	533.90	1.79	533.90	1.85
Kab. OKU Selatan	317.277	229.1039738	233.7827045	34.84695602	32.74894681	322.307.00	286.63	44.14	288.14	43.38	322.307	356.38	34.72	356.38	34.50
Kab. Bangka	241.847	239.827346	243.9632815	22.85769935	21.53876857	266.224.00	285.84	35.41	287.40	34.78	266.224	384.03	24.89	384.03	24.72
Kab. Belitung	138.610	226.9259448	230.8536881	15.65971142	14.91531701	134.819.00	275.75	20.89	277.13	20.57	134.819	331.21	19.75	331.21	19.64
Kota Pangkal Pinang	155.036	207.35998	210.4289995	22.2904768	21.45351888	150.668.00	267.12	29.98	268.28	29.05	150.668	307.20	28.47	307.20	28.33
Kab. Bangka Selatan	153.418	177.70085	181.2070888	30.12538367	29.09736572	153.674.00	231.71	38.78	233.14	36.33	153.674	283.44	38.37	283.44	36.21
Kab. Bangka Tengah	135.083	162.995018	166.3988753	39.48989571	29.54685392	138.281.00	199.98	43.21	200.85	42.78	138.281	241.47	46.04	241.47	45.87
Kab. Bangka Barat	146.498	222.404248	227.0891338	17.52429652	16.90737877	152.298.00	229.56	37.11	230.99	36.65	152.298	281.08	43.52	281.08	43.35
Kab. Bengkulu Timur	80.565	157.854	161.477907	21.41447583	20.79710897	80.633.00	241.46	19.40	242.83	19.16	80.633	281.49	19.48	281.49	19.39
Kab. Bengkulu Selatan	137.358	239.2401864	244.1283048	13.14715611	12.28923688	131.675.00	242.37	28.58	243.97	28.16	131.675	301.29	26.38	301.29	26.25
Kab. Bengkulu Utara	330.827	324.5155378	330.4332652	5.086746307	4.086087819	332.741.00	371.51	11.54	373.08	11.05	332.741	422.69	11.34	422.69	11.21
Kab. Bengkulu Tengah	248.000	269.8379424	275.0893827	14.62912743	13.29104381	242.104.00	321.03	21.15	322.67	20.59	242.104	352.46	27.45	352.46	27.27
Kota Bengkulu	275.416	306.1035047	310.9296673	7.412457023	6.434423023	281.602.00	358.50	12.09	360.04	11.66	281.602	380.27	16.99	380.27	16.85
Kab. Kaur	103.834	167.5070303	171.0162331	22.47906566	21.74759097	107.473.00	193.48	36.14	194.62	34.64	107.473	223.80	40.12	223.80	39.98
Kab. Seluma	160.143	189.704	192.6771143	28.1437237	26.9954461	158.717.00	267.61	26.84	268.91	26.48	158.717	305.43	35.93	305.43	30.38
Kab. Mukomuko	131.134	201.1278357	204.8748559	30.17247612	19.3428852	131.984.00	242.31	28.67	243.54	28.34	131.984	261.28	37.66	261.28	37.51
Kab. Lebong	81.725	177.362	181.633524	18.07139739	17.28823944	89.892.00	200.36	26.95	201.76	26.68	89.892	237.12	29.89	237.12	29.78
Kab. Kepahiang	119.940	168.243	172.6547857	25.7876336	24.73148072	114.889.00	210.20	32.96	211.78	32.54	114.889	252.89	35.05	252.89	34.91
Kab. Lampung Barat	391.640	299.182	283.5631162	27.71824609	25.78575049	380.208.00	333.68	26.51	336.90	25.84	380.208	375.29	31.37	375.29	31.14
Kab. Lampung Selatan	1.214.481	597.7405146	606.8082173	263.0518353	291.0972839	1.312.627.00	692.48	339.86	695.30	348.04	1.312.627	748.25	355.47	748.25	356.92
Kab. Lampung Tengah	1.126.951	597.1412307	606.9184725	247.3553408	270.3020514	1.148.158.00	709.17	340.42	712.04	348.21	1.148.158	768.41	384.89	768.41	386.07
Kab. Lampung Utara	563.895	412.396251	418.8728405	5.282892112	3.704112823	559.172.00	455.45	0.01	457.28	0.00	559.172	538.44	2.44	538.44	2.52
Kab. Lampung Timur	918.925	517.710293	525.3150439	80.43645618	89.67813529	929.159.00	590.77	77.38	592.98	79.94	929.159	838.28	74.09	838.28	74.59
Kab. Tanggamus	831.651	499.430837	507.056753	54.58880596	51.85101468	824.922.00	562.35	42.52	564.58	44.35	824.922	604.22	35.88	604.22	36.23
Kab. Tulang Bawang	785.771	409.233243	406.5410544	1.292511328	2.315207657	763.360.00	459.08	0.49	470.95	0.65	763.360	633.74	58.66	633.74	57.10
Kab. Way Kanan	381.476	261.8104152	265.6446585	25.85182105	24.22204769	361.810.00	324.93	29.63	326.20	29.26	361.810	342.97	48.18	342.97	45.90
Kota Bandar Lampung	817.832	521.4825092	528.7859678	78.81000421	83.88385453	803.922.00	574.11	51.29	576.25	53.15	803.922	837.71	63.49	837.71	63.97
Kota Metro	132.843	212.5866926	216.4293802	17.92247759	17.32528633	130.348.00	263.97	25.93	264.83	25.11	130.348	266.55	35.62	266.55	35.48
Kab. Bandung	4.102.049	1379.463393	1397.905468	18285.27751	20015.17654	4.112.027.00	1.631.28	26589.07	1.637.15	26.835.09	4.112.027	1239.53	10321.63	1239.53	10335.47
Kab. Bekasi	1.936.088	655.6575221	660.7920668	688.990448	662.8288444	2.054.785.00	831.62	1344.35	832.57	1.355.36	2.054.785	1030.63	2630.36	1050.65	2843.49
Kab. Bogor	3.802.999	1155.13582	1186.074852	10749.76248	11072.83776	3.903.650.00	1.073.65	15375.33	1.077.77	18.503.95	3.903.650	1542.11	19579.07	1542.11	19598.54
Kab. Ciamis	1.512.832	761.021578	773.5184337	1028.742193	1097.615734	1.522.184.00	838.49	1025.28	840.16	1.045.22	1.522.184	949.83	1383.95	949.83	1397.04
Kab. Cianjur	2.089.129	790.5819321	801.7484055	1650.822259	1742.216817	2.110.655.00	895.87	1901.53	899.32	1.930.68	2.110.655	986.30	2264.47	986.30	2269.11

Perhitungan Indeks Williamson DAU TA 2006, 2007, dan TA 2008 Kabupaten/Kota

Daerah	DAU TA 2006						DAU TA 2007				DAU TA 2008				
	Penduduk	PAD + DBH + DAU (Keppres)	PAD + DBH + DAU (Formula)	IW	IW	Penduduk	PAD + DBH + DAU (Keppres)	IW	PAD + DBH + DAU (Formula)	Penduduk	PAD + DBH + DAU (Keppres)	IW	PAD + DBH + DAU (Keppres)	IW	PAD + DBH + DAU (Formula)
				($yi - \bar{y}$) ² Penduduk total penduduk (Perpres)	($yi - \bar{y}$) ² Penduduk total penduduk (Formula)										
Kab. Cirebon	2.068.660	766.0117726	776.6671385	1442,750727	1523,656614	2.068.411,00	894,34	1851,00	897,50	1.877,87	2.068.411	982,07	2180,62	802,07	2185,13
Kab. Garut	2.207.186	830,715	845.0507501	2103,195965	2239,434876	2.228.953,00	1.041,47	3564,68	1.045,65	3.615,83	2.228.953	1160,49	4315,01	1150,49	4322,50
Kab. Indragrayu	1.688.252	703,0086773	712,2760419	824,4137988	872,6326817	1.710.227,00	776,96	616,44	779,73	832,73	1.710.227	839,74	1231,22	839,74	1234,30
Kab. Karawang	1.804.845	746,8733573	755,7872829	1200,551169	1259,742651	1.958.381,00	850,88	1421,13	853,84	1.442,63	1.958.381	943,29	1740,51	943,26	1744,43
Kab. Kuningan	1.092.565	551,420966	559,6760461	143,4206881	157,7065384	1.058.197,00	621,18	132,93	623,70	137,05	1.058.197	677,00	141,83	677,00	142,65
Kab. Majalengka	1.187.601	592,9303364	601,4617044	246,4258769	265,7061328	1.179.136,00	665,44	239,97	667,89	244,67	1.179.136	726,87	385,05	726,87	385,24
Kab. Purwakarta	784.583	468,5114905	473,5485672	2,61660089	3,690799528	769.801,00	477,26	1,41	478,94	1,66	769.801	527,62	1,40	527,62	1,47
Kab. Subang	1.389.005	614,5342352	623,2454668	356,058566	383,1948819	1.393.796,00	733,13	496,54	735,77	506,10	1.393.796	837,92	711,74	837,92	713,86
Kab. Sukabumi	2.193.858	795,709135	777,684631	1529,228445	1621,165022	2.190.590,00	861,82	1680,19	865,27	1.708,09	2.190.590	973,92	2230,72	973,92	2235,41
Kab. Sumedang	1.027.569	590,5712818	599,1078716	212,0926114	229,6818147	1.028.923,00	651,15	180,93	653,86	185,65	1.028.923	737,50	284,33	737,50	285,41
Kab. Tasikmalaya	1.618.230	694,005707	705,0546606	746,5918572	800,3472583	1.624.513,00	779,92	801,69	783,20	816,08	1.624.513	870,77	1015,34	870,77	1018,08
Kota Bandung	2.263.679	1055,988278	1065,397929	4863,503113	5009,205712	2.338.358,00	1.312,06	8308,25	1.316,01	8.082,55	2.338.359	1565,28	12280,34	1565,28	12271,72
Kota Bekasi	2.054.381	818,6591852	822,6086606	1836,972482	1898,280826	2.071.427,00	638,17	1382,58	638,46	1.409,31	2.071.427	871,05	2083,50	871,05	2087,92
Kota Bogor	908.648	432,7251102	437,3302539	11,22573829	13,3383738	931.092,00	504,42	9,61	505,92	10,23	931.092	557,68	10,80	557,68	11,02
Kota Cirebon	307.483	340,3487608	345,2856509	2,468864112	1,913481211	317.732,00	407,43	3,74	409,16	3,48	317.732	451,94	4,67	451,94	4,69
Kota Depok	1.378.976	461,8657782	466,2308027	41,8918416	46,57411748	1.431.186,00	535,29	64,17	536,61	66,17	1.431.186	637,65	113,29	637,65	114,14
Kota Sukabumi	304.971	284,487879	288,2417611	13,58767177	12,65146942	302.459,00	352,68	16,51	354,57	16,03	302.459	350,52	35,16	350,52	34,93
Kota Cimahi	582.699	420,0914169	327,217143	6,681972781	8,135418418	572.463,00	270,65	83,55	272,01	82,39	572.463	503,49	0,65	503,49	0,94
Kota Tasikmalaya	577.555	282,277797	383,8949958	26,90602956	0,014592693	585.659,00	438,32	0,00	460,97	0,02	585.659	400,79	31,63	400,79	31,26
Kota Banjar	165.920	178,5632809	183,3748442	31,68024903	30,79175207	184.927,00	300,19	19,14	302,55	18,58	184.927	239,87	55,58	239,87	55,38
Kab. Labak	1.138.871	567,080335	614,9410662	84,72760497	85,67814851	1.183.184,00	675,69	77,59	677,87	80,38	1.183.184	689,18	182,28	689,18	183,27
Kab. Pandeglang	1.106.569	625,503379	533,7891842	108,2638484	121,1088064	1.074.782,00	594,55	84,66	596,84	87,99	1.074.782	676,37	142,99	676,37	143,62
Kab. Serang	1.866.760	688,2187651	694,0735893	818,3334416	866,060498	1.788.223,00	785,53	784,78	788,02	897,68	1.788.223	872,68	1114,90	872,68	1117,50
Kab. Tangerang	3.324.756	836,4265	842,045466	4934,682072	4933,42899	3.366.423,00	1.166,86	7844,39	1.169,48	8.003,04	3.366.423	1300,68	9526,74	1300,68	9939,02
Kota Cilegon	334.586	336,4372037	339,4239074	3,221823459	2,809119523	331.687,00	389,14	7,27	390,40	7,01	331.687	433,15	8,70	433,15	8,58
Kota Tangerang	1.537.558	592,6830627	597,0104359	323,6645265	337,0787468	1.481.591,00	719,76	477,85	721,49	484,18	1.481.591	832,59	732,35	832,59	734,57
Kab. Banjarnegara	904.047	467,6604781	474,8478961	31,78784862	37,14745846	859.178,00	509,01	10,69	510,88	11,48	859.178	559,09	10,64	559,09	10,75
Kab. Banyumas	1.531.426	688,1269014	698,9186248	684,4829658	728,7395574	1.481.469,00	773,31	698,43	776,18	710,29	1.481.469	837,72	760,89	837,72	782,96
Kab. Bafana	713.060	389,0997109	374,5114513	0,525992018	0,168411991	675.574,00	404,34	6,66	405,84	8,46	675.574	457,51	8,06	457,51	7,90
Kab. Blera	840.548	460,058749	466,4454481	24,45156976	28,59538586	800.201,00	538,68	25,65	540,41	26,78	830.201	604,67	36,43	604,67	36,60
Kab. Boyolali	841.673	538,102947	546,47421	108,9741709	120,9488557	829.712,00	587,46	73,64	589,76	76,17	828.712	652,80	91,40	652,80	92,02
Kab. Brebes	1.814.704	669,730668	679,7333581	711,7458915	762,0324881	1.788.347,00	728,97	801,44	729,89	813,65	1.788.347	803,88	725,40	803,88	727,81
Kab. Cilacap	1.674.717	743,3769	755,2945732	1035,5282	1104,869846	1.621.737,00	844,63	1139,19	849,27	1.161,31	1.621.737	872,29	1669,65	872,29	1612,37
Kab. Demak	1.071.667	447,7527782	454,1923514	22,16401732	28,68999883	1.077.471,00	483,82	3,82	487,51	4,29	1.077.471	550,68	6,72	550,68	6,92
Kab. Grobogan	1.334.204	570,111938	578,3976361	244,187614	244,187614	1.318.145,00	639,07	194,90	637,42	200,07	1.318.145	702,67	234,42	702,67	235,60
Kab. Jepara	1.078.037	477,573260	483,7365277	46,72545407	53,14243995	1.057.635,00	641,80	25,23	643,78	26,90	1.057.635	602,67	44,51	602,67	44,97
Kab. Karanganyar	833.869	471,0030072	477,776125	31,49511247	36,44914888	800.695,00	528,63	18,04	528,69	19,02	800.695	583,83	22,70	583,83	28,02
Kab. Kebumen	1.208.645	587,321713	595,9342125	241,6070605	252,3303279	1.203.876,00	652,40	214,42	654,77	219,68	1.203.876	695,24	188,07	695,24	199,11
Kab. Keadil	897.410	474,6603684	480,9844297	38,72490599	41,89882236	926.125,00	533,85	26,37	535,73	26,57	926.125	588,78	28,39	588,78	28,73
Kab. Klontar	1.139.245	704,182639	714,9763716	560,0618149	588,1744433	1.125.650,00	754,71	468,28	757,80	478,02	1.125.650	830,79	550,26	830,79	551,94
Kab. Kudus	759.662	447,4937959	453,6160989	15,58844085	18,62038837	764.653,00	534,67	21,28	536,64	22,45	764.653	578,46	17,84	578,46	18,09
Kab. Magelang	1.169.652	572,57132	580,8048156	201,5377057	219,5153264	1.153.915,00	637,05	174,44	639,40	179,02	1.153.915	694,69	184,73	694,69	189,72
Kab. Pati	1.214.299	585,915474	594,2659444	239,4898346	259,4711318	1.165.004,00	641,28	184,51	643,66	189,31	1.165.004	701,17	204,00	701,17	205,03
Kab. Pekalongan	859.208	418,9978639	423,0957416	5,08998453	6,994734786	838.080,00	484,38	0,18	486,06	0,28	838.080	531,55	2,19	531,55	2,28
Kab. Pemalang	1.371.644	649,1697733	657,0818327	181,9724622	199,5688365	1.343.982,00	588,97	125,95	591,00	129,77	1.343.982	644,19	117,02	644,19	117,86
Kab. Purbalangga	853.669	442,416629	448,4841278	15,09738736	18,26674747	816.813,00	481,23	2,15	482,66	2,46	816.813	540,89	4,16	540,89	4,28

Perhitungan Indeks Williamson DAI TA 2005, 2007, dan TA 2008 Kabupaten/Kota

Daerah	Penduduk	DAU TA 2006				DAU TA 2007				DAU TA 2008					
		PAD + DBH + DAU (Keppres)	PAD + DBH + DAU (Formula)	($yl - ybar$) ² Penduduk /total penduduk (Perpres)	($yl - ybar$) ² Penduduk /total penduduk (Formula)	Penduduk	PAD + DBH + DAU (Keppres)	($yl - ybar$) ² Penduduk /total penduduk (Perpres)	PAD + DBH + DAU (Formula)	($yl - ybar$) ² Penduduk /total penduduk (Formula)	Penduduk	PAD + DBH + DAU (Keppres)	($yl - ybar$) ² Penduduk /total penduduk (Perpres)	PAD + DBH + DAU (Formula)	($yl - ybar$) ² Penduduk /total penduduk (Formula)
Kab. Purworejo	712.054	477.4374181	484.8288679	34.90398026	35.71702635	717.326.00	533.25	19.23	535.28	20.34	717.326	585.24	20.10	595.24	20.36
Kab. Rembang	588.891	342.777	340.8744452	4.189587832	3.012508453	570.842.00	438.85	0.95	440.21	0.80	570.842	494.01	0.53	494.01	0.48
Kab. Semarang	894.491	489.5913043	485.7042722	48.83834613	55.0308858	891.046.00	544.10	31.33	545.89	32.71	891.046	599.17	34.78	599.17	35.16
Kab. Sragen	668.496	615.854124	523.5689515	73.56314554	82.7664873	856.271.00	579.87	59.83	591.48	61.71	856.271	627.86	57.75	627.86	58.22
Kab. Sukoharjo	838.308	495.9831838	504.043693	62.73474851	59.387781	814.016.00	521.61	15.68	523.82	16.68	814.016	571.95	15.68	571.95	16.90
Kab. Tegal	1.470.758	572.160621	580.352816	252.3311907	274.5138916	1.406.858.00	625.09	191.97	630.28	196.94	1.406.858	695.72	232.65	695.72	233.66
Kab. Temanggung	717.269	405.076538	411.0240869	1.869908917	2.937318839	894.447.00	436.23	1.48	437.89	1.25	894.447	484.05	1.86	484.05	1.78
Kab. Wonorejo	1.010.645	572.3803225	581.1987897	173.7822833	189.2330467	978.651.00	617.48	117.42	619.82	120.90	978.651	667.75	117.22	667.75	117.94
Kab. Wonosobo	780.158	397.454982	403.2078975	0.528180247	1.723503991	752.309.00	431.70	2.35	433.28	2.08	752.309	475.85	3.63	475.85	3.52
Kota Magelang	131.406	251.831996	255.8910504	10.43457888	9.80663343	129.854.00	275.50	20.18	276.67	19.82	129.854	307.57	24.45	307.57	24.33
Kota Pekalongan	284.094	337.4870337	241.0789624	27.85291378	26.49160638	271.786.00	270.05	44.79	271.15	44.27	271.786	307.76	51.07	307.76	50.82
Kota Salatiga	175.695	221.713386	224.7181801	21.23688505	20.44539498	171.277.00	254.46	33.12	255.40	32.81	171.277	280.64	41.50	280.64	41.32
Kota Semarang	1.435.654	823.710813	832.3221531	1325.950379	1378.121176	1.468.268.00	949.31	1845.18	949.03	1.883.63	1.468.268	1010.84	1741.52	1010.84	1744.92
Kota Surakarta	534.322	448.218386	451.772589	10.54414408	12.43519148	511.731.00	504.41	5.28	505.08	5.65	511.731	572.90	10.13	572.90	10.28
Kota Sukoharjo	249.983	259.658565	261.4247882	17.5878942	17.04795538	239.548.00	296.60	28.09	297.05	28.93	239.548	318.05	40.50	318.05	40.30
Kab. Bantul	823.367	529.5283293	537.3276879	85.12709381	94.34503837	879.825.00	588.31	70.59	590.62	73.10	879.825	657.55	92.36	657.55	92.87
Kab. Gunung Kidul	695.731	471.2433052	478.7754887	26.41940082	31.04517084	683.389.00	507.40	7.97	509.44	8.64	683.389	551.06	5.96	551.06	6.10
Kab. Kulon Progo	380.265	364.7172577	380.265059	0.017925494	0.137740341	374.112.00	425.87	1.75	427.90	1.58	374.112	459.14	4.18	459.14	4.09
Kab. Sleman	855.172	611.3890703	618.3883823	298.2410777	255.1873858	1.608.295.00	679.93	233.92	682.53	239.00	1.608.295	759.93	300.27	759.93	301.44
Kota Yogyakarta	419.184	441.3487056	446.7443880	7.07218706	8.40754088	443.112.00	501.91	4.09	503.88	4.42	443.112	582.88	11.67	582.88	11.83
Kab. Bangkalan	896.508	445.8718884	452.1768293	17.59227581	21.10529843	920.040.00	502.89	8.88	504.74	8.62	920.040	577.83	21.07	577.83	21.37
Kab. Banyuwangi	1.549.436	703.8398729	714.5768427	760.6946291	811.6008476	1.522.382.00	788.90	774.68	790.10	789.74	1.522.382	874.41	958.86	874.41	961.43
Kab. Blitar	1.119.879	580.4149897	589.7428682	209.0931842	229.2066477	1.069.462.00	845.02	176.33	847.71	181.43	1.069.462	717.68	220.60	717.68	221.63
Kab. Bojonegoro	1.224.627	595.8694677	574.0918765	156.4610335	214.3995123	1.243.032.00	680.69	290.38	683.18	286.82	1.243.032	771.59	405.23	771.59	406.74
Kab. Bondowoso	714.978	389.3874313	395.0318065	0.204561248	4.010944828	703.233.00	439.66	1.43	439.21	1.23	703.233	504.11	0.05	504.11	0.04
Kab. Gresik	1.084.279	534.453889	540.8604288	119.6945689	129.8418539	1.148.776.00	627.65	155.95	629.69	159.71	1.148.776	762.76	349.84	762.76	351.19
Kab. Jember	2.255.333	840.9181917	859.7602092	2247.81098	2375.281782	2.285.610.00	941.99	2526.89	945.63	2.567.16	2.285.610	1097.59	3743.25	1097.59	3749.48
Kab. Jombang	1.186.799	529.8608611	537.3575966	123.257474	136.0408758	1.248.843.00	618.14	153.00	621.48	157.46	1.248.843	694.35	203.62	694.35	204.59
Kab. Kediri	1.488.339	656.0234993	665.7048593	629.5254681	667.5558328	1.445.474.00	709.23	429.53	711.95	438.87	1.445.474	786.37	525.53	786.37	527.38
Kab. Lamongan	1.244.853	652.6155599	660.7508132	172.0127547	189.7883844	1.189.017.00	624.47	155.29	626.77	159.61	1.189.017	708.69	224.53	708.69	225.63
Kab. Lumajang	1.007.991	490.3288791	497.6573871	56.38889478	64.15489497	1.013.483.00	542.71	34.60	544.80	36.21	1.013.483	620.00	59.68	620.00	60.21
Kab. Magelang	661.506	386.273	392.8285203	0.06887719	0.365224545	642.271.00	466.60	0.24	468.37	0.35	642.271	525.84	0.97	525.84	1.02
Kab. Magelang	627.041	456.109	462.8960739	16.45067432	19.58481017	623.474.00	507.76	7.30	509.78	7.99	623.474	553.16	5.98	553.16	6.11
Kab. Malang	2.369.178	895.792622	899.1254474	2845.191444	2897.683452	2.379.402.00	984.36	3097.36	988.28	3.143.63	2.379.402	1121.23	4197.17	1121.23	4203.89
Kab. Mojokerto	988.737	460.685612	467.9547143	28.22412185	34.12148387	983.949.00	504.34	10.12	506.26	10.96	983.949	608.00	44.97	608.00	44.82
Kab. Ngawi	1.035.411	551.2647223	559.6043815	140.821126	154.8344221	994.389.00	604.96	101.38	607.33	104.65	994.389	685.61	115.94	685.61	116.65
Kab. Ngawi	846.440	431.8117902	439.5147799	48.58092483	55.61067222	830.198.00	532.40	21.83	534.63	23.16	830.198	602.45	34.77	602.45	35.14
Kab. Pacitan	543.184	364.4364743	370.0169739	0.754382824	0.343206624	551.155.00	405.25	7.06	406.84	8.64	551.155	451.12	8.34	451.12	8.20
Kab. Pamekasan	750.910	410.0809404	418.2774474	2.880382745	4.268931748	799.031.00	458.77	0.01	460.54	0.03	799.031	495.75	0.56	495.75	0.51
Kab. Pasuruan	1.449.811	553.8388059	559.4573682	203.2048859	216.6889057	1.432.977.00	842.13	229.06	843.78	233.17	1.432.977	731.41	335.61	731.41	337.09
Kab. Ponorogo	874.989	484.1245756	495.4749352	46.91840983	53.81594331	885.377.00	490.93	4.64	493.08	5.25	885.377	510.51	43.68	510.51	44.10
Kab. Probolinggo	1.051.295	481.839717	489.2810295	49.91482377	57.80244021	1.037.292.00	538.45	31.66	540.84	33.01	1.037.292	600.33	41.52	600.33	41.97
Kab. Sampang	842.856	362.2810219	367.3581132	1.483882129	0.801276313	864.968.00	425.53	4.15	427.01	3.77	864.968	489.25	1.42	489.25	1.34
Kab. Sidoarjo	1.749.957	788.288241	806.3637339	1434.267423	1490.845034	1.730.740.00	919.74	1734.19	922.12	1.752.05	1.730.740	1021.89	2144.04	1021.89	2146.14
Kab. Situbondo	627.007	376.3594979	382.2143177	0.088875247	0.301183208	618.754.00	425.06	3.06	428.79	2.74	618.754	483.47	1.74	483.47	1.67
Kab. Sumenep	1.044.760	513.5124095	518.7358466	85.88840164	92.84478972	1.012.438.00	582.78	74.48	584.14	78.13	1.012.438	712.27	186.24	712.27	189.19

Perhitungan Indeks Williamson DAU TA 2006, 2007, dan TA 2008 Kabupaten/Kota

Daerah	DAU TA 2006			DAU TA 2007			DAU TA 2008			IW
	Penduduk	PAD + DBH + DAU (Rp/Pres)	(Yi - year) ² Penduduk (Formula)	Penduduk	PAD + DBH + DAU (Rp/Pres)	(Yi - year) ² Penduduk (Formula)	Penduduk	PAD + DBH + DAU (Rp/Pres)	(Yi - year) ² Penduduk (Formula)	
Kab. Trenggalek	674.816	384.418	0,25560082	0,263168988	671.281	2,07	571.281	524.23	0,84	0,89
Kab. Tuban	1.090.212	502.506333	509.1191978	75.3035842	1.072.904,00	53,74	1.072.904,00	633,57	79,42	80,04
Kab. Tulungagung	968.453	566.1141383	574.9522453	153.7774109	1.077.415,00	138,40	977.415	705,97	179,76	180,63
Kota Blitar	124.632	203.0485108	205.5942336	10.43992738	128.423,00	30,07	129.423	265,05	35,81	35,66
Kota Kediri	254.190	416.942959	425.3994317	1.500330106	284.890,00	1,04	284.600	499,14	0,12	0,11
Kota Madiun	177.103	243.667268	245.8278331	15.8928827	175.288,00	28,49	175.266	304,20	34,12	33,96
Kota Malang	780.446	457.9540588	474.5060479	27.59113869	804.381,00	18,97	804.381	617,03	44,89	45,10
Kota Molekero	113.627	222.4681843	226.2321944	13.56965259	112.577,00	24,77	112.577	261,78	31,97	31,85
Kota Pasuruan	178.576	204.5308125	207.454506	25.69228119	173.191,00	42,65	173.191	263,76	48,43	48,23
Kota Probolinggo	202.917	240.0452122	243.6739933	19.20304968	218.137,00	31,61	218.137	314,85	38,14	37,85
Kota Surabaya	2.714.573	1353.742555	1359.739373	12.118.83245	2.625.036,00	1.009,84	16346,59	1805,77	20736,00	20751,68
Kota Baru	179.549	184.3519667	187.0038977	32.93415448	183.396,00	50,73	183.396	270,72	48,40	48,20
Kab. Bangkawang	197.332	242.454452	246.6534138	16.04410427	197.760,00	28,34	197.760	325,23	30,96	30,80
Kab. Landak	312.110	322.206563	327.6215827	5.198276176	312.999,00	345,78	16,32	347,34	21,02	20,85
Kab. Pontianak	203.271	451.672035	460.0281856	4.71892968	208.915,00	1,39	497,61	208,915	553,43	5,07
Kab. Kelampayan	482.016	534.59679	564.9981376	69.43572092	481.498,00	19,78	538,06	536,88	27,54	27,62
Kab. Pontianak	713.358	481.122048	489.0392562	33.38661178	690.787,00	535,69	21,02	690,787	593,38	593,38
Kab. Sambas	403.863	394.336923	398.7152716	0.234401371	480.858,00	439,75	1,74	431,69	469,36	3,27
Kab. Sanggau	374.507	390.463517	397.4049097	0.139438672	377.199,00	428,72	1,37	377,199	482,59	1,09
Kab. Sintang	416.935	435.757879	441.8520183	6.74812937	430,17	2,55	492,14	524,51	8,07	8,05
Kab. Pematang	336.797	475.6185708	485.6658774	14.15781065	350.320,00	524,46	7,38	527,61	8,94	9,05
Kab. Sekadau	166.792	219.096755	224.0131183	21.45640708	173.935,00	216,97	47,04	218,57	44,16	43,98
Kab. Melawi	161.482	263.674649	271.4304051	10.21931241	163.218,00	302,59	20,82	204,42	24,91	24,83
Kab. Bario Seletan	117.414	257.3818457	259.3099622	4.315917873	118.010,00	330,59	6,92	329,18	7,90	7,24
Kab. Bario Utara	111.068	252.519	257.3458958	0.735194439	115.648,00	328,30	9,06	329,83	8,84	10,38
Kab. Kapuas	334.723	434.4580325	442.0639379	4.224689417	354.852,00	471,81	0,33	470,86	525,65	0,35
Kab. Kayan	262.142	400.9128452	407.5807484	0.515534667	306.857,00	446,53	0,17	448,57	307,05	307,05
Kab. Kutai Timur	175.605	300.139759	305.1278433	5.502937759	172.848,00	332,96	12,70	333,87	13,09	13,89
Kab. Kutai Barat	84.932	285.79274	287.7491988	3.494632873	81.038,00	390,48	1,71	392,84	2,32	2,29
Kab. Paser Utara	117.697	205.789	204.4599453	16.90046077	115.962,00	207,59	15,70	288,89	15,45	16,48
Kab. Gunung Mas	65.602	211.928976	203.4864574	11.6380368	61.391,00	304,76	8,91	306,26	8,73	10,97
Kab. Lamau	49.593	289.453	228.433742	2.835783159	48.135,00	273,85	7,71	275,16	7,60	9,70
Kab. Sukamara	34.502	238.69	211.1618399	3.274280139	34.042,00	274,34	5,36	275,88	5,27	7,06
Kab. Seruyan	53.370	227.15	245.7548003	10.51982741	55.030,00	340,88	6,08	342,54	5,89	3,70
Kab. Berau	497.242	378.811116	384.0428855	0.01868289	470.048,00	442,27	0,51	443,85	0,41	0,34
Kab. Bontok	263.731	270.2690263	274.4431742	15.43035676	266.313,00	316,07	24,29	319,32	23,65	23,50
Kab. Hulu Sungai Selatan	200.058	287.627858	291.8742414	8.580858976	205.785,00	314,78	19,66	315,99	17,45	17,22
Kab. Hulu Sungai Tengah	233.354	270.8715039	274.8287282	13.56581447	219.590,00	302,62	27,60	303,69	25,38	25,22
Kab. Hulu Sungai Utara	307.863	233.442811	237.6630537	21.52631832	211.231,00	34,66	34,66	211,231	29,62	29,45
Kab. Kota Baru	261.792	371.551709	377.5539714	0.124489887	269.113,00	443,41	0,25	445,46	0,18	0,04
Kab. Tabalong	184.373	288.6435825	292.2105156	7.516856581	189.009,00	329,81	14,45	330,93	14,23	11,57
Kab. Tanah Laut	254.301	203.844883	207.6824211	11.47592731	250.440,00	323,68	21,80	324,94	22,61	22,45

Perhitungan Indeks Williamson DAU TA 2006, 2007, dan TA 2008 Kabupaten/Kota

Daerah	DAU TA 2006					DAU TA 2007					DAU TA 2008				
	Penduduk	PAD + DBH + DAU (Kappres)	PAD + DBH + DAU (Formula)	IW (y1 - ybar) ² Penduduk /total penduduk (Fapres)	IW (y1 - ybar) ² Penduduk /total penduduk (Formula)	Penduduk	PAD + DBH + DAU (Kappres)	IW (y1 - ybar) ² Penduduk /total penduduk (Fapres)	PAD + DBH + DAU (Formula)	IW (y1 - ybar) ² Penduduk /total penduduk (Formula)	Penduduk	PAD + DBH + DAU (Kappres)	IW (y1 - ybar) ² Penduduk /total penduduk (Fapres)	PAD + DBH + DAU (Formula)	IW (y1 - ybar) ² Penduduk /total penduduk (Formula)
Kab. Tapin	147.638	258.4213758	262.1239204	10.5783178	9.952358264	150.507.00	280.08	19.80	291.22	19.53	150.507	333.42	21.51	333.42	21.39
Kota Banjar Baru	145.590	213.434	216.0438259	15.4457891	18.84626363	163.175.00	233.18	38.51	233.95	38.25	163.175	259.44	43.53	259.44	43.35
Kota Banjarmasin	574.325	404.1271	469.5271281	1.378815528	2.118635941	802.725.00	459.96	0.02	461.62	0.05	602.725	527.16	1.04	527.16	1.10
Kab. Balangan	98.377	190.4528761	193.6292968	16.97679287	16.41673932	101.022.00	207.76	28.56	208.71	28.33	101.022	256.27	30.01	256.27	29.88
Kab. Tanah Bumbu	210.717	198.202	202.5961456	33.47436888	31.88843683	216.008.00	403.48	2.98	404.99	2.79	216.008	444.14	4.12	444.14	4.05
Kab. Berau	151.165	463.003052	466.9277435	4.733566837	6.201242542	156.889.00	680.84	36.70	682.68	37.30	156.889	781.03	54.87	781.03	55.07
Kab. Bulungan	98.117	448.353	411.3044113	2.066838728	0.409448471	105.861.00	491.52	0.57	491.88	0.59	105.861	605.25	4.70	605.25	4.75
Kab. Kutai Kartanegara	492.537	3131.533416	2399.098087	17594.987	9376.650744	805.380.00	3.124.97	16864.27	2.827.16	13.308.78	505.380	4443.01	3670.94	4368.55	35334.25
Kab. Kutai Barat	700.759	818.101201	823.3870979	135.6997924	129.0077666	154.345.00	913.60	150.57	915.90	152.09	154.345	1202.99	249.69	1202.99	350.18
Kab. Kutai Timur	175.106	180.189	183.8275818	33.65037804	32.4463768	179.854.00	1.138.93	389.37	1.138.75	391.46	179.854	1184.56	386.18	1184.56	386.74
Kab. Malinau	49.899	308.285	313.4125251	1.288309987	1.055678456	52.281.00	788.62	23.78	771.46	24.17	52.281	813.07	22.83	813.07	22.90
Kab. Nunukan	110.850	470.7281028	471.4601168	4.161084657	4.231839127	116.553.00	741.84	44.22	742.58	44.42	116.553	844.48	61.91	844.48	62.09
Kab. Pasir	174.690	116.584	103.6237084	57.95058546	63.75826538	177.910.00	1.034.63	277.89	1.035.23	278.47	177.910	753.34	50.25	753.34	50.45
Kota Balikpapan	434.204	632.4703149	593.1401441	129.1039033	81.8008348	485.997.00	814.55	290.54	815.02	291.31	485.997	1020.40	598.55	1020.40	599.70
Kota Bontang	120.431	460.3304247	384.201966	3.827640943	0.003804275	125.187.00	568.08	7.18	569.84	5.00	125.187	708.45	23.60	708.45	23.72
Kota Samarinda	576.983	720.1175674	722.1515853	312.3625476	316.1323208	587.744.00	1.005.16	828.67	1.006.15	829.72	587.744	1028.63	747.33	1028.63	748.74
Kota Tarakan	157.728	72.891	-18.48078058	70.95471801	110.2513691	166.231.00	648.88	28.55	628.80	22.87	166.231	645.22	14.69	645.22	14.80
Kab. Paser Utara	120.230	624.2928009	614.8250689	33.45609103	39.92406298	122.146.00	595.83	10.96	598.05	10.99	122.146	503.46	0.01	503.46	0.01
Kab. Bontang Mangrove	470.604	415.6017755	422.2631117	2.372397023	3.676004391	485.222.00	471.42	0.44	473.42	0.58	485.222	348.15	58.10	348.15	57.75
Kab. Mahesa	298.252	315.0102164	320.731998	6.244493167	5.216790053	293.081.00	374.68	5.43	376.77	8.95	293.081	411.51	12.78	411.51	12.85
Kab. Sangihe	194.545	302.0755477	306.3853674	6.809877159	5.18931263	191.631.00	350.56	10.28	351.89	10.03	191.631	259.64	55.41	259.64	55.19
Kota Buntong	169.872	217.379	221.2387187	21.6368736	20.83097449	169.243.00	271.42	27.49	272.61	27.14	169.243	303.64	33.13	303.64	32.97
Kota Manado	422.482	431.57179	407.3949119	0.797243982	1.329743613	417.654.00	482.83	0.05	484.48	0.02	417.654	522.64	0.42	522.64	0.45
Kab. Kepulauan Talaud	78.280	221.0283664	224.3557032	3.629839784	9.130746693	74.680.00	258.01	14.10	257.83	13.96	74.680	288.33	16.89	288.33	16.81
Kab. Mahesa Selatan	294.898	300.498	308.0691144	9.159373305	7.943448262	276.928.00	328.43	21.64	330.20	21.05	276.928	262.17	78.45	262.17	78.13
Kota Tomohon	80.272	176.6005	180.8788658	16.828588	15.84572276	81.882.00	194.06	26.65	195.53	26.36	81.882	225.56	30.62	225.56	30.51
Kab. Mahesa Utara	189.763	345.6961666	251.2301917	14.80742739	13.62837022	170.340.00	245.40	35.94	246.93	35.43	170.340	276.57	42.76	276.57	42.58
Kab. Bolaemo	108.856	165.0370144	168.2170909	23.67129337	22.97851862	118.087.00	198.33	37.20	198.41	36.89	118.087	238.57	40.78	238.57	40.63
Kab. Gorontalo	418.258	334.6910993	340.330244	4.324199288	3.346155034	428.221.00	364.79	17.27	366.43	16.67	428.221	312.27	76.91	312.27	76.52
Kota Gorontalo	156.454	259.691854	243.0957905	14.88034114	14.1733218	158.302.00	282.31	20.26	283.30	20.02	158.302	333.13	22.69	333.13	22.56
Kab. Pohuwato	106.728	161.187917	164.5552368	20.24872586	19.57153658	109.692.00	215.14	30.22	210.30	29.93	109.692	244.00	35.84	244.00	35.70
Kab. Bone Bolango	123.360	194.1853298	197.9881936	20.46478206	19.64246911	127.052.00	228.77	31.73	229.01	31.39	127.052	289.91	28.32	289.91	28.20
Kab. Banggai	268.755	363.527558	368.7608543	0.444769091	0.59051765	291.782.00	421.88	1.74	423.91	1.55	291.782	473.13	1.68	473.13	1.61
Kab. Banggai Kepulauan	155.557	209.873447	213.8886026	21.66622585	20.66922352	152.807.00	259.31	28.15	260.44	27.83	152.807	313.97	26.96	313.97	26.83
Kab. Buol	112.437	220.0135403	223.3546789	10.8728248	13.30287183	112.960.00	245.74	23.76	246.76	23.53	112.960	288.68	25.47	288.68	25.35
Kab. Toji Toji	186.488	270.9469613	275.4785273	11.36165631	10.44947782	193.568.00	312.01	19.22	313.39	18.86	193.568	344.22	24.33	344.22	24.19
Kab. Donggala	443.397	441.800559	449.4170712	7.594618221	9.638128829	459.195.00	489.15	1.10	482.42	1.34	459.195	536.44	1.75	536.44	1.81
Kab. Morowali	189.587	358.3218884	364.3707888	0.453565947	0.240096889	173.286.00	417.05	1.33	418.94	1.21	173.286	478.68	0.70	478.68	0.67
Kab. Poso	129.709	342.7280717	349.1160753	0.92507844	0.645812565	143.378.00	368.42	5.94	370.27	5.12	143.378	388.79	8.55	388.79	8.47
Kota Palu	287.845	335.9859356	341.1575823	2.825287871	2.220471291	299.768.00	388.17	11.22	369.75	10.83	299.768	418.07	11.36	418.07	11.23
Kab. Parigi Moutong	351.541	305.44429	311.725416	0.376082239	8.103109039	350.888.00	347.72	20.40	345.39	19.79	350.888	397.18	20.77	397.18	20.59
Kab. Tolo Ura Ura	149.631	180.342	197.8025649	25.06037808	23.87915485	161.791.00	237.93	36.59	239.51	36.06	161.791	279.66	39.54	279.66	39.37
Kab. Sintang	168.357	202.8970226	205.6226834	25.60118847	24.78903782	170.681.00	235.83	39.34	236.74	39.02	170.681	284.74	47.35	284.74	47.15
Kab. Baru	158.821	234.068255	237.5090768	15.32620345	15.8728902	159.238.00	235.20	30.57	236.17	30.27	159.235	286.38	38.67	286.38	38.50
Kab. Bone	694.311	600.518216	611.2852947	48.78332868	55.17581261	696.712.00	694.71	81.50	697.03	83.69	696.712	627.47	46.69	627.47	47.07
Kab. Bulukumba	375.411	246.7886828	290.140233	16.11244346	14.98657872	383.870.00	380.54	10.67	382.05	10.26	383.870	425.47	12.25	425.47	12.10

Perhitungan Indeks Williamson DAU TA 2006, 2007, dan TA 2008 Kabupaten/Kota

Daerah	DAU TA 2006						DAU TA 2007				DAU TA 2008				
	Penduduk	PAD + DBH + DAU (Keppres)	PAD + DBH + DAU (Formula)	IW (y1 - ybar) ² Penduduk /total penduduk (Perpres)	IW (y1 - ybar) ² Penduduk /total penduduk (Formula)		Penduduk	PAD + DBH + DAU (Keppres)	IW (y1 - ybar) ² Penduduk /total penduduk (Perpres)	PAD + DBH + DAU (Formula)	IW (y1 - ybar) ² Penduduk /total penduduk (Formula)	Penduduk	PAD + DBH + DAU (Keppres)	IW (y1 - ybar) ² Penduduk /total penduduk (Perpres)	PAD + DBH + DAU (Formula)
Kab. Enrekang	182.058	241,1227608	244,4541678	16,96772298	16,16233953	183,923,00	269,00	30,65	269,96	30,34	183,923	302,47	36,42	302,47	36,24
Kab. G o w a	574.845	391,6547439	397,5254106	0,275350918	0,690229033	586,069,00	433,09	1,64	434,73	1,43	586,069	477,55	2,54	477,55	2,46
Kab. Jenepono	331.938	273,4552968	277,4515294	18,33333674	17,00238427	329,023,00	314,09	31,74	315,35	31,19	329,023	363,99	31,98	363,99	31,76
Kab. Luwu	315.292	265,537	270,0595667	20,05777862	18,52399859	317,794,00	323,70	28,69	324,99	26,18	317,794	361,81	31,83	361,81	31,61
Kab. Luwu Utara	287.323	274,517517	279,2861308	15,55894378	14,20312206	298,947,00	311,60	29,85	313,15	29,22	298,947	354,08	33,19	354,08	32,99
Kab. M a r o s	296.450	308,377025	312,8327757	7,505205725	6,618894005	297,618,00	347,83	16,79	349,12	16,40	297,618	385,60	20,89	385,60	20,72
Kab. Pangkajene Kepulauan	279.635	282,7689118	286,4288867	12,89908559	11,96010357	289,342,00	321,99	24,92	323,08	24,53	289,342	398,94	16,12	398,94	15,98
Kab. Pinrang	335.545	325,4436469	330,6739598	4,995865234	4,107930687	340,439,00	360,41	15,06	361,93	14,59	340,439	393,79	20,80	393,79	20,63
Kab. Selayar	111.472	210,66325	213,6195711	15,38349902	14,84213842	116,513,00	256,15	22,16	257,20	21,93	116,513	286,91	26,70	286,91	26,58
Kab. Sidenreng Rappang	247.039	302,988897	307,247087	7,208782844	6,448350407	246,879,00	332,23	18,17	333,39	17,84	246,879	372,85	21,13	372,85	20,97
Kab. Sinjai	220.430	313,9746054	319,6734885	4,759835624	3,990893925	222,220,00	290,92	28,93	292,09	28,52	222,220	337,05	30,43	337,05	30,26
Kab. Soppeng	229.465	270,884	275,6775905	13,28354789	12,15742762	227,273,00	324,85	18,76	326,21	18,38	227,273	358,85	23,69	358,85	23,54
Kab. Takalar	248.152	282,1733029	286,2663005	11,58476583	10,649864	250,651,00	312,06	24,87	313,29	24,45	250,651	345,14	31,15	345,14	30,97
Kab. Tana Toraja	427.212	366,4897103	372,1863161	0,459852533	0,178164201	446,681,00	408,90	5,37	409,50	5,03	446,681	450,25	6,97	450,25	6,85
Kab. Wajo	364.360	333,1513841	337,7793151	4,037555975	3,302421417	373,938,00	386,50	8,84	387,92	8,49	373,938	422,72	12,74	422,72	12,59
Kota Pare-pare	115.318	219,086166	222,1577564	14,38441689	13,8452956	115,169,00	249,75	23,32	250,64	23,12	115,169	274,99	29,31	274,99	29,19
Kota Makassar	1.193.434	719,9416177	728,7442506	645,4205446	679,4501863	1.223.540,00	807,33	702,19	810,11	713,41	1.223.540	899,68	880,58	899,68	882,79
Kota Palopo	127.804	213,1226251	216,0185562	17,13345524	16,54892144	133,990,00	244,62	28,48	245,54	28,24	133,990	267,82	36,23	267,82	36,08
Kab. Luwu Timur	206.033	259,4066711	263,3250389	14,52846486	13,61090913	219,202,00	300,87	25,23	302,19	24,80	219,202	368,15	20,09	368,15	19,95
Kab. Majene	131.985	211,4164221	214,7839044	18,05418916	17,34614957	131,836,00	243,15	28,41	244,18	28,14	131,836	276,22	33,20	276,22	33,06
Kab. Soppeng	283.675	314,0466559	319,5365088	6,112462278	5,15869963	284,026,00	365,68	11,23	367,43	10,81	284,026	439,83	6,18	439,83	6,09
Kab. Polewali Mandar	352.900	305,0887185	309,6193821	10,03141041	8,877671853	356,007,00	341,46	22,49	342,74	22,00	356,007	389,34	23,49	389,34	23,29
Kab. Mamasa	122.340	184,3156067	187,0804628	22,48964494	21,86304877	121,790,00	208,06	35,54	208,87	35,31	121,790	240,16	40,96	240,16	40,81
Kab. Mamuju Utara	97.095	172,6953018	176,2859261	20,01342736	19,33099557	97,930,00	186,43	33,75	187,67	33,44	97,930	220,04	38,07	220,04	37,94
Kab. Buton	269.992	292,151177	297,4350099	10,20114559	9,300791218	271,657,00	311,85	27,03	313,52	26,42	271,657	373,92	22,88	373,92	22,72
Kab. Konawe	255.366	390,713	398,0392141	0,100511017	0,326705302	265,646,00	435,95	0,58	438,29	0,46	265,646	384,99	18,83	384,99	18,68
Kab. Kolaka	263.919	339,758314	345,763259	2,181079592	1,599531642	273,168,00	389,43	5,94	391,40	5,60	273,168	460,62	2,87	460,62	2,81
Kab. Muna	296.105	327,414	333,0608476	4,104626182	3,293121563	290,358,00	411,98	2,82	413,79	2,60	290,358	381,70	21,70	381,70	21,53
Kota Kendari	227.027	288,3448905	292,7879492	9,323469123	8,455568936	244,586,00	332,45	17,94	333,88	17,53	244,586	379,70	18,86	379,70	18,72
Kota Bau-bau	121.283	221,752901	225,3427226	14,63600651	13,98546161	122,339,00	263,16	21,67	264,27	21,43	122,339	291,38	26,91	291,38	26,79
Kab. Konawe Selatan	226.009	246,028	251,2468626	19,61842975	18,1362222	234,400,00	309,51	25,07	308,24	24,50	234,400	341,22	30,56	341,22	30,38
Kab. Bombana	106.231	191,27171	195,3286097	18,17540938	17,40827881	107,294,00	212,05	30,32	213,49	29,97	107,294	244,01	35,05	244,01	34,92
Kab. Wakatobi	95.512	154,727	158,821596	23,21992801	22,36875323	98,180,00	200,49	30,42	202,02	30,06	98,180	242,88	32,35	242,88	32,23
Kab. Kolaka Utara	97.250	197,4455	202,2220207	15,57679914	14,77872388	94,190,00	223,24	24,24	224,94	23,89	94,190	255,23	28,21	255,23	28,10
Kab. Badung	422.579	481,8550718	483,2764904	20,0699308	20,64407048	398,771,00	689,54	100,68	690,59	101,59	398,771	804,81	164,82	804,81	165,36
Kab. Bangli	212.040	228,8001845	232,5452667	23,3815309	22,24851073	211,759,00	258,54	39,32	259,64	38,89	211,759	289,74	47,28	289,74	47,07
Kab. Buleleng	610.657	460,775989	468,224084	18,09023852	21,65445843	610,091,00	534,37	16,90	536,61	17,90	610,091	573,22	12,19	573,22	12,38
Kab. Gianyar	429.455	410,962967	416,3827601	1,751047281	2,454281243	427,262,00	435,77	0,95	437,37	0,81	427,262	489,84	0,66	489,84	0,62
Kab. Jemberana	253.235	279,8379505	284,3044834	12,38402704	11,31998972	250,816,00	304,66	27,48	305,96	27,02	250,816	338,51	33,77	338,51	33,57
Kab. Karangasem	398.339	321,1557903	326,0676125	6,871331471	5,799133735	380,305,00	359,11	17,27	360,52	16,78	380,305	398,72	21,27	398,72	21,08
Kab. Klungkung	164.732	248,2848715	252,2757688	13,82718311	13,01108897	164,727,00	280,56	24,19	281,76	23,86	164,727	314,37	28,95	314,37	28,80
Kab. Tabanan	407.479	333,754	339,4141275	4,403705007	3,422702548	404,253,00	438,43	0,84	438,12	0,71	404,253	487,23	0,81	487,23	0,78
Kota Denpasar	533.521	433,675328	438,5444235	6,891121898	8,177474025	583,601,00	503,10	5,69	504,84	6,08	583,601	493,17	0,60	493,17	0,56
Kab. Blma	410.818	374,6491579	380,4459488	0,093354862	0,002505817	410,275,00	419,89	2,72	421,72	2,47	410,275	485,14	1,00	485,14	0,96
Kab. Dompu	206.126	256,2991473	260,434111	15,28380294	14,29095844	206,414,00	299,78	24,09	301,09	23,69	206,414	320,77	33,91	320,77	33,74
Kab. Lombok Barat	743.533	426,9191695	433,0785655	7,218506907	9,314232487	782,943,00	486,12	3,00	488,01	3,41	782,943	553,25	7,54	553,25	7,70

Perhitungan Indeks Williamson DAU TA 2006, 2007, dan TA 2008 Kabupaten/Kota

Daerah	DAU TA 2006				DAU TA 2007				DAU TA 2008				IW
	Penduduk	PAD + DBH + DAU (Keppres)	PAD + DBH + OAU (Formula)	(y _i - y _{bar}) ² Penduduk /total	Penduduk	PAD + DBH + DAU (Keppres)	(y _i - y _{bar}) ² Penduduk /total	PAD + DBH + DAU (Keppres)	Penduduk	(y _i - y _{bar}) ² Penduduk /total	PAD + DBH + DAU (Keppres)	(y _i - y _{bar}) ² Penduduk /total	
Kab. Lombok Tengah	763.495	433.4982516	439.7287602	10,10174372	825.772.00	499.94	6,97	825.772	6,94	560.60	10,74	560.60	10,94
Kab. Lombok Timur	1.033.794	536.1979008	543.8070045	116,7402543	1.053.347.00	607.15	110,61	1.053.347	114,01	674.16	136,49	674.16	137,29
Kab. Sumbawa	390.392	319.9808759	324.4663678	6,99947819	403.500.00	406.86	4,06	403.500	4,46	467.11	3,16	467.11	3,09
Kota Mataram	356.949	284.2102667	298.1649335	12,87277991	353.163.00	351.71	18,54	353.163	18,09	371.19	30,98	371.19	30,75
Kota Bima	118.601	205.9446785	209.0338125	17,2834914	126.035.00	234.38	29,43	126.035	29,19	265.13	34,85	265.13	34,71
Kab. Sumbawa Barat	89.814	189.3603666	191.7438125	15,67677152	95.837.00	243.09	20,67	95.837	20,44	281.67	23,01	281.67	22,91
Kab. Alor	170.438	256.9045158	260.8218109	12,51578158	177.009.00	279.10	28,43	177.009	26,10	305.34	34,07	305.34	33,91
Kab. Belu	354.748	331.5688589	336.8916937	4,192126909	394.810.00	344.59	23,61	394.810	22,95	417.93	15,00	417.93	14,84
Kab. Ende	239.646	270.4845	274.6441256	13,9782697	237.550.00	278.45	35,72	237.550	35,25	341.58	30,83	341.58	30,65
Kab. Flores Timur	217.997	246.374	250.622315	18,02848219	225.268.00	302.06	25,53	225.268	25,12	327.87	34,26	327.87	34,07
Kab. Kupang	339.909	337.7821856	342.9907245	3,060776978	362.790.00	397.29	6,17	362.790	5,81	433.86	9,34	433.86	9,21
Kab. Lembata	97.679	184.5228894	186.8265232	17,9185214	102.344.00	207.59	29,98	102.344	28,83	240.99	34,20	240.99	34,09
Kab. Manggarai	496.915	352.2381197	357.7031372	2,021619981	495.136.00	388.23	11,15	495.136	10,66	419.59	18,12	419.59	17,92
Kab. Ngada	243.765	275.0491958	279.3030626	13,06945707	250.305.00	305.28	27,20	250.305	26,76	189.94	118,71	189.94	116,34
Kab. Sikka	278.246	272.275631	276.3982982	15,70503973	275.935.00	312.04	27,39	275.935	26,92	339.23	36,83	339.23	36,62
Kab. Sumba Barat	400.653	301.7515915	306.0794707	12,06235613	409.851.00	339.99	26,59	409.851	25,99	112.57	300,46	112.57	299,72
Kab. Sumba Timur	204.158	288.1775	292.6601334	8,14423713	217.454.00	321.06	18,99	217.454	18,61	355.89	23,58	355.89	23,42
Kab. Timor Tengah Selatan	405.678	357.3336662	362.7521723	1,127055346	412.353.00	392.68	8,13	412.353	7,75	428.52	12,20	428.52	12,05
Kab. Timor Tengah Utara	209.326	286.4116637	270.3477274	13,1168107	209.037.00	286.77	28,58	209.037	28,22	322.84	33,59	322.84	33,41
Kota Kupang	267.938	288.8295921	293.4187449	10,89949718	278.124.00	309.31	28,75	278.124	28,27	361.32	28,14	361.32	27,95
Kab. Rote Ndao	104.511	168.8303644	171.9509899	22,3467714	110.617.00	201.20	34,08	110.617	33,88	229.46	40,23	229.46	40,09
Kab. Maluku Tenggara Barat	148.481	311.805	317.3726319	28,64649347	153.003.00	401.43	2,26	153.003	2,10	461.46	1,55	461.46	1,52
Kab. Maluku Tenggara	330.809	494.555507	504.5140533	20,0496258	327.481.00	553.82	14,24	327.481	15,18	555.77	3,51	555.77	3,59
Kab. Pulau Buu	124.952	252.940997	256.40246	9,768252999	127.158.00	283.11	18,14	127.158	17,92	292.91	27,88	292.91	27,75
Kota Ambon	232.379	319.4435102	324.6374717	4,238912589	244.274.00	350.32	13,16	244.274	12,80	405.02	12,14	405.02	12,02
Kab. Seram Bagian Barat	145.802	252.3535053	258.1187939	11,59256811	140.960.00	287.47	19,12	140.960	18,67	276.83	35,31	276.83	35,16
Kab. Seram Bagian Timur	78.003	173.5213	177.2285055	15,95139452	79.156.00	233.77	18,58	79.156	18,36	257.23	23,33	257.23	23,24
Kab. Kepulauan Aru	69.781	152.88	156.3376098	17,24182532	70.417.00	207.10	20,71	70.417	20,48	247.36	22,42	247.36	22,34
Kab. Halmahera Tengah	31.914	179.186248	183.1369407	6,175166841	32.913.00	216.52	8,96	32.913	8,95	243.07	10,83	243.07	10,79
Kab. Halmahera Barat	97.114	186.861	200.4845516	15,6539225	95.871.00	221.88	24,94	95.871	24,71	268.51	25,77	268.51	25,67
Kota Ternate	159.462	242.028	245.2695794	14,67084327	161.085.00	301.62	18,36	161.085	18,09	324.66	25,38	324.66	25,24
Kab. Halmahera Timur	53.831	196.5113838	200.3916025	8,709996009	62.272.00	233.69	14,63	62.272	14,44	273.90	16,00	273.90	15,93
Kab. Kepulauan Sulo	79.016	235.9618946	192.2499003	7,915352303	80.178.00	230.25	19,42	80.178	19,20	242.92	26,41	242.92	26,31
Kab. Halmahera Selatan	170.353	206.887	212.0541748	16,34344429	163.926.00	263.42	22,58	163.926	22,14	302.22	30,24	302.22	30,11
Kab. Halmahera Utara	174.035	211.60997	257.7058402	22,10478829	178.799.00	275.78	27,70	178.799	27,19	339.21	23,87	339.21	23,73
Kab. Jayapura	99.798	310.5038632	315.3395467	2,381907957	105.015.00	343.96	6,35	105.015	6,19	380.42	8,01	380.42	7,95
Kab. Jayawijaya	210.554	365.586341	372.3114754	0,256221451	96.798.00	466.25	0,03	96.798	0,06	96.798	0,56	96.798	0,54
Kab. Merauke	155.733	599.5426093	610.1534415	34,95901837	163.926.00	712.87	50,13	163.926	51,52	771.31	53,33	771.31	53,53
Kab. Nabire	161.519	395.965027	406.1793553	0,25775551	169.982.00	434.73	0,41	169.982	0,35	489.67	0,27	489.67	0,25
Kab. Paniai	112.881	411.0474841	417.7201243	0,462868607	118.781.00	452.75	0,01	118.781	0,00	487.06	0,24	487.06	0,23
Kab. Puncak Jaya	111.711	354.5428155	359.5726227	0,385898329	117.550.00	417.25	0,69	117.550	0,83	458.72	1,34	458.72	1,31

Perhitungan Indeks Williamson DAU TA 2006, 2007, dan TA 2008 Kabupaten/Kota

Daerah	DAU TA 2006					DAU TA 2007					DAU TA 2008				
	Penduduk	PAD + DBH + DAU (Kappras)	PAD + DBH + DAU (Formula)	(yi - ybar) ² Penduduk (Perpres)	(yi - ybar) ² Penduduk (Formula)	Penduduk	PAD + DBH + DAU (Kappras)	(yi - ybar) ² Penduduk (Perpres)	PAD + DBH + DAU (Formula)	(yi - ybar) ² Penduduk (Formula)	Penduduk	PAD + DBH + DAU (Kappras)	(yi - ybar) ² Penduduk (Perpres)	PAD + DBH + DAU (Formula)	(yi - ybar) ² Penduduk (Formula)
Kab. Yapen Waropen	70.744	257.7320625	262.1957765	5.126215031	4.763955468	74.442.00	611.15	8.24	612.63	8.89	144.435	319.98	12.33	319.95	12.27
Kota Jayapura	203.360	331.0617	356.0761104	0.681794896	0.615738345	210.834.00	369.89	7.54	371.05	7.39	74.442	419.27	7.77	419.27	7.89
Kab. Serani	31.593	439.377614	450.1666255	0.498460965	0.702468883	33.244.00	488.94	0.15	492.56	0.19	210.834	370.91	2.93	370.91	2.91
Kab. Keerom	37.927	271.2064929	277.3568549	2.179527628	1.946214476	39.910.00	307.98	4.19	310.03	4.07	48.469	352.85	4.50	352.85	4.47
Kab. Yahukimo	137.280	325.429	333.3048576	2.044704328	1.511217373	144.435.00	356.89	6.66	358.53	6.90	39.910	465.99	1.19	465.99	1.16
Kab. Pegunungan Bintang	88.829	329.742	337.2451552	1.12398351	0.822092485	93.157.00	356.14	4.49	358.63	4.27	93.157	406.52	4.49	406.52	4.45
Kab. Tolikara	44.180	254.757	261.1783573	3.3569942	3.025532674	48.489.00	291.74	5.99	293.90	5.84	33.085	320.44	7.18	320.44	7.14
Kab. Boven Digoel	31.443	417.655909	427.634387	0.193248887	0.31500514	33.086.00	469.80	0.02	473.07	0.04	69.690	560.45	0.43	560.45	0.44
Kab. Mappi	65.228	345.2517573	356.6559794	0.347608565	0.194230485	69.690.00	456.72	0.00	459.80	0.00	65.243	480.77	0.24	480.77	0.23
Kab. Asmat	62.092	369.8068288	378.2554781	0.040816772	0.003241551	65.243.00	402.85	0.91	405.65	0.92	22.778	448.53	1.15	448.53	1.13
Kab. Waropen	21.647	271.499	277.6494729	1.239242913	1.104581819	22.778.00	327.28	1.81	329.31	1.76	39.244	236.67	7.88	236.67	7.83
Kab. Supiori	12.769	290.8229017	294.7594753	1.979048574	1.67708011	13.373.00	259.72	2.45	261.42	2.41	13.373	255.73	3.99	255.73	3.97
Kab. Sorong	87.048	413.0373537	418.059509	0.406781584	0.547141933	93.193.00	415.32	0.78	416.63	0.73	93.193	466.50	0.75	466.50	0.73
Kab. Manokwari	152.302	414.4208072	420.408683	0.775705992	1.084451748	193.054.00	472.85	0.18	474.67	0.22	193.054	442.06	3.32	442.06	3.27
Kab. Fak Fak	58.853	323.56515	329.2169152	0.837451564	0.763640549	63.115.00	381.13	1.73	383.10	1.64	63.115	445.88	1.14	445.88	1.12
Kota Sorong	143.898	251.496	254.5991026	11.81041901	11.34850196	159.506.00	301.87	18.12	302.81	17.90	159.506	311.59	28.84	311.59	28.70
Kab. Sorong Selatan	54.246	249.4079854	405.3927949	4.476867088	0.145277829	58.078.00	432.68	0.17	435.37	0.13	39.087	371.33	5.08	371.33	5.06
Kab. Raja Ampat	36.510	416.7470449	274.7152517	0.213233845	1.958673114	39.087.00	324.95	3.22	327.06	3.12	58.078	501.82	0.01	501.82	0.01
Kab. Teluk Bintuni	47.419	342.989	346.8793694	0.333880516	0.238583111	50.766.00	415.17	0.43	417.08	0.39	50.768	529.12	0.11	529.12	0.11
Kab. Teluk Wondama	20.414	194.915328	199.7157513	3.360240346	3.19954381	21.655.00	225.24	5.53	227.03	5.45	21.855	291.50	4.60	291.50	4.78
Kab. Kaimana	37.132	324.8635232	331.5800299	0.564335796	0.438904049	39.753.00	388.04	1.49	390.39	1.42	39.753	411.15	1.75	411.15	1.73
	211.592.314	381.5948535	381.3822736	120711.8358	115686.1512	213.229.326.00	457.52	158041.83	457.52	154178.83	#####	507.94	190891.72	507.45	189177.86



Perhitungan Indeks Williamson DAU TA 2007 dan TA 2008 Provinsi

(Prov)	DAU 2006			DAU 2007			DAU 2008			IV
	Panduitulak	PAO+DBH+DAU (Perpans)	PAO+DBH+DAU (Formula)	PAO+DBH+DAU (Perpans)	PAO+DBH+DAU (Formula)	PAO+DBH+DAU (Perpans)	PAO+DBH+DAU (Formula)	PAO+DBH+DAU (Perpans)	PAO+DBH+DAU (Formula)	
Provinsi Papua	182498	810.237	6128.4339	553.018616	2449.49412	1303.418.00	1.202.23	1.513.04	5.297.36	5.540.07
Provinsi Nusa Tenggara Barat	474312	1119.980332	7396.14743	6483.486153	5825677891	4.257.306.00	508.22	551.93	34.807.85	24.850.89
Provinsi Nusa Tenggara Timur	4218785	864.7982392	7650.821831	20758.363933	60389.85092	4.359.121.00	773.46	873.45	35.876.48	29.957.30
Provinsi Jawa Barat	543013	468.431	2426.749366	4658.918461	31293.26876	668.455.00	577.37	758.68	7.564.03	7.372.71
Provinsi Jawa Tengah	587852	281.2318	860.2373022	5822.86884	333.088	891.559.00	333.088	430.18	15.692.60	15.614.65
Provinsi Kalimantan Barat	4998491	980.9387945	4971.273403	8787.118181	591.5557342	4.118.275.00	1.078.14	1.255.11	20.227.86	20.227.77
Provinsi Kalimantan Selatan	655600	425.5978627	2568.523028	6578.147535	49838.80963	919.160.00	466.72	585.02	12.678.63	12.176.74
Provinsi Maluku Utara	3440100	1076.671796	1388.286182	49838.80963	3.245.784.00	1.206.42	1.346.76	1.346.76	13.163.63	13.762.78
Provinsi Gorontalo	392832	445.2268037	911.1682333	50133.55484	541.444.00	243.70	243.70	445.87	14.551.68	14.556.16
Provinsi Sulawesi Tenggara	1948654	545.7860131	1718.837128	63614.1868	2081.818.00	878.03	878.03	855.43	18.795.16	18.818.81
Provinsi Sulawesi Selatan	7455703	1317.033592	4084.388473	5156.122289	1.560.32	7.628.959.00	1.560.32	1.986.94	3.360.52	3.380.17
Provinsi Jawa Timur	36669132	4880.517313	15395.42838	1471437.5	36.527.435.00	4.995.76	5.683.60	5.303.62	1.485.693.13	1.484.883.45
Provinsi Sulawesi Tengah	7285018	471.648	2189.466822	18448.45493	2.349.398.00	859.23	652.64	851.13	25.487.35	22.532.99
Provinsi Banten	3996000	1763.943655	4483.430087	352.9961158	48.77318437	8.222.850.00	1.833.85	2.007.77	3.539.79	3.561.85
Provinsi Lampung	7166465	1066.774377	3813.603063	13885.35209	19559.65222	7.211.565.00	1.383.19	1.476.25	27.917.20	27.060.79
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	4037800	400.681	2681.530704	67281.05044	4.012.748.00	2.515.34	2.434.69	3.012.22	9.303.63	9.379.92
Provinsi Maluku	3258433	551.09378	1824.393389	7673.581741	37803.85881	1.211.035.00	618.70	738.89	13.932.21	13.853.54
Provinsi Jawa Tengah	3258433	3695.581294	1828.73218	882210.1878	11851060.73	4.381.12	4.288.54	4.045.23	638.373.78	637.706.09
Provinsi Bali	3432377	1151.142484	2134.121486	4800.07746	78713.85934	1.218.34	1.236.86	1.267.35	16.582.76	16.491.24
Provinsi Jawa Barat	38265700	4520.189037	15972.78569	1384562.540	22.51929.31	39.549.023.00	5.143.87	5.685.83	2.045.01.97	2.044.933.84
Provinsi Sumatera Selatan	5155000	1602.891447	5021.983009	309.2521	13848.35032	8.839.822.00	2.185.38	2.454.56	843.15	833.88
Provinsi Kepulauan Belitung	1663965	471.677866	1023.192376	737.17413	54789.76409	1.074.775.00	566.07	699.98	13.381.04	12.385.11
Provinsi Jambi	1508177	513.0718944	1281.101272	1032.1033	15352.7184	1.568.077.00	888.10	768.23	16.534.09	16.573.23
Provinsi Bengkulu	2687300	783.2863746	2129.305667	10048.82866	70323.07488	3.833.289.00	535.45	1.095.68	17.509.22	17.553.85
Provinsi Sumatera Utara	4595243	385.148195	2011.264737	10842.65172	4871.819	4.632.152.00	1.086.14	1.280.47	21.661.64	21.699.27
Provinsi Sumatera Barat	12326678	2115.791223	8583.066688	9360.905079	28272.7172	12.643.494.00	2.424.77	2.934.40	7.648.86	7.661.19
Provinsi Sumatera Utara	12326678	635.942	1160.324232	6625.158638	58118.78754	1.337.663.00	1.085.39	1.172.70	22.917.43	22.851.86
Provinsi Kalimantan Timur	1274848	2864.519	8726.30831	9381.039615	45088.8472	3.068.20	3.022.89	4.045.67	40.052.40	40.010.61
Provinsi Kalimantan Tengah	1804143	604.09	3720.118845	781.217453	3821.895223	1.937.754.00	838.05	1.147.48	11.578.91	11.588.18
Provinsi Kalimantan Selatan	2810900	885.074983	1831.644803	10026.08729	91910.65002	3.389.733.00	909.24	1.064.09	23.287.74	23.322.04
Provinsi Riau	4612015	2800.141630	1460.547126	25013.47133	10915.45121	3.626.20	3.533.11	3.463.10	29.037.74	28.962.45
Provinsi Sulawesi Utara	9880752	617.6884473	1460.68928	11728.9701	85423.54785	2.160.641.00	706.12	818.20	31.316.78	31.342.91
Provinsi DKI Jakarta		14389.33303	1563.81946	7089982.238	4986987.983	8.985.218.00	18.309.47	18.761.54	10.931.71.48	10.970.378.51
			2122.191.644.00	2.078.00	2.061.37	14934289.27	14138112.83	2.400.89	15908483.47	15936458.38

Hasil Regresi DAU Provinsi Tahun 2006 Berdasarkan Formula

Regresi DAU Formula 2006 Provinsi

Dependent Variable: DAUF
 Method: Least Squares
 Date: 05/20/09 Time: 22:52
 Sample: 1 33
 Included observations: 33

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.019373	0.025341	-0.764511	0.4523
GAJI	1.000005	1.96E-05	50963.71	0.0000
PDDK	0.000310	6.17E-10	502994.4	0.0000
LW	0.016593	4.34E-08	382318.5	0.0000
IKK	1.209286	0.000116	10405.53	0.0000
IPMI	1.563647	0.000625	2501.780	0.0000
PDRB	1.36E-05	1.29E-09	10558.64	0.0000
PAD	-0.439772	1.09E-05	-40360.56	0.0000
BHSDA	-0.439776	7.29E-06	-60360.42	0.0000
BHP	-0.439792	1.86E-05	-23702.21	0.0000
R-squared	1.000000	Mean dependent var		3141.416
Adjusted R-squared	1.000000	S.D. dependent var		2898.296
S.E. of regression	0.007864	Akaike info criterion		-6.607877
Sum squared resid	0.001423	Schwarz criterion		-6.154390
Log likelihood	119.0300	F-statistic		4.83E+11
Durbin-Watson stat	2.238781	Prob(F-statistic)		0.000000

White Heteroskedasticity DAU Formula 2006 Provinsi

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	1.671305	Probability	0.166903
Obs*R-squared	22.51989	Probability	0.209719

Uji Multikolinearity DAU Formula 2006 Provinsi

	DAUF	GAJI	PDDK	LW	IKK	IPMI	PDRB	PAD	BHSDA	BHP
DAUF	1	0.121958	0.919248	0.257482	-0.02232	0.077636	-0.09393	0.420343	0.057472	0.042561
GAJI	0.121958	1	0.278294	-0.17147	-0.16532	-0.40507	0.898746	0.922642	-0.00633	0.967782
PDDK	0.919248	0.278294	1	-0.12744	-0.31338	-0.0688	0.006086	0.583656	-0.04637	0.192973
LW	0.257482	-0.17147	-0.12744	1	0.714585	0.233808	-0.00788	-0.17279	0.414221	-0.13528
IKK	-0.02232	-0.16532	-0.31338	0.714585	1	0.450429	-0.04529	-0.23431	0.023445	-0.0757
IPMI	0.077636	-0.40507	-0.0688	0.233808	0.450429	1	-0.52513	-0.3942	-0.29761	-0.39562
PDRB	-0.09393	0.898746	0.006086	-0.00788	-0.04529	-0.52513	1	0.78332	0.210303	0.9365
PAD	0.420343	0.922642	0.583656	-0.17279	-0.23431	-0.3942	0.78332	1	0.050694	0.89891
BHSDA	0.057472	-0.00633	-0.04637	0.414221	0.023445	-0.29761	0.210303	0.050694	1	0.042513
BHP	0.042561	0.967782	0.192973	-0.13528	-0.0757	-0.39562	0.9365	0.89891	0.042513	1

Lampiran 4

Hasil Regresi DAU Provinsi Tahun 2006 Berdasarkan Peraturan Presiden

Regresi DAU Perpres 2006 Provinsi

Dependent Variable: DAUK
 Method: Least Squares
 Date: 05/20/09 Time: 22:48
 Sample: 1 33
 Included observations: 33

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.111328	47.36094	0.002351	0.9981
GAJI	1.073138	0.036673	29.26240	0.0000
PDDK	1.73E-05	1.15E-06	15.05133	0.0000
LW	0.001158	8.11E-05	14.28111	0.0000
IKK	1.106270	0.217205	5.093217	0.0000
IPMI	1.480192	1.168137	1.267139	0.2178
PDRB	8.28E-06	2.41E-06	3.437717	0.0022
PAD	-0.178747	0.020365	-8.777376	0.0000
BHSDA	-0.221468	0.013617	-16.26396	0.0000
BHP	-0.324766	0.034679	-9.364996	0.0000
R-squared	0.994844	Mean dependent var		450.5178
Adjusted R-squared	0.992826	S.D. dependent var		173.5352
S.E. of regression	14.69851	Akaike info criterion		8.458416
Sum squared resid	4969.061	Schwarz criterion		8.911903
Log likelihood	-129.5639	F-statistic		493.0502
Durbin-Watson stat	1.792725	Prob(F-statistic)		0.000000

White Heteroskedasticity DAU Perpres 2006 Provinsi

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	1.581061	Probability	0.194444
Obs*R-squared	22.11894	Probability	0.226747

Uji Multikolinearity DAU Formula 2006 Provinsi

	DAUK	GAJI	PDDK	LW	IKK	IPMI	PDRB	PAD	BHSDA	BHP
DAUK	1	0.516013	0.59361	0.251782	0.148027	0.083894	0.260088	0.549501	-0.290086	0.374263
GAJI	0.516013	1	0.278293	-0.171474	-0.16535	-0.40513	0.698746	0.922642	-0.006328	0.967782
PDDK	0.59361	0.278293	1	-0.127436	-0.31333	-0.06872	0.006086	0.583656	-0.046366	0.192972
LW	0.251782	-0.171474	-0.12744	1	0.714592	0.233854	-0.007874	-0.17279	0.41422	-0.13528
IKK	0.148027	-0.165345	-0.31333	0.714592	1	0.450454	-0.045321	-0.23431	0.023443	-0.07573
IPMI	0.083894	-0.405132	-0.06872	0.233854	0.450454	1	-0.525197	-0.39423	-0.297687	-0.39569
PDRB	0.260088	0.698746	0.006086	-0.007874	-0.04532	-0.5252	1	0.78332	0.210302	0.9365
PAD	0.549501	0.922642	0.583656	-0.172781	-0.23431	-0.39423	0.78332	1	0.050694	0.89891
BHSDA	-0.290086	-0.006328	-0.04637	0.41422	0.023443	-0.29769	0.210302	0.050694	1	0.042511
BHP	0.374263	0.967782	0.192972	-0.13528	-0.07573	-0.39569	0.9365	0.69891	0.042511	1

Hasil Regresi DAU Provinsi Tahun 2007 Berdasarkan Formula

Regresi DAU Formula 2007 Provinsi

Dependent Variable: DAUF
 Method: Least Squares
 Date: 05/01/09 Time: 18:34
 Sample: 1 33
 Included observations: 33

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-99.43761	108.5119	-0.916375	0.3690
GAJI	0.919055	0.105180	8.737926	0.0000
PDDK	2.18E-05	2.81E-06	7.772743	0.0000
LW	0.000807	0.000189	4.260099	0.0003
IKK	0.982982	0.412565	2.382610	0.0258
PDRB	9.11E-06	4.48E-06	2.035823	0.0534
IPMI	5.526933	2.867772	1.927256	0.0664
PAD	-0.113644	0.059613	-1.906352	0.0692
BHSDA	-0.157492	0.019761	-7.969807	0.0000
BHP	-0.282396	0.115201	-2.451326	0.0223
R-squared	0.986703	Mean dependent var		498.2374
Adjusted R-squared	0.981500	S.D. dependent var		238.8220
S.E. of regression	32.48364	Akaike info criterion		10.04440
Sum squared resid	24269.30	Schwarz criterion		10.49788
Log likelihood	-155.7326	F-statistic		189.6327
Durbin-Watson stat	1.861550	Prob(F-statistic)		0.000000

White Heteroskedasticity DAU Formula 2007 Provinsi

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	1.768679	Probability	0.141671
Obs*R-squared	22.92064	Probability	0.193658

Uji Multikolinearity DAU Formula 2007 Provinsi

	LOG(DAUK)	LOG(GAJI)	LOG(PDDK)	LOG(LW)	LOG(IKK)	LOG(PDRB)	LOG(IPMI)	LOG(PAD)	LOG(BHSDA)	LOG(BHP)
LOG(DAUK)	1	0.1387451	0.43357475	0.455576	0.089575	-0.231526664	0.441223524	0.050861314	-0.186934565	-0.09615521
LOG(GAJI)	0.1387451	1	0.74227356	-0.24457	-0.36686	0.216730944	-0.287344739	0.824679971	0.070840111	0.61993984
LOG(PDDK)	0.4335748	0.74227356	1	-0.154542	-0.54468	0.124607675	-0.128168143	0.80402435	0.056067107	0.64557693
LOG(LW)	0.4555751	-0.24457	-0.1545423	1	0.520003	0.041621694	0.404800978	-0.310332968	0.42156274	-0.114249245
LOG(IKK)	0.0895747	-0.366858	-0.5445815	0.520003	1	-0.053084744	0.441571113	-0.563379357	0.20414156	-0.12787765
LOG(PDRB)	-0.231527	0.2167309	0.12460768	0.041622	-0.05308	1	-0.636847875	0.285369529	0.412334801	0.48470700
LOG(IPMI)	0.4412236	-0.287345	-0.1281681	0.404801	0.441571	-0.636847875	1	-0.421577482	-0.095766825	-0.345434155
LOG(PAD)	0.0508613	0.82468	0.80402435	-0.310333	-0.56338	0.285369529	-0.421577482	1	0.124232551	0.594068873
LOG(BHSDA)	-0.186935	0.0708401	0.05606711	0.421563	0.204142	0.412334801	-0.095766825	0.124232551	1	0.475726783
LOG(BHP)	-0.096155	0.6199398	0.64557694	-0.114249	-0.12788	0.484707001	-0.345434157	0.594068875	0.475726783	1

Hasil Regresi DAU Provinsi Tahun 2007 Berdasarkan Peraturan Presiden

Regresi DAU Perpres 2007 Provinsi

Dependent Variable: DAUK
 Method: Least Squares
 Date: 05/01/09 Time: 18:51
 Sample: 1 33
 Included observations: 33

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.000509	0.000954	0.532986	0.5992
GAJI	1.000000	9.25E-07	1081330.	0.0000
PDDK	2.13E-05	2.47E-11	863817.0	0.0000
LW	0.001025	1.67E-09	615572.5	0.0000
IKK	0.951305	3.63E-06	262251.8	0.0000
PDRB	1.12E-05	3.93E-11	284523.2	0.0000
IPMI	1.598358	2.52E-05	61803.62	0.0000
PAD	-0.151736	5.24E-07	-289491.4	0.0000
BHSDA	-0.151737	1.74E-07	-873314.8	0.0000
BHP	-0.227608	1.01E-06	-224709.3	0.0000
R-squared	1.000000	Mean dependent var		499.3558
Adjusted R-squared	1.000000	S.D. dependent var		219.3337
S.E. of regression	0.000286	Akaike info criterion		-13.23884
Sum squared resid	1.88E-06	Schwarz criterion		-12.78536
Log likelihood	228.4409	F-statistic		2.10E+12
Durbin-Watson stat	1.753672	Prob(F-statistic)		0.000000

White Heteroskedasticity DAU Perpres 2007 Provinsi

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	0.521785	Probability	0.902860
Obs*R-squared	13.24976	Probability	0.776527

Uji Multikolinearity DAU Perpres 2007 Provinsi

	LOG(DAUF)	LOG(GAJI)	LOG(PDDK)	LOG(LW)	LOG(IKK)	LOG(PDRB)	LOG(IPMI)	LOG(PAD)	LOG(BHSDA)	LOG(BHP)
LOG(DAUF)	1	-0.073057	0.29578031	0.453514	0.058023	-0.355351725	0.51620444	-0.087875658	-0.229725106	-0.28764458
LOG(GAJI)	-0.073057	1	0.74227355	-0.24457	-0.38686	0.216730944	-0.287344739	0.824679971	0.070840111	0.61993984
LOG(PDDK)	0.2957803	0.7422736	1	-0.154542	-0.54468	0.124607675	-0.128168143	0.80402435	0.656067197	0.64557693
LOG(LW)	0.4535141	-0.24457	-0.1545423	1	0.520003	0.041621654	0.404800978	-0.310392988	0.42156274	-0.11424924
LOG(IKK)	0.0580233	-0.386858	-0.5446815	0.520003	1	-0.053084744	0.441571113	-0.563379357	0.20414156	-0.12787765
LOG(PDRB)	-0.355352	0.2167309	0.12460768	0.041622	-0.05308	1	-0.636847875	0.285369529	0.412334801	0.48470700
LOG(IPMI)	0.5162044	-0.287345	-0.1281681	0.404801	0.441571	-0.636847875	1	-0.421577482	-0.095765825	-0.34543415
LOG(PAD)	-0.087876	0.82468	0.80402435	-0.310393	-0.56338	0.285369529	-0.421577482	1	0.124232651	0.50406867
LOG(BHSDA)	-0.229725	0.0708401	0.05606711	0.421563	0.204142	0.412334801	-0.095765825	0.124232651	1	0.47572676
LOG(BHP)	-0.287645	0.6199398	0.64557694	-0.114249	-0.12788	0.484707001	-0.345434157	0.504068675	0.475726763	1

Lampiran 7

Hasil Regresi DAU Kabupaten/Kota Tahun 2006 Berdasarkan Formula

Regresi DAU Formula 2006 Kabupaten/Kota

Dependent Variable: LOG(DAUF)

Method: Least Squares

Date: 05/24/09 Time: 22:46

Sample: 1 434

Included observations: 428

Excluded observations: 6

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.749726	0.856084	-5.548200	0.0000
LOG(GAJI)	0.411240	0.037629	10.92873	0.0000
LOG(PDDK)	0.198220	0.030844	6.426449	0.0000
LOG(LW)	0.051702	0.009082	5.692888	0.0000
LOG(IKK)	0.769512	0.086139	8.933415	0.0000
LOG(IPMI)	0.136112	0.115432	1.179153	0.2390
LOG(PDRB)	0.112238	0.029060	3.862255	0.0001
LOG(PAD)	-0.033642	0.016209	-2.075543	0.0385
LOG(BHSDA)	-0.065179	0.007812	-8.343180	0.0000
LOG(BHP)	-0.072636	0.022331	-3.252710	0.0012
R-squared	0.776559	Mean dependent var		5.631795
Adjusted R-squared	0.771749	S.D. dependent var		0.456191
S.E. of regression	0.217948	Akaike info criterion		-0.186031
Sum squared resid	19.85561	Schwarz criterion		-0.091191
Log likelihood	49.81059	F-statistic		161.4160
Durbin-Watson stat	1.117326	Prob(F-statistic)		0.000000

White Heteroskedasticity DAU Formula 2006 Kabupaten/Kota

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	0.751573	Probability	0.756789
Obs*R-squared	13.70350	Probability	0.748205

Uji Multikolinearity DAU Formula 2006 Kabupaten/Kota

	DAUF	GAJI	PDDK	LW	IKK	IPMI	PDRB	PAD	BHSDA	BHP
DAUF	1	0.898063	0.834394	0.051787	-0.11428	0.057701	-0.14647	0.36449	-0.25056	0.280072
GAJI	0.898063	1	0.878761	-0.23301	-0.35899	-0.17045	-0.07242	0.538528	-0.09925	0.429361
PDDK	0.834394	0.878761	1	-0.20216	-0.29972	-0.08859	-0.09827	0.632234	-0.06893	0.602089
LW	0.051787	-0.23301	-0.20216	1	0.447843	0.308777	0.075645	-0.16298	0.317263	0.006525
IKK	-0.11428	-0.35899	-0.29972	0.447843	1	0.462454	-0.0519	-0.18805	0.011474	-0.11243
IPMI	0.057701	-0.17045	-0.08859	0.308777	0.462454	1	-0.44442	-0.27133	-0.13279	-0.22529
PDRB	-0.14647	-0.07242	-0.09827	0.075645	-0.0519	-0.44442	1	0.307826	0.307874	0.293536
PAD	0.36449	0.538528	0.632234	-0.16298	-0.18805	-0.27133	0.307826	1	0.004622	0.815515
BHSDA	-0.25056	-0.09925	-0.06893	0.317263	0.011474	-0.13279	0.307874	0.004622	1	0.229248
BHP	0.280072	0.429361	0.602089	0.006525	-0.11243	-0.22529	0.293536	0.815515	0.229248	1

Hasil Regresi DAU Kabupaten/Kota Tahun 2006 Berdasarkan Perpres

Regresi DAU Perpres 2006 Kabupaten/Kota

Dependent Variable: LOG(DAUK)

Method: Least Squares

Date: 05/21/09 Time: 22:06

Sample: 1 434

Included observations: 434

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.839490	0.818215	-5.914694	0.0000
LOG(GAJI)	0.448076	0.034334	13.05057	0.0000
LOG(PDDK)	0.179555	0.030786	5.832314	0.0000
LOG(LW)	0.044296	0.009167	4.831996	0.0000
LOG(IKK)	0.752183	0.084731	8.877257	0.0000
LOG(IPMI)	0.193013	0.109714	1.759233	0.0793
LOG(PDRB)	0.116149	0.027870	4.167573	0.0000
LOG(PAD)	-0.052223	0.025338	-2.061084	0.0399
LOG(BHSDA)	-0.061591	0.008535	-7.216447	0.0000
LOG(BHP)	-0.053228	0.023764	-2.239849	0.0256
R-squared	0.801617	Mean dependent var		5.610336
Adjusted R-squared	0.797406	S.D. dependent var		0.451098
S.E. of regression	0.203041	Akaike info criterion		-0.328046
Sum squared resid	17.47966	Schwarz criterion		-0.234197
Log likelihood	81.18607	F-statistic		190.3648
Durbin-Watson stat	1.144588	Prob(F-statistic)		0.000000

White Heteroskedasticity DAU Perpres 2006 Kabupaten/Kota

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	5.768152	Probability	0.000000
Obs*R-squared	86.85136	Probability	0.000000

Uji Multikolinearity DAU Perpres 2006 Kabupaten/Kota

	LOG(DAUK)	LOG(GAJI)	LOG(PDDK)	LOG(LW)	LOG(IKK)	LOG(IPMI)	LOG(PDRB)	LOG(PAD)	LOG(BHSDA)	LOG(BHP)
LOG(DAUK)	1	0.779621	0.723255	0.103708	-0.15153	0.109435	-0.20691	0.441439	-0.33835	0.287498
LOG(GAJI)	0.779621	1	0.906877	-0.15594	-0.52547	-0.21912	-0.08992	0.723763	-0.17359	0.509251
LOG(PDDK)	0.723255	0.906877	1	-0.11342	-0.53714	-0.13498	-0.16531	0.73931	-0.09633	0.563756
LOG(LW)	0.103708	-0.15594	-0.11342	1	0.435602	0.520068	-0.16744	-0.29616	0.303264	0.018555
LOG(IKK)	-0.15153	-0.52547	-0.53714	0.435602	1	0.436303	-0.06641	-0.4596	0.075013	-0.21349
LOG(IPMI)	0.109435	-0.21912	-0.13498	0.520068	0.436303	1	-0.52543	-0.41642	-0.12039	-0.33317
LOG(PDRB)	-0.20691	-0.08992	-0.16531	-0.16744	-0.06641	-0.52543	1	0.176153	0.296309	0.297113
LOG(PAD)	0.441439	0.723763	0.73931	-0.29616	-0.4596	-0.41642	0.176153	1	-0.0064	0.625817
LOG(BHSDA)	-0.33835	-0.17359	-0.09633	0.303264	0.075013	-0.12039	0.296309	-0.0064	1	0.357321
LOG(BHP)	0.287498	0.509251	0.563756	0.018555	-0.21349	-0.33317	0.297113	0.625817	0.357321	1

Hasil Regresi DAU Kabupaten/Kota Tahun 2007 Berdasarkan Formula

Regresi DAU Formula 2007 Kabupaten/Kota

Dependent Variable: LOG(DAUF)

Method: Least Squares

Date: 05/01/09 Time: 19:50

Sample: 1 434

Included observations: 429

Excluded observations: 5

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.696332	0.776867	-4.757999	0.0000
LOG(GAJI)	0.361621	0.033686	10.73494	0.0000
LOG(PDDK)	0.196246	0.029561	6.638667	0.0000
LOG(LW)	0.046918	0.008279	5.667195	0.0000
LOG(IKK)	0.747357	0.084146	8.881666	0.0000
LOG(PDRB)	0.055298	0.025045	2.207988	0.0278
LOG(IPMI)	0.144957	0.099946	1.450358	0.1477
LOG(PAD)	-0.041152	0.015678	-2.624861	0.0090
LOG(BHSDA)	-0.036159	0.006730	-5.372415	0.0000
LOG(BHP)	-0.015573	0.023273	-0.669141	0.5038
R-squared	0.807771	Mean dependent var		5.756939
Adjusted R-squared	0.803642	S.D. dependent var		0.419988
S.E. of regression	0.186106	Akaike info criterion		-0.501962
Sum squared resid	14.51232	Schwarz criterion		-0.407289
Log likelihood	117.6708	F-statistic		195.6319
Durbin-Watson stat	1.202864	Prob(F-statistic)		0.000000

White Heteroskedasticity DAU Formula 2007 Kabupaten/Kota

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	10.09455	Probability	0.000000
Obs*R-squared	131.7388	Probability	0.000000

Uji Multikolinearity DAU Formula 2007 Kabupaten/Kota

	LOG(DAUK)	LOG(GAJI)	LOG(PDDK)	LOG(LW)	LOG(IKK)	LOG(PDRB)	LOG(IPMI)	LOG(PAD)	LOG(BHSDA)	LOG(BHP)
LOG(DAUK)	1	0.800066	0.756968	0.088764	-0.16838	-0.16057	0.083339	0.455365	-0.26717	0.267046
LOG(GAJI)	0.800066	1	0.905826	-0.18764	-0.51655	-0.0669	-0.21443	0.70004	-0.24644	0.344242
LOG(PDDK)	0.756968	0.905826	1	-0.1322	-0.53048	-0.13531	-0.13456	0.722148	-0.17401	0.442449
LOG(LW)	0.088764	-0.18764	-0.1322	1	0.451421	-0.19747	0.519116	-0.3158	0.366435	0.135828
LOG(IKK)	-0.16838	-0.51655	-0.53048	0.451421	1	-0.10366	0.444959	-0.47946	0.308236	-0.01633
LOG(PDRB)	-0.16057	-0.0669	-0.13531	-0.19747	-0.10366	1	-0.55753	0.268899	0.268206	0.273883
LOG(IPMI)	0.083339	-0.21443	-0.13456	0.519116	0.444959	-0.55753	1	-0.43987	0.010119	-0.19005
LOG(PAD)	0.455365	0.70004	0.722148	-0.3158	-0.47946	0.208899	-0.43987	1	-0.09029	0.478694
LOG(BHSDA)	-0.26717	-0.24644	-0.17401	0.366435	0.308236	0.268206	0.010119	-0.09029	1	0.455631
LOG(BHP)	0.267046	0.344242	0.442449	0.135828	-0.01633	0.273883	-0.19005	0.478694	0.455631	1

Hasil Regresi DAU Kabupaten/Kota Tahun 2007 Berdasarkan Perpres

Regresi DAU Perpres 2007 Kabupaten/Kota

Dependent Variable: LOG(DAUK)

Method: Least Squares

Date: 05/01/09 Time: 19:50

Sample: 1 434

Included observations: 433

Excluded observations: 1

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.673385	0.843466	-6.726274	0.0000
LOG(GAJI)	0.393407	0.035886	10.96268	0.0000
LOG(PDDK)	0.193361	0.029574	6.538305	0.0000
LOG(LW)	0.042749	0.008238	5.189417	0.0000
LOG(IKK)	0.820227	0.088052	9.315273	0.0000
LOG(PDRB)	0.133882	0.026179	5.114149	0.0000
LOG(IPMI)	0.249917	0.106791	2.340251	0.0197
LOG(PAD)	-0.042002	0.015228	-2.758241	0.0061
LOG(BHSDA)	-0.045687	0.006607	-6.914882	0.0000
LOG(BHP)	-0.031847	0.024994	-1.274200	0.2033
R-squared	0.806648	Mean dependent var		5.741871
Adjusted R-squared	0.802534	S.D. dependent var		0.430393
S.E. of regression	0.191254	Akaike info criterion		-0.447600
Sum squared resid	15.47260	Schwarz criterion		-0.353588
Log likelihood	106.9055	F-statistic		196.0798
Durbin-Watson stat	1.161796	Prob(F-statistic)		0.000000

White Heteroskedasticity DAU Perpres 2007

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	10.69115	Probability	0.000000
Obs*R-squared	137.4031	Probability	0.000000

Uji Multikolinearity DAU Perpres 2007 Kabupaten/Kota

	LOG(DAUK)	LOG(GAJI)	LOG(PDDK)	LOG(LW)	LOG(IKK)	LOG(PDRB)	LOG(IPMI)	LOG(PAD)	LOG(BHSDA)	LOG(BHP)
LOG(DAUK)	1	0.800066	0.756968	0.088784	-0.16836	-0.16057	0.083339	0.455365	-0.26717	0.267046
LOG(GAJI)	0.800066	1	0.905826	-0.18764	-0.51655	-0.0569	-0.21443	0.70004	-0.24644	0.344242
LOG(PDDK)	0.756968	0.905826	1	-0.1322	-0.53048	-0.13531	-0.13456	0.722148	-0.17401	0.442449
LOG(LW)	0.088784	-0.18764	-0.1322	1	0.451421	-0.19747	0.519116	-0.3158	0.366435	0.135828
LOG(IKK)	-0.16836	-0.51655	-0.53048	0.451421	1	-0.10368	0.444959	-0.47946	0.308236	-0.01633
LOG(PDRB)	-0.16057	-0.0569	-0.13531	-0.19747	-0.10368	1	-0.55753	0.208899	0.268206	0.273983
LOG(IPMI)	0.083339	-0.21443	-0.13456	0.519116	0.444959	-0.55753	1	-0.43987	0.010119	-0.19005
LOG(PAD)	0.455365	0.70004	0.722148	-0.3158	-0.47946	0.208899	-0.43987	1	-0.09029	0.478694
LOG(BHSDA)	-0.26717	-0.24644	-0.17401	0.366435	0.308236	0.268206	0.010119	-0.09029	1	0.455631
LOG(BHP)	0.267046	0.344242	0.442449	0.135828	-0.01633	0.273983	-0.19005	0.478694	0.455631	1

Hasil Regresi Terboboti DAU Provinsi Tahun 2006 Berdasarkan Formula

Regresi Terboboti DAU Formula 2006 Provinsi

Dependent Variable: DAUF
 Method: Least Squares
 Date: 04/23/09 Time: 23:46
 Sample: 1 33
 Included observations: 33

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GAJI	0.131318	3.66E-06	35892.42	0.0000
PDDK	1.060366	2.99E-06	354232.5	0.0000
LW	0.380316	1.41E-06	269244.5	0.0000
IKK	0.010001	1.36E-06	7328.609	0.0000
IPMI	0.001877	1.07E-06	1760.523	0.0000
PDRB	0.026314	3.54E-06	7435.571	0.0000
PAD	-0.190264	6.69E-06	-28425.41	0.0000
BHSDA	-0.041887	9.85E-07	-42506.55	0.0000
BHP	-0.088030	5.27E-06	-16690.93	0.0000
R-squared	1.000000	Mean dependent var	6.06E-07	
Adjusted R-squared	1.000000	S.D. dependent var	1.000001	
S.E. of regression	3.85E-06	Akaike info criterion	-21.86844	
Sum squared resid	3.56E-10	Schwarz criterion	-21.46030	
Log likelihood	369.8292	Durbin-Watson stat	1.610441	

White Heteroskedasticity DAU Formula 2006 Provinsi

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	0.510045	Probability	0.910283
Obs*R-squared	13.06972	Probability	0.787414

Hasil Regresi Terboboti DAU Provinsi Tahun 2006

Berdasarkan Peraturan Presiden

Regresi Terboboti DAU Perpres 2006 Provinsi

Dependent Variable: DAUK

Method: Least Squares

Date: 04/24/09 Time: 00:18

Sample: 1 33

Included observations: 33

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GAJI	2.353518	0.078724	29.89589	0.0000
PDDK	0.990435	0.064410	15.37715	0.0000
LW	0.443432	0.030394	14.58967	0.0000
IKK	0.152784	0.029362	5.203363	0.0000
IPMI	0.029737	0.022936	1.296480	0.2071
PDRB	0.267533	0.076146	3.513406	0.0018
PAD	-1.291504	0.144024	-8.967313	0.0000
BHSDA	-0.352310	0.021204	-16.61552	0.0000
BHP	-1.085855	0.113484	-9.568346	0.0000
R-squared	0.994845	Mean dependent var		-9.09E-07
Adjusted R-squared	0.993127	S.D. dependent var		1.000000
S.E. of regression	0.082905	Akaike info criterion		-1.915236
Sum squared resid	0.164959	Schwarz criterion		-1.607097
Log likelihood	40.60139	Durbin-Watson stat		1.793055

White Heteroskedasticity DAU Perpres 2006 Provinsi

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	1.581218	Probability	0.194392
Obs*R-squared	22.11966	Probability	0.226716

Hasil Regresi Terboboti DAU Provinsi Tahun 2007 Berdasarkan Formula

Regresi Terboboti DAU Formula 2007 Provinsi

Dependent Variable: DAUF
 Method: Least Squares
 Date: 05/18/09 Time: 08:39
 Sample: 1 33
 Included observations: 33

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GAJI	1.981727	0.108650	18.23961	0.0000
PDDK	0.946659	0.073482	12.88280	0.0000
LW	0.326469	0.034006	9.600437	0.0000
IKK	0.112955	0.031682	3.565335	0.0016
PDRB	0.141088	0.027516	5.127510	0.0000
IPMI	0.028473	0.025365	1.122528	0.2727
PAD	-1.527094	0.291296	-5.242411	0.0000
BHSDA	-0.335939	0.023333	-14.39782	0.0000
BHP	-0.292790	0.250600	-1.168355	0.2541
R-squared	0.994455	Mean dependent var		2.69E-17
Adjusted R-squared	0.992606	S.D. dependent var		0.999644
S.E. of regression	0.085957	Akaike info criterion		-1.842927
Sum squared resid	0.177329	Schwarz criterion		-1.434789
Log likelihood	39.40830	Durbin-Watson stat		2.038441

White Heteroskedasticity DAU Formula 2007 Provinsi

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	0.359832	Probability	0.978194
Obs*R-squared	10.43808	Probability	0.916665

Hasil Regresi Terboboti DAU Provinsi Tahun 2007

Berdasarkan Peraturan Presiden

Regresi Terboboti DAU Perpres 2007 Provinsi

Dependent Variable: DAUK
 Method: Least Squares
 Date: 05/18/09 Time: 08:16
 Sample: 1 33
 Included observations: 33

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GAJI	1.502254	0.168304	8.925860	0.0000
PDDK	0.903783	0.113828	7.939918	0.0000
LW	0.229233	0.052676	4.351725	0.0002
IKK	0.119444	0.049076	2.433855	0.0228
PDRB	0.088640	0.042624	2.079609	0.0484
IPMI	0.077355	0.039292	1.968708	0.0606
PAD	-0.878708	0.451232	-1.947354	0.0633
BHSDA	-0.294262	0.036143	-8.141220	0.0000
BHP	-0.972052	0.388192	-2.504048	0.0195
R-squared	0.986703	Mean dependent var		5.30E-17
Adjusted R-squared	0.982270	S.D. dependent var		1.000000
S.E. of regression	0.133152	Akaike info criterion		-0.967646
Sum squared resid	0.425509	Schwarz criterion		-0.559507
Log likelihood	24.96615	Durbin-Watson stat		1.861550

White Heteroskedasticity DAU Perpres 2007 Provinsi

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	1.790375	Probability	0.136613
Obs*R-squared	23.00579	Probability	0.190368

Hasil Regresi Terboboti DAU Kabupaten/Kota Tahun 2006

Berdasarkan Formula

Regresi Terboboti DAU Formula 2006 Kabupaten/Kota

Dependent Variable: DAUF

Method: Least Squares

Date: 04/24/09 Time: 00:27

Sample: 1 434

Included observations: 434

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GAJI	0.672470	4.43E-07	1517685.	0.0000
PDDK	0.446561	5.15E-07	866314.7	0.0000
LW	0.288176	2.41E-07	1196977.	0.0000
IKK	0.095992	2.49E-07	386164.9	0.0000
IPMI	0.019529	2.62E-07	74516.55	0.0000
PDRB	0.108931	2.56E-07	424924.2	0.0000
PAD	-0.159085	3.88E-07	-410222.8	0.0000
BHSDA	-0.448706	2.42E-07	-1854287.	0.0000
BHP	-0.140593	4.13E-07	-340343.0	0.0000
R-squared	1.000000	Mean dependent var		6.02E-17
Adjusted R-squared	1.000000	S.D. dependent var		1.000000
S.E. of regression	4.06E-06	Akaike info criterion		-21.96892
Sum squared resid	7.01E-09	Schwarz criterion		-21.88446
Log likelihood	4776.256	Durbin-Watson stat		1.913999

White Heteroskedasticity DAU Formula 2006 Kabupaten/Kota

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	0.511282	Probability	0.952977
Obs*R-squared	9.415622	Probability	0.949323

Hasil Regresi Terboboti DAU Kabupaten/Kota Tahun 2006

Berdasarkan Peraturan Presiden

Regresi Terboboti DAU Perpres 2006 Kabupaten/Kota

Dependent Variable: DAUK

Method: Least Squares

Date: 04/24/09 Time: 00:40

Sample: 1 434

Included observations: 434

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GAJI	0.753008	0.017915	42.03326	0.0000
PDDK	0.452071	0.016771	26.95499	0.0000
LW	0.245671	0.018297	13.42673	0.0000
IKK	0.122491	0.009177	13.34809	0.0000
IPMI	0.041735	0.009323	4.476730	0.0000
PDRB	0.093039	0.013735	6.774006	0.0000
PAD	-0.149575	0.017009	-8.793720	0.0000
BHSDA	-0.160507	0.039724	-4.040590	0.0001
BHP	-0.159365	0.019505	-8.170605	0.0000
R-squared	0.973086	Mean dependent var		1.61E-07
Adjusted R-squared	0.972579	S.D. dependent var		1.000000
S.E. of regression	0.165592	Akaike info criterion		-0.738066
Sum squared resid	11.65374	Schwarz criterion		-0.653601
Log likelihood	169.1602	Durbin-Watson stat		1.927217

White Heteroskedasticity DAU Perpres 2006 Kabupaten/Kota

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	15.36630	Probability	0.000000
Obs*R-squared	173.5724	Probability	0.000000

Hasil Regresi Terboboti DAU Kabupaten/Kota Tahun 2007

Berdasarkan Formula

Regresi Terboboti DAU Formula 2007 Kabupaten/Kota

Dependent Variable: DAUF

Method: Least Squares

Date: 05/24/09 Time: 11:37

Sample: 1 434

Included observations: 434

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GAJI	0.680890	0.009279	73.38353	0.0000
PDDK	0.472076	0.009105	51.84584	0.0000
LW	0.295649	0.004108	71.96928	0.0000
IKK	0.104200	0.001715	60.76979	0.0000
PDRB	0.104479	0.004977	23.87135	0.0000
IPMI	0.026072	0.003128	8.335136	0.0000
PAD	-0.102010	0.004345	-23.47984	0.0000
BHSDA	-0.268809	0.024268	-11.07677	0.0000
BHP	-0.119952	0.005329	-22.50810	0.0000
R-squared	0.997631	Mean dependent var		-8.91E-16
Adjusted R-squared	0.997587	S.D. dependent var		1.000000
S.E. of regression	0.049123	Akaike info criterion		-3.168450
Sum squared resid	1.025564	Schwarz criterion		-3.083986
Log likelihood	696.5538	Durbin-Watson stat		1.727148

White Heteroskedasticity DAU Formula 2007 Kabupaten/Kota

White Heteroskedasticity Test

F-statistic	1090.816	Probability	0.000000
Obs*R-squared	425.0168	Probability	0.000000

Hasil Regresi Terboboti DAU Kabupaten/Kota Tahun 2007

Berdasarkan Peraturan Presiden

Regresi Terboboti DAU Perpres 2007 Kabupaten/Kota

Dependent Variable: DAUK

Method: Least Squares

Date: 05/24/09 Time: 11:44

Sample: 1 434

Included observations: 434

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GAJI	0.702131	0.014822	47.37136	0.0000
PDDK	0.470419	0.014591	32.24066	0.0000
LW	0.285685	0.009389	30.42712	0.0000
IKK	0.107426	0.003871	27.74896	0.0000
PDRB	0.092049	0.008430	10.91987	0.0000
IPMI	0.030634	0.005490	5.579536	0.0000
PAD	-0.096923	0.009823	-9.867069	0.0000
BHSDA	-0.160703	0.037109	-4.330565	0.0000
BHP	-0.125274	0.011749	-10.66279	0.0000
R-squared	0.991199	Mean dependent var		-2.16E-16
Adjusted R-squared	0.991033	S.D. dependent var		1.000000
S.E. of regression	0.094692	Akaike info criterion		-1.855852
Sum squared resid	3.810806	Schwarz criterion		-1.771388
Log likelihood	411.7199	Durbin-Watson stat		1.549292

White Heteroskedasticity DAU Perpres 2007 Kabupaten/Kota

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	107.4243	Probability	0.000000
Obs*R-squared	357.3130	Probability	0.000000